



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

RUANG KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Memang : a. bahwa dalam rangka mencapai pembangunan yang tepat sasaran diperlukan perencanaan prioritas pembangunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah Rencana Pembangunan Nasional untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) Tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
11. Kebijakan adalah keputusan politik Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah.
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
13. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Adapun Tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah:
  - a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkayang dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
  - b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2016.

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Bengkayang menggunakan RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkayang menggunakan RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2016, memuat :

- a. pendahuluan ;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
- e. program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah; dan
- f. penutup.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2016, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 sebagaimana dalam Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali sekali dalam setahun.
- (2) Peninjauan kembali RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di      Bengkayang  
pada tanggal 28 Mei 2015

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015  
NOMOR ...../.....

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR .....16.....TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 dapat diselesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Adapun proses penyusunan RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja SKPD, musrenbang RKPD, penyusunan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan Peraturan Kepala Daerah.

RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 yang telah ditetapkan selanjutnya dapat menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016, disadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyajiannya karena keterbatasan informasi dan referensi yang dimiliki. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat diperlukan demi penyempurnaan dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan yang selanjutnya.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bengkayang, Mei 2015

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB. I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	7
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	9
1.4. Sistematika Dokumen RKPd .....	10
1.5. Maksud dan Tujuan .....	13
<b>BAB. II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPd TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b> .....	<b>14</b>
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah .....	14
2.1.1. Kondisi Geografi dan Demografi .....	14
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	24
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .....	30
2.1.2. Aspek Daya Saing Daerah .....	38
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPd Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 dan Realisasinya .....	42
2.3. Capaian Indikator Utama Pembangunan .....	79
<b>BAB. III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN</b> .....	<b>81</b>
3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah .....	81
3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014 .....	82
3.1.2. Isu Strategis 2015 .....	83
3.1.3. Analisis Lingkungan (SWOT) .....	84

3.1.4.	Tantangan dan Prospek Perekonomian	
	Tahun 2015-2016 .....	87
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	90
3.2.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	90
3.2.2.	Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	93
3.2.3.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	97
<b>BAB. IV.</b>	<b>PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
	<b>TAHUN 2015 .....</b>	<b>100</b>
4.1.	Arah Kebijakan Pembangunan .....	101
4.2.	Prioritas Pembangunan .....	102
4.3.	Sasaran Pembangunan .....	136
<b>BAB. V.</b>	<b>RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	
	<b>DAERAH TAHUN 2015 .....</b>	<b>142</b>
<b>BAB. VI.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>153</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan (RKP). Amanat Undang- Undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang di dalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Dokumen RKPD sekurang-kurangnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan.

RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjarangan aspirasi secara bertahap melalui Musrenbang yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten yang selanjutnya diformulasikan melalui Musrenbang RKPD Provinsi. Penyusunan dokumen RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, hal ini sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota merupakan bagian daerah provinsi serta

mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a) RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
- b) RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
- c) RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan menentukan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d) RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut:

***Pendekatan Teknokratis;***

yaitu pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilandasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terstruktur dan berkelanjutan. Pendekatan ini dilaksanakan pemerintah daerah melalui kewenangan tugas pokok dan fungsi SKPD, yang implementasinya tercermin dari:

- a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu;
- b) Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini;

- c) Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD;
- d) Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan;
- e) Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah);
- f) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;
- g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan;
- h) Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya;
- i) Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk *review* kemajuan pencapaian sasaran. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

#### ***Pendekatan Demokratis dan Partisipatif;***

Pendekatan ini mengakomodasi secara langsung berbagai kepentingan *stakeholders* dalam pembangunan. Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan dalam RKPD berupa:

- a) Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD;
- b) Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan;
- c) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan;
- d) Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal;
- e) Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD;
- f) Pelibatan media;
- g) Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif;
- h) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan serta prioritas program.

#### ***Pendekatan Politis;***

Pendekatan ini mengakomodasi kepentingan politik dari para pejabat dan pelaku politik baik melalui DPRD maupun partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Dalam pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek perencanaan hal-hal yang bersifat politik strategis dirumuskan dalam bentuk dokumen perencanaan baku sebagai pedoman bersama dalam perencanaan pembangunan dari waktu ke waktu, mulai dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Pendekatan politis tercermin pada RKPD berupa:

- a) Rapat Koordinasi Kepala Daerah dengan kepala SKPD membahas hal-hal strategis yang berkembang baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang dapat berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2016;
- b) Keterlibatan aktif DPRD dalam Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten/RKPD termasuk sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD dan pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan langsung pada Musrenbang Kabupaten dalam rangka menyepakati rumusan rancangan RKPD Tahun 2016;
- c) Kedudukan RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan RKPD sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan termasuk RAPBD.

***Pendekatan Top Down;***

Pendekatan ini memadukan antara arahan yang bersifat mandatory dari pemerintahan yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi) dengan kepentingan Pemerintah Daerah bersama masyarakat. Dalam prakteknya perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/rapat kerja, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin pada RKPD berupa adanya:

- a) Sinergi dengan RKPD dan RENJA SKPD Provinsi Kalimantan Barat, RKP dan RENJA Kementerian/Lembaga;
- b) Konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Bengkayang;
- c) Konsisten dengan RTRW Daerah;



- d) Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem;
- e) Sinergi dengan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti *Millenium Development Goals (MDGs)*, *sustainable development*, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sebagainya.

***Pendekatan Bottom Up;***

Pendekatan ini mengakomodasi secara optimal masukan dari masyarakat luas melalui jenjang pemerintahan dan struktur kemasyarakatan dari bawah. Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin dari adanya:

- a) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui komunikasi masyarakat sekaligus untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kabupaten Bengkayang;
- b) Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah;
- c) Mempertimbangkan hasil Forum SKPD.

Selain itu dalam rangka penyusunan RKPD dilandasi 4 prinsip dasar perencanaan pembangunan yaitu: 1) pembangunan berkelanjutan; 2) partisipasi masyarakat; 3) *gender mainstream*; 4) *good governance*.

Dokumen RKPD merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua stakeholders menjadi pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam proses penyusunan. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini harus dapat diakses oleh semua *stakeholders* baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Adapun tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. **Penyiapan Rancangan Awal**
  - 1. Memperhatikan hasil analisis kemampuan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, alokasi belanja, sumber dan penggunaan pembiayaan disertai dengan asumsi yang mendasar sebagai acuan dalam pengalokasian dana pada setiap rencana kerja.

2. Memperhatikan prioritas pembangunan daerah yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan pada RKP tingkat pemerintahan atasnya.
  3. Memperhatikan penjabaran rencana kerja SKPD
  4. Memperhatikan prakiraan maju anggaran untuk mengetahui pagu indikatif bagi setiap SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun rencana tersebut.
- b. Penyusunan Rancangan
1. Rancangan RKPD merupakan integrasi antara rancangan awal dan rancangan Renja SKPD, yang selanjutnya menjadi input utama pada musrenbang Tahunan Daerah.
  2. Rancangan Awal RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.
  3. Dalam penetapan prioritas pembangunan dilakukan dengan memperhatikan isu-isu masalah strategis atas pengaruh internal dan eksternal.
- c. Musrenbang Tahunan Daerah
1. Musrenbang Tahunan Daerah merupakan rangkaian musyawarah perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan, Forum SKPD dan musrenbang kabupaten/kota, dan Forum SKPD dan musrenbang tingkat provinsi.
  2. Musrenbang Tahunan Daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas prioritas pembangunan, rencana kerja pembangunan, mengalokasikan anggaran pada setiap rencana kerja, lokasi kegiatan dan SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.
  3. Musrenbang Tahunan Daerah merupakan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan yang menjadi masukan dalam penyempurnaan rancangan RKPD.
- d. Penyusunan Rancangan Akhir
- Rancangan awal yang telah dikaji dan memperhatikan masukan dari kesepakatan Musrenbang Tahunan Daerah akan menghasilkan Rancangan Akhir RKPD 2016 Kabupaten Bengkayang untuk disampaikan

kepada Kepala Daerah yang selanjutnya diproses untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

e. Penetapan

RKPD yang telah disempurnakan akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan digunakan sebagai:

1. Pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD dan bahan dalam penyusunan RKA SKPD Tahun 2016.
2. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafont Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun 2016.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 meliputi :

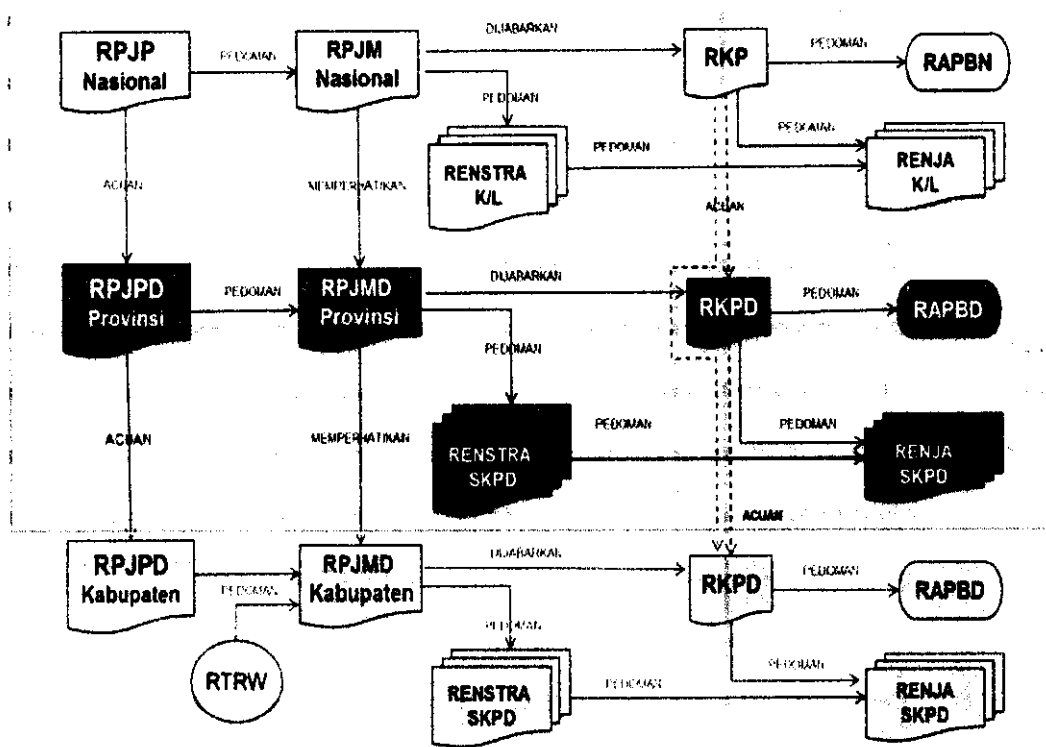
- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan payung hukum bagi perencanaan pembangunan dalam rangka menjamin tercapainya tujuan negara, yang digunakan sebagai arahan di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan secara nasional. Menurut undang-undang tersebut, rencana pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam konteks hubungan antar dokumen dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 ini beberapa dokumen perencanaan yang berhubungan satu sama lain yaitu: RPJPD Kabupaten Bengkayang, RTRW Kabupaten Bengkayang, RPJMD Kabupaten Bengkayang, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, RKPD Kabupaten Bengkayang, RKPD Provinsi Kalimantan Barat, RKP Nasional, Renstra SKPD Kabupaten Bengkayang dan Renja SKPD Kabupaten Bengkayang.

RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 merupakan dokumen pembangunan tahunan yang disusun, dalam rangka menjamin konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD, yang terdiri dari RKPD, kebijakan umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA SKPD). Oleh karena itu penyusunan RKPD merupakan prasyarat APBD berbasis kinerja.



Gambar 1.1

Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional, Daerah, dan SKPD Pembangunan

#### 1.4 Sistematika Dokumen RAKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RAKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 merupakan dokumen pembangunan tahunan yang disusun dalam sistematika sebagai berikut:

### BAB I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RAKPD, proses penyusunan RAKPD, kedudukan RAKPD tahun 2016 dalam RPJMD, keterkaitan antar dokumen RAKPD dengan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan APBD.

#### 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RAKPD baik yang berskala nasional maupun lokal.



### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

### 1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan RKPD terkait dengan pengaturan Bab serta garis besar isi setiap Bab.

### 1.5 Maksud dan Tujuan

Mengemukakan maksud dan tujuan penyusunan RKPD serta menguraikan fungsi RKPD dalam proses implementasi pembangunan Tahun 2016 di daerah.

## **BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

### 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 dan Realisasinya

Memuat uraian dari hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu menurut urusan wajib dan pilihan.

### 2.3 Capaian Indikator Utama Pembangunan

## **BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN**

Memuat penjelasan tentang rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan mencakup kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

### 3.1 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang memuat indikator pertumbuhan ekonomi

daerah. Bab ini ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Bab ini membahas proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 guna mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan daerah Kalimantan Barat.

## **BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016**

### **4.1 Arah Kebijakan Pembangunan**

Mengemukakan tentang kebijakan umum pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2016

### **4.2 Sasaran Pembangunan**

Menjelaskan tentang sasaran dan target pembangunan Kabupaten Bengkayang secara umum maupun khusus, dari beberapa prioritas bidang pembangunan yang ingin dicapai.

### **4.3 Prioritas dan Program Pembangunan**

Mencantumkan beberapa prioritas pembangunan Kabupaten Bengkayang di tahun 2016 yang dijabarkan dalam program kegiatan prioritas pembangunan untuk masing-masing SKPD yang ada di Kabupaten Bengkayang sesuai dengan kondisi obyektif dan kebijakan pembangunan berdasarkan regulasi yang ada.

## **BAB V. RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2016**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan program pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu dan masalah mendesak pembangunan daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016.

## **BAB VI. PENUTUP**

### **1.5 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2016:

- a. Mengakomodasi pokok-pokok pikiran dan masukan dari masyarakat baik melalui musrenbang maupun komunikasi publik lainnya;
- b. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan;
- c. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan yang akan dijadikan salah satu kekuatan pembangunan;
- d. Memberikan arah sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Adapun tujuannya adalah:

- a. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Kabupaten Bengkayang dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2016;
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2016;
- c. Menciptakan kepastian dan mensinergiskan perencanaan program pembangunan antar wilayah, antar sektor, dan antar tingkat Pemerintahan;
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
- e. Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat karena memuat arah dan kebijakan pembangunan.

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

#### **2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah**

##### **2.1.1 Kondisi Geografi dan Demografi**

###### **1. Kondisi Geografi**

Kabupaten Bengkayang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di sebelah Utara Provinsi Kalimantan Barat secara geografis. Kabupaten Bengkayang terletak di 0° 33' 00" Lintang Utara sampai 1° 30' 00" Lintang Utara dan 108° 39' 00" Bujur Timur sampai 110° 10' 00" Bujur Timur.

Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur) dan Kabupaten Sambas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pontianak
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Kota Singkawang
- Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak

Kabupaten Bengkayang merupakan bagian Utara dari Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 5.396,30 Km<sup>2</sup> atau sekitar 3,68% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Jagoi Babang Merupakan Kecamatan yang paling luas di Kabupaten Bengkayang dengan cakupan wilayah sebesar 655 Km<sup>2</sup> atau sekitar 12,14% dari luas wilayah Kabupaten Bengkayang. Sedangkan kecamatan dengan cakupan wilayah terkecil adalah Kecamatan Capkala dengan luas wilayah sebesar 46,35 Km<sup>2</sup> atau hanya sekitar 0,86% dari total wilayah Kabupaten Bengkayang.

Terbentuk dan pemekaran kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bengkayang berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan kecamatan Suti Semarang.

2. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Capkal
3. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siding
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Lumar
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Sunagi Betung
6. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2004 tentang Pembentukan Kelurahan Bumi emas dan Kelurahan Sebalu.
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan Sungai Raya dimekarkan menjadi Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan Sanggau Ledo dimekarkan menjadi Kecamatan Tujuh Belas.
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan Samalantan dimekarkan menjadi Kecamatan Lembah Bawang.
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siding.

Rincian 17 (tujuh belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang disajikan pada Tabel Berikut:

**Tabel 2.1**

Jumlah Desa, Dusun, dan Luas Wilayah Untuk Setiap Kecamatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2014

No.	Kecamatan	Jumlah			Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
		Kelurahan	Desa	Dusun	
1	Sungai Raya		5	18	75,85
2	Capkala		6	13	46,35
3	Samalantan		7	29	420,50
4	Monterado		11	26	291,00
5	Bengkayang	2	4	9	167,04
6	Teriak		18	18	231,51
7	Sungai Betung		4	10	205,95

8	Ledo		12	28	481,75
9	Suti Semarang		8	13	280,84
10	Lumar		5	13	275,21
11	Sanggau Ledo		5	18	392,50
12	Seluas		6	25	506,50
13	Jagoi Babang		6	16	655,00
14	Siding		8	26	563,30
15	Tujuh Belas		4	13	221,00
16	Sungai Raya Kepulauan		5	18	394,00
17	Lembah Bawang		8	19	188,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>122</b>	<b>312</b>	<b>5.396,30</b>

Sumber: BPS Bengkayang, 2014

Secara topografi wilayah Kabupaten Bengkayang memiliki dua kondisi alam, yaitu:

1. Pesisir pantai yang termasuk dalam wilayah administrasi kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan.
2. Daratan dan Perbukitan yang terdiri dari Kecamatan Capkala, Samalantan, Monterado, Bengkayang, Teriak, Sungai Betung, Ledo, Suti Semarang, Lumar, Sanggau Ledo, Seluas, Jagoi babang, dan Siding.

Terdapat tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) Utama yang melintasi wilayah kabupaten Bengkayang, yaitu DAS Sambas dengan luas 722.500 Ha, das Sungai Raya dengan luas 50.00 Ha, dan DAS Sungai Duri dengan Luas 24.375 Ha.

Sedangkan dilihat dari jenis tanahnya, sebagian besar daerah Kabupaten Bengkayang adalah jenis tanah Podsolik merah kuning, yaitu sebesar 322.347 Ha dan yang paling kecil adalah jenis OGH, yaitu hanya sekitar 6.700 Ha.

Kabupaten Bengkayang pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur udara rata-rata perbulan berkisar antara 22,9°C sampai 31,05°C, kelembaban nisbi rata-raa perbulan sekitar 86%, intensitas penyinaran matahari adalah 38%. Curah hujan yang cukup tinggi pada blan September sampai bulan Januari dan curah hujan yang rendah antara bulan Juni sampai bulan Agustus.

Kabupaten Bengkayang juga memiliki wilayah pesisir dan wilayah kepulauan, yakni sebanyak 12 buah pulau yang secara administrasi terdapat



di wilayah Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Secara detailnya data mengenai kepulauan tersebut dapat dilihat pada Tabel Berikut:

**Tabel 2.2**

Nama-nama Pulau dan Luas Menurut Desa di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang

<b>Desa</b>	<b>Nama Pulau</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Keterangan</b>
Sungai Besar	Penatah Besar	259	Berpenghuni
	Penatah Kecil	81	Berpenghuni
	Seluas	38	Tidak Berpenghuni
	Semesak	58	Tidak Berpenghuni
	Kera	22	Tidak Berpenghuni
	Baru	48	Berpenghuni
	Batu Rakit	13	Tidak Berpenghuni
	Tempurung	30	Tidak Berpenghuni
Karimunting	Kabung	341	Berpenghuni
	Batu Payung	21	Tidak Berpenghuni
P. Lumukutan	Lumukutan	1.235	Berpenghuni
	Randayan	27	Berpenghuni

*Sumber: BPS Kab. Bengkayang, 2014*

Berdasarkan deskripsi kondisi geografis Kabupaten Bengkayang di atas, maka potensi yang dimiliki Kabupaten Bengkayang sangat besar terutama yang berkaitan pada pengembangan sektor agroforestry (pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan) dan sektor pariwisata.

## **2. Kondisi Demografi**

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bengkayang, jumlah penduduk pada tahun 2013 adalah 228.771 jiwa yang tersebar pada 17 Kecamatan. Jumlah tersebut terbagi atas 118.501 jiwa penduduk laki-laki dan 110.270 jiwa penduduk perempuan, dengan rasio perbandingan penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan yaitu dengan angka rasio sebesar 107. Adapun secara lengkap informasi mengenai jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3**

**Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Kecamatan, Jenis Kelamin, dan Rasio Tahun 2013**

No.	Kecamatan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total (Jiwa)	Rasio
1	2	3	4	5	6
1	Sungai Raya	9.335	9.316	18.651	100
2	Capkala	4.189	3.818	8.007	110
3	Sungai Raya Kepulauan	11.000	10.655	21.655	103
4	Samalantan	10.380	9.516	19.896	109
5	Monterado	13.241	12.303	25.544	108
6	Lembah Bawang	3.022	2.639	5.661	115
7	Bengkayang	13.787	13.368	27.155	103
8	Teriak	6.875	6.372	13.247	108
9	Sungai Betung	4.966	4.422	9.388	112
10	Ledo	5.633	5.206	10.839	108
11	Suti Semarang	2.497	2.281	4.778	109
12	Lumar	3.140	2.917	6.057	108
13	Sanggau Ledo	6.029	5.728	11.757	105
14	Tujuh Belas	6.086	5.599	11.685	109
15	Seluas	10.071	8.969	19.040	112
16	Jagoi Babang	4.999	4.110	9.109	122
17	Siding	3.251	3.051	6.302	107
<b>Jumlah</b>		<b>118.501</b>	<b>110.270</b>	<b>228.771</b>	<b>107</b>

*Sumber: BPS Bengkayang, 2014*

Kecamatan Bengkayang merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi yaitu sebanyak 27.155 Jiwa, sedangkan daerah yang memiliki penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Suti Semarang yaitu hanya sebanyak 4.778 Jiwa. Meskipun Kecamatan Bengkayang memiliki jumlah penduduk terbanyak tetapi yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Sungai Raya yaitu mencapai 246 Jiwa per Km<sup>2</sup>. Hal ini menjelaskan bahwa Kecamatan Sungai Raya memiliki luasan yang relatif kecil, sehingga dengan jumlah penduduk yang tidak begitu besar telah berpengaruh yang signifikan pada kepadatan penduduk.

Terdapat 4 Kecamatan yang memiliki peluang menjadi daerah yang padat penduduknya jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk yang merupakan hasil dari sensus penduduk periode 2000-2010, yaitu Kecamatan Bengkayang, Samalantan, Seluas, dan Jagoi Babang. Empat Kecamatan

tersebut memiliki tingkat laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dibandingkan 13 kecamatan lainnya, yaitu mencapai 3%. Kecamatan Bengkayang adalah daerah yang memiliki laju pertumbuhan penduduk paling tinggi, yaitu mencapai 4,56%, hal ini wajar mengingat kecamatan tersebut merupakan ibu kota dan pusat perekonomian Kabupaten Bengkayang. Deskripsi secara jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini.

**Tabel 2.4**

Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2013

No.	Kecamatan	Laju Pertumbuhan 2000-2010 (%)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa per Km <sup>2</sup> )
1	2	3	4	5
1	Sungai Raya	0,69	75,85	246
2	Capkala	1,93	46,35	173
3	Sungai Raya Kepulauan	1,25	394,00	55
4	Samalantan	3,00	420,50	47
5	Monterado	1,56	291,00	88
6	Lembah Bawang	2,99	188,00	30
7	Bengkayang	4,56	167,04	163
8	Teriak	2,13	231,51	57
9	Sungai Betung	1,181	205,95	46
10	Ledo	-0,57	481,75	22
11	Suti Semarang	1,53	280,84	17
12	Lumar	1,75	275,21	22
13	Sanggau Ledo	1,73	392,50	30
14	Tujuh Belas	1,47	221,00	53
15	Seluas	3,79	506,50	38
16	Jagoi Babang	3,31	655,00	14
17	Siding	0,39	563,30	11
<b>Jumlah</b>		<b>2,01</b>	<b>5.396,30</b>	<b>42</b>

Sumber: BPS Bengkayang, 2014

### 3. Potensi Daerah

#### a. Potensi Pertanian

Potensi pertanian Kabupaten Bengkayang sangat bervariasi dan tersebar pada seluruh kecamatan. Sektor pertanian tidak saja

merupakan memiliki potensi yang paling besar tetapi juga merupakan sektor yang menjadi andalan bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Bengkayang sebagai mata pencarian utama. Dengan demikian pengembangan sektor pertanian merupakan hal yang sangat esensi dalam peningkatan perekonomian daerah secara keseluruhan. Adapun hal yang sangat berperan adalah ketersediaan lahan yang cukup besar dalam mengembangkan sektor pertanian, terutama pada beberapa kecamatan yang memiliki jenis tanah yang tergolong sangat subur, diantaranya adalah yang tersebar pada kecamatan Ledo, Sanggau Ledo, Seluas, dan Kecamatan Tujuh Belas.

Komoditas unggulan Kabupaten Bengkayang didominasi oleh beberapa tanaman semusim jenis seperti Jagung, Padi, Ubi Kayu, dan beberapa jenis tanaman hortikultura (sayur-sayuran) yang tersebar pada hampir semua kecamatan. Berkaitan dengan pemasaran produk sektor pertanian, meskipun masih pada tahap pasar tradisional namun permintaan pada pasar yang terdapat di wilayah perbatasan (Negara Malaysia) sangat tinggi dan hal ini merupakan peluang besar dalam pengelolaan pemasaran produk pertanian di masa yang akan datang. Khusus untuk komoditas Jagung, Kecamatan Sanggau Ledo dan Tujuh Belas merupakan dua daerah yang memproduksi paling besar komoditas tersebut, bahkan untuk regional Kalimantan Kabupaten Bengkayang merupakan daerah terbesar menghasilkan komoditas jagung, yang arahnya menjadi bahan baku dalam memproduksi pakan ternak.

b. Potensi Peternakan

Potensi pengembangan peternakan di wilayah Kabupaten Bengkayang sangat besar mengingat lokasi yang tersedia cukup besar. Ketersediaan dan penyediaan habitat untuk penanaman pakan ternak juga memiliki potensi yang cukup besar serta kesesuaian iklim yang tidak bermasalah untuk syarat hidup dari beberapa jenis ternak yang akan dikembangkan. Hal-hal negatif berkaitan dengan serangan penyakit ternak yang berpengaruh pada produksi dan pemasaran juga belum terjadi di wilayah Kabupaten Bengkayang. Kondisi ini tentu saja merupakan keunggulan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkayang untuk berpeluang dalam mengembangkan sektor

peternakan baik pada bentuk usahatani maupun dalam bentuk investasi.

c. Potensi Perkebunan

Sebagian besar dari PDRB bidang pertanian secara umum di Kabupaten Bengkayang adalah berasal dari perkebunan. Dengan ketersediaan lahan yang cukup luas yang belum dimanfaatkan peluang pengembangan untuk sektor perkebunan masih sangat terbuka lebar. Sampai saat ini perkebunan yang menjadi primadona di Kabupaten Bengkayang adalah komoditas Kelapa Sawir baik dalam bentuk usaha rakyat maupun perkebunan skala besar yang dikelola oleh investor melalui Hak Guna Usaha (HGU).

Selain kelapa sawit, komoditas perkebunan yang berpeluang besar dalam pengembangan melalui ekstensifikasi maupun pembudidayaan yang intensif adalah lada, kakao, dan karet. Ketiga komoditas tersebut merupakan komoditas unggulan yang mampu berperan dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bengkayang. Berdasarkan kondisi tersebut peranan kelembagaan baik Pemerintah maupun non Pemerintah sangat penting dalam usaha pendampingan untuk mengoptimalkan dalam pengelolaan usahatani yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang melalui sektor perkebunan.

d. Potensi Kehutanan

Potensi kehutanan Kabupaten Bengkayang masih sangat besar mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkayang masih tertutupi oleh kawasan hutan, baik yang masih primer maupun yang sekunder. Namun demikian potensi tersebut tentunya tidak mengarah pada pemanfaatan hasil hutan kayu mengingat adanya pertimbangan kelestarian hutan dan alam. Potensi hutan tidak hanya dilihat dari hasil yang berasal dari kayu saja tetapi banyak hasil hutan nonkayu dan atau hasil yang secara tidak langsung dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bengkayang pada khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya. Terdapat dua kawasan hutan yang besar dan memiliki status taman nasional dan hutan lindung, yaitu kawasan

hutan Gunung Bawang dan Gunung Niut yang masing-masing terdapat di Kecamatan Lembah Bawang dan Kecamatan Tujuh Belas.

Fungsi hutan sebagai kawasan penyangga tentunya perlu dilestarikan yang manfaatnya tidak saja menjaga kondisi alam tetapi juga memberikan manfaat secara tidak langsung yang sangat besar, yaitu menciptakan sumber air bersih yang berlimpah dan terciptanya potensi wisata alam yang sangat menjanjikan jika dalam pengelolaannya dapat dilakukan secara optimal. Manfaat lain yang diperoleh dari potensi hutan yang besar adalah tersedianya beberapa hasil hutan non kayu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat bahkan dikelola untuk diproduksi pada skala besar dan industri, antara lain hasil rotan, kulit kayu, tanaman obat-obatan, dan spesies lain yang cukup banyak kegunaannya. Tentunya hal ini akan tercipta jika pengelolaan yang baik selalu diimbangi dengan kegiatan kajian dan penelitian yang fokus agar terciptanya pemanfaatan potensi hutan yang lestari dan berkelanjutan.

e. Potensi Perikanan

Potensi perikanan di Kabupaten Bengkayang cukup besar terutama di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan yang merupakan wilayah pesisir Kabupaten Bengkayang. Potensi perikanan laut baik berupa tangkapan maupun tambak cukup menjanjikan sepanjang tahun dari dua wilayah tersebut. Namun demikian di kecamatan lainnya juga memiliki potensi perikanan darat yang cukup menjanjikan mengingat semua wilayah kecamatan di Kabupaten Bengkayang dilewati oleh (Daerah Aliran Sungai) DAS besar dan kecil yang merupakan indikasi peluang pengembangan sektor perikanan darat (ikan air tawar) dengan cara tambak ikan.

f. Potensi Perindustrian

Potensi agroforestry yang sangat menjanjikan tentunya memberikan peluang juga pada pengembangan sektor industri. Hal ini wajar mengingat ketersediaan bahan baku yang memiliki potensi dalam pengembangannya dan biaya produksi yang relatif kecil sebagai akibat dari efisiensi pembiayaan dari faktor transportasi tentunya menjadi pertimbangan yang positif untuk pengembangan pada sektor



industri, terutama yang menggunakan bahan baku dari komoditas pertanian secara umum.

Fasilitasi dan pengembangan sumberdaya manusia sebagai aktor utama dari pelaku sektor industri tentunya menjadi faktor utama yang perlu dipersiapkan, karena lambannya kegiatan industri di Kabupaten Bengkayang disebabkan oleh faktor industri yang berasal dari tenaga kerja, yaitu pengetahuan manajemen dan tingkat keahlian pada suatu produk industri. Secara ekonomi makro menjelaskan bahwa perkembangan sektor industri akan mempercepat perkembangan ekonomi suatu daerah jika dibandingkan eksploitasi sumberdaya alam, karena nilai tambah yang diperoleh dari industri yang merupakan kegiatan *off farm* relatif lebih tinggi dibandingkan kegiatan produksi lapangan dari segala sektor yang merupakan kegiatan *on farm*.

g. Potensi Pertambangan

Kegiatan sektor pertambangan di Kabupaten Bengkayang sebagian besar masih dilakukan secara tradisional oleh masyarakat. Namun demikian hal ini menjadi indikator bahwa pertambangan merupakan sektor yang cukup berpotensi di Kabupaten Bengkayang. Hampir seluruh Kabupaten Bengkayang memiliki potensi bahan tambang emas yang tersebar di berbagai daerah, namun hanya sedikit perusahaan dan investor yang aktif dalam usaha pertambangan tersebut. Bahan tambang lainnya yang memiliki potensi besar di Kabupaten Bengkayang antara lain adalah Kaolin dan Mangan, disamping beberapa jenis bahan tambang lainnya yang tidak terlalu berpotensi sesuai data geologi dan BPS Kabupaten Bengkayang.

h. Potensi Pariwisata

Sebagai wilayah yang cukup besar memiliki kawasan hutan dan garis pantai yang cukup panjang, Kabupaten Bengkayang memiliki potensi sektor pariwisata yang sangat menjanjikan terutama untuk wisata alam (Ecotourism). Kawasan gunung, air terjun, pantai, dan hutan primer yang menjadi pusat untuk wisata dan penelitian merupakan aset besar yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkayang. Namun demikian investasi yang diperlukan akan sangat besar untuk menjadikan potensi tersebut berguna bagi kesejahteraan masyarakat

dan bersifat ekonomis bagi daerah. Untuk itu diperlukan perencanaan yang terpadu, manajemen pengelolaan yang optimal, penyediaan fasilitas (terutama sarana transportasi) serta investasi yang cukup besar untuk menjadikan potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dengan tetap memperhatikan asas kelestarian dan sustainability.

## 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 1. Kesejahteraan dan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu prioritas untuk menangani berbagai isu yang berkembang tentang tingkat kesejahteraan dan kemajuan pada perekonomian masyarakat. Pembangunan di Kabupaten Bengkayang pada Tahap Kedua RPJPD menuntut perhatian dan akselerasi yang optimal untuk menyelesaikan permasalahan yang belum selesai dan merancang kesiapan daerah dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Pada umumnya penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

#### a. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Secara umum kondisi makro ekonomi Kabupaten Bengkayang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini merupakan efek dari kondisi fundamental makro yang mendukung, antara lain stabilitas politik dan demokrasi, dukungan dari dunia usaha, dan keyakinan pada kinerja perekonomian nasional yang terus membaik sampai pada saat ini. Perkembangan sektor ekonomi berdampak langsung pada peningkatan PDRB dan perkapita yang pada hakikatnya menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat. Salah satu indikator kemajuan ekonomi adalah perekonomian yang outputnya sebagian besar merupakan komoditas olahan.

**Tabel 2.5**

Makro Perekonomian Kabupaten Bengkayang Tahun 2011-2013

No.	Parameter	Satuan	2011	2012	2013
1.	PDRB ADHB	Juta Rupiah	2.642.559,66	2.958.540,74	3.343.768,92

2.	PDRB ADHK	Juta Rupiah	1.232.061,70	1.302.743,89	1.381.375,85
3.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,65	5,74	6,04

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, 2014

Semakin besar besar produk olahan dari suatu daerah maka semakin besar nilai tambah yang diperoleh masyarakat lokal. Namun trend perekonomian seperti ini belum terjadi pada Kabupaten Bengkayang, meskipun terjadi trend yang positif pada PDRB secara keseluruhan pada setiap tahunnya namun perubahan proporsional pada setiap sektor pembangunan masih terjadi peningkatan pada sektor sekunder dan tersier yang belum signifikan. Hal ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Bengkayang masih belum pada kondisi yang optimal dan efisien karena belum terjadi perkembangan pada pemanfaatan produksi komoditas yang memiliki nilai tambah lebih besar dan masih mengandalkan produksi bahan baku yang memiliki nilai tambah kecil.

Dengan meningkatnya PDRB Kabupaten Bengkayang sampai kurun waktu 2013, hal ini menjelaskan bahwa fundamental perekonomian Kabupaten Bengkayang cukup Baik. Namun perlu ada perbaikan ke depan untuk meningkatkan kontribusi PDRB Kabupaten Bengkayang yang berasal dari komoditas olahan yang merupakan hasil dari sektor olahan sekunder dan tersier. Perekonomian masyarakat Bengkayang akan berkembang pesat jika sektor sekunder dan tersier lebih dominan dibandingkan sektor primer.

**Tabel 2.6**

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011-2013 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bengkayang

Sektor Ekonomi	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
<b>Sektor Primer</b>	<b>49,24</b>	<b>48,69</b>	<b>48,26</b>
1. Pertanian	47,58	47,02	46,59
2. Pertambangan & Penggalian	1,66	1,67	1,67
<b>Sektor Sekunder</b>	<b>11,73</b>	<b>12,07</b>	<b>12,34</b>
3. Industri Pengolahan	3,94	3,78	3,66
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,13	0,12	0,12
5. Bangunan	7,66	8,17	8,56
<b>Sektor Tersier</b>	<b>39,03</b>	<b>39,25</b>	<b>39,40</b>

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	24,74	24,55	24,59
7. Pengangkutan dan Komunikasi	2,80	2,80	2,80
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	4,10	4,16	4,24
9. Jasa-jasa	7,39	7,74	7,77

#### b. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran Perkapita merupakan salah satu parameter standar hidup layak sekaligus salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditinjau dari besar kecilnya pengeluaran masyarakat. Kabupaten Bengkayang memiliki rata-rata pengeluaran Perkapita dalam sebulan yang memiliki trend positif sejak tahun 2011 sampai dengan 2013. Hal ini menunjukkan peningkatan pada daya beli masyarakat. Namun demikian jika dilihat dari proporsi pengeluaran yang dilakukan, pengeluaran yang dialokasikan untuk makanan relatif lebih besar daripada yang dikeluarkan untuk non makanan.

Meskipun selama tiga tahun terakhir proporsi pengeluaran perkapita Kabupaten Bengkayang lebih besar pada kelompok barang makanan, tetapi ada suatu fenomena yang menarik yaitu adanya trend positif yang cukup signifikan terjadi pada peningkatan proporsi pengeluaran masyarakat Kabupaten Bengkayang pada kelompok barang non makanan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

**Tabel 2.7**

Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan di Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2011-2013

Kelompok Barang	2011 (Rp)		2012 (Rp)		2013 (Rp)	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Makanan	393.539	59,46	354.705	54,13	396.665	56,73
Non Makanan	268.261	40,54	300.615	45,87	302.541	43,27

*Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang 2014*

### c. Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi ekonomi yang berkaitan dengan mekanisme pasar dimana terjadi peningkatan pada harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Tingkat inflasi yang fluktuatif dan berubah sangat signifikan tentunya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat karena akan berefek pada kemampuan daya beli masyarakat. Tingkat inflasi Kabupaten Bengkayang relatif stabil dan tidak berbeda nyata dari tahun ke tahun dengan rata-rata sebesar 8,25 point dan kondisi ini relatif lebih rendah dari tingkat inflasi nasional yang berkisar pada angka 9,53 poin.

Berdasarkan kondisi tersebut perekonomian Kabupaten Bengkayang cukup baik dan kemampuan daya beli masyarakat tidak begitu berpengaruh oleh mekanisme yang terjadi pada pasar tingkat nasional. Fenomena ini diduga terjadi akibat kekuatan ekonomi rumah tangga sebagian besar masyarakat Kabupaten Bengkayang tergantung pada agroforestry yang memang memiliki potensi sumberdaya alamnya masih mampu mengimbangi perubahan-perubahan harga barang dan jasa non makanan yang terus meningkat.

## **2. Kesejahteraan Sosial Budaya**

### a. Kemiskinan

kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling berkaitan, antara lain: ntingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses pada barang dan jasa, lokasi geografis, kesetaraan gender, dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak hanya dipahami terbatas pada keterbatasan ekonomi tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan yang bermartabat.

Kompleksitas masalah kemiskinan tidak mampu terjawab oleh kebijakan atau program pembangunan yang bersifat sektoral dan atau parsial, tetapi diperlukan pengambilan keputusan yang bersifat holistik, simultan, dan ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya meski dengan keterbatasan sumberdaya. Kajian dan perencanaan yang tepat diperlukan untuk mengidentifikasi isu sentral dan permasalahan yang mendasar

meskipun pada akhirnya tidak juga dapat menghindar dari beberapa pendekatan sektoral sebagai implikasi dari kondisi yang memang pada awalnya terdapat kesenjangan atau ketidakmerataan pada kondisi sosial.

Permasalahan kemiskinan erat korelasinya dengan pendiptaan lapangan kerja, untuk itu dalam mengentas kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia, pemberdayaan potensi daerah dan lingkungan. Tentunya implementasi akan disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin secara parsial yang berimplikasi pada perbedaan program pembangunan.

Pemerintah Indonesia merupakan salah satu Negara yang menandatangani komitmen dunia sebagai amat Millenium Development Goals (MDGs) untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan. Adapun delapan (8) buah sasaran pembangunan millenium tersebut adalah: 1) pengentasan kesmiskinan dan kelaparan yang ekstrim; 2) pemerataan pendidikan dasar; 3) mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan; 4) mengurangi tingkat kematian anak; 5) meningkatkan kesehatan ibu; 6) perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; 7) menjamin daya dukung lingkungan hidup; dan 8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Hal ini sejalan dengan arahan RPJM Provinsi Kalimantan Barat dan nasional yang menitikberatkan pada permasalahan kemiskinan dan pengangguran sebagai urusan bersama yang menjadi sangat prioritas.

Tingkat pengangguran Kabupaten Bengkayang pada tahun 2012 sebesar 3,30% dan pada tahun 2013 sebesar 3,74% dengan demikian angka pengangguran mengalami peningkatan sebesar 0,44% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan usaha dan peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier di Kabupaten Bengkayang mengalami penurunan. Terlepas dari hal tersebut keterbatasan penyediaan lapangan kerja di Kabupaten Bengkayang sangat mempengaruhi tingkat pengangguran, hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Pada tahun 2012 jumlah pencari kerja di Kabupaten Bengkayang sebanyak 434 orang dan di tahun 2013 sebanyak 2.053 orang, angka tersebut menunjukan besarnya peluang tingkat pengangguran yang

disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Bengkayang sehingga angka pengangguran meningkat. Hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan dan inflasi di Kabupaten Bengkayang.

Program penurunan angka kemiskinan Kabupaten Bengkayang menunjukkan hasil yang cukup baik yaitu dari 7,25% pada tahun 2011 turun menjadi 6,74% pada tahun 2012, namun pada tahun 2013 angka kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 8,01% atau naik sebesar 1,33%. Angka tersebut masih dibawah angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasioanl pada tahun 2013 yaitu masing-masing pada angka dan 11,37%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkayang sangat dipengaruhi oleh tingkat pengangguran dan pendapatan masyarakat sehingga daya beli masyarakat yang rendah.

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu indikator penting yang digunakan dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi pembangunan, sekaligus mengakomodir salah satu sasaran yang tercatat dalam komitmen MGDs. Nilai IPM menjadi indikator penting mengingingat di dalamnya mencakup 3 bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar, yaitu angka harapan hidup, pengetahuan dan hidup layak. Angka ini mendeskripsikan pembangunan manusia Kabupaten Bengkayang dari kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan), maupun non-fisik (kemampuan intelektual). Peningkatan pada IPM pada prinsipnya merupakan perubahan pola pikir manusia untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan); mengutamakan kemampuan intelektual (bidang pendidikan); dan mengarah pada kemampuan bersaing dalam hal ekonomi (bidang ekonomi). Berikut adalah gambaran IPM Kabupaten Bengkayang selama 5 Tahun terakhir.

**Tabel 2.8**

Gambaran IPM Kabupaten Bengkayang Tahun 2009-2013

<b>Variabel/Komponen</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Angka Harapan Hidup (Thn)	68,70	68,84	68,97	69,11	69,61
Angka Melek Huruf (%)	88,70	88,71	88,72	89,56	91,42

Rata-rata Lama Sekolah (Thn)	6,09	6,32	6,50	6,54	6,55
Pengeluaran Perkapita	602,47	604,11	606,88	609,85	612,23
<b>IPM</b>	<b>67,18</b>	<b>67,55</b>	<b>67,98</b>	<b>68,50</b>	<b>69,38</b>

*Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, 2014*

IPM Kabupaten Bengkayang menunjukkan progres yang cukup baik dalam 5 tahun terakhir karena secara konsisten terus mengalami peningkatan dan berada pada posisi ke 10 dari 14 Kabupaten/Kota. Namun angka tersebut relatif lebih rendah dibandingkan IPM Provinsi Kalimantan Barat yang mencapai angka 70,31 pada tahun 2013. Hal ini menjelaskan bahwa perlu adanya kajian dan identifikasi yang optimal dalam membuat suatu perencanaan yang tepat untuk mengungkit beberapa komponen pembentuk IPM yang cukup strategis untuk ditingkatkan.

Dari empat komponen pembentuk IPM angka melek huruf, lama sekolah dan pengeluaran perkapita merupakan komponen yang berpotensi dapat dioptimalkan mengingat angka tersebut masih relatif rendah dan peluang untuk ditingkatkan masih sangat besar terutama pada komponen Pengeluaran Perkapita. Namun komponen Angka harapan hidup yang cukup tinggi tetap perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan untuk menjaga kesejahteraan bidang kesehatan masyarakat Bengkayang. Pada Tahun 2013 pengeluaran perkapita Kabupaten Bengkayang (Rp. 612.230) merupakan angka yang paling kecil secara relatif dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat dan IPM tingkat provinsi yang mencapai angka Rp. 641.410, untuk itu perlu adanya kebijakan terpadu yang mampu mengangkat ketertinggalan tersebut yang selanjutnya akan berimplikasi pada peningkatan IPM Kabupaten Bengkayang yang cukup signifikan melalui komponen IPM tersebut.

### **2.1.3 Aspek Pelayanan Umum**

#### **1. Pendidikan**

Dalam pembukaan UUD 1945 salah satu tujuan berbangsa dan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan hal itu hanya bisa dicapai melalui pembangunan bidang pendidikan. Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional yang secara otomatis hal tersebut juga merupakan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian



pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan hal ini menjadi kewajiban Pemerintah mengingat pendidikan merupakan salah satu pintu masuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan, konsekuensi dari komitmen tersebut, maka setiap warga negara berhak atas pendidikan tanpa mengenal latar belakang untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu setidaknya 9 Tahun. Untuk itu pembangunan pendidikan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Untuk mendukung program pendidikan dasar 9 Tahun tersebut strategi yang dilaksanakan adalah pengembangan sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang terutama di daerah yang terpencil dan terisolasi. Pada tahun 2013 di Kabupaten Bengkayang telah tersedia 29 TK, 251 SD, 8 MI, 69 SLTP, 6 MTs, 27 SLTA, 3 Aliyah, dan 6 SMK yang tersebar di 17 Kecamatan.

Jumlah murid SD di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2013 adalah sebanyak 37.395 siswa dengan jumlah guru sebanyak 2.384 orang sedangkan jumlah murid MI sebanyak 557 siswa dengan jumlah guru sebanyak 61 orang. Untuk tingkat lanjutan pertama terdapat 11.368 siswa SLTP dengan 831 orang guru, 415 siswa MTs dengan 70 orang guru, untuk jumlah murid SMA 5.951 siswa dengan 451 orang guru, pendidikan Madrasah Aliyah jumlah murid 262 siswa dengan jumlah guru 35 guru dan terdapat 982 murid dengan 68 orang guru.

Rasio murid dan guru SD sederajat di Kabupaten Bengkayang adalah sebesar 16 orang per guru. Pada tingkat MI dan SLTP, rasio guru dan murid adalah sebesar 9 orang per guru untuk MI dan 14 orang per guru. Untuk tingkat pendidikan menengah atas, rasio murid dan guru pada pendidikan SMA sebesar 13 orang per guru, tingkat madrasah Aliyah sebesar 7 orang per guru dan SMK sebesar 14 orang per guru. Meskipun terjadi perbedaan antara rasio jumlah guru dan murid baik pada tingkat SD sampai dengan SMA untuk sekolah negeri dan swasta, namun secara umum ketersediaan guru terhadap jumlah murid di Kabupaten Bengkayang cukup memadai.

## 2. Kesehatan

Keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya adalah terciptanya masyarakat yang sehat baik fisik maupun mental. Selama ini apresiasi masyarakat terhadap kesehatan masih relatif rendah terutama bagi keluarga-keluarga miskin. Terjadinya kematian yang disebabkan oleh penyakit menular, faktor sanitasi, dan faktor ketidaktahuan masyarakat dalam menyikapi kesehatan harusnya menjadi perhatian utama semua pihak khususnya Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Perkembangan kondisi kesehatan di Kabupaten Bengkayang ditunjukkan oleh beberapa indikator diantaranya adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKBA) sebagaimana tercantum dalam MDGs. Dika disederhanakan maka faktor-faktor yang cukup besar peranannya dalam mempengaruhi AKB adalah status gizi, perawatan, kesehatan ketika dalam kandungan maupu ketika baru lahir, kelengkapan imunisasi yang diberikan, dan pertolongan persalinan pertama. Tingkat AKB dan AKBA di Kabupaten Bengkayang terbilang masih tinggi, yaitu masing-masing mencapai angka 58 dan 94. Kondisi ini disebabkan oleh program kesehatan yang masih bersifat parsial dan kurang berkelanjutan serta faktor kemiskinan dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.

Indikator kesehatan lainnya yang sangat penting dan sesuai dengan sasaran MGDs adalah yang berkaitan dengan penyakit menular diantaranya: Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), malaria, TBC, dan HIV/AIDS. Berdasarkan data tahun 2009 angka kesakitan malaria di Kabupaten Bengkayang adalah 48,8 per 100 penduduk, penderita TBC sebese 198 per 100.000 penduduk, dan jumlah kasus penderita HIV/AIDS sebanyak 16 orang.

Meskipun pelayanan kesehatan masih terbatas, namun secara konsisten Pemerintah Kabupaten Bengkayang selalu mengadakan program pembangunan untuk meningkatkan bidang kesehatan. Hal ini diwujudkan dalam bentuk menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumberdaya yang memadai seperti rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan, dan ketersediaan dokter.

Pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah PNS bidang kesehatan baik struktural maupun fungsional (tenaga Dokter 18 Orang, tenaga Perawat 194 orang dan tenaga Bidan 159 orang) yang tersebar di Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmasdes, dan Posyandu. Sarana Kesehatan di Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2012 yang tersebar di Seluruh Kecamatan antara lain 2 Rumah Sakit Umum, 17 Puskesmas, 71 Puskesmas Pembantu, dan 15 Puskesmas Keliling.

### **3. Kependudukan dan Catatan Sipil**

Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah dan gratis untuk rakyat diwujudkan dalam pengurusan kartu tanda penduduk, akte, pengurusan pajak, dan izin-izin usaha. Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyederhanaan prosedur, kepastian tarif, kecepatan pelayanan dengan melakukan modernisasi dan penerapan sistem teknologi berbasis elektronik serta perizinan terpadu.

Selanjutnya guna memantapkan kinerja organisasi sebagai daya dukung kinerja pemerintahan, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) meskipun masih dalam tahap penyempurnaan, dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Salah satunya melalui pengembangan sekaligus pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya sebagian besar berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti tenaga kesehatan, tenaga kependidikan, dan jabatan fungsional lainnya.

Standar pelayanan yang telah diterapkan serta dukungan sistem kerja berbasis elektronik telah memperlancar pelaksanaan pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang sampai pada tahun 2013 tetap berjalan. Sampai pada akhir tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah yang signifikan pada keluarga yang telah memiliki Kartu Keluarga (KK), dan diharapkan pada tahun 2013-2015 sebagian besar Keluarga di Kabupaten Bengkayang telah memiliki e-KTP dan KK mengingat proses pembuatan hal yang berkaitan dengan identitas kependudukan telah di gratiskan oleh Pemerintah.

#### 4. Investasi

Iklim investasi sangat ditentukan oleh faktor keamanan dan ketertiban disamping potensi daerah dan informasi yang dipublikasi dengan baik. Kasus kejahatan dan kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Bengkayang terus meningkat dari tahun ke tahun namun demikian tidak pada tahap yang berpengaruh pada peluang iklim investasi karena kasus yang terjadi sebagian besar hanya kasus kecil. Sedangkan kasus gerakan massa atau demonstrasi, pemogokan kerja, kasus politik, dan kasus ekonomi dapat dikatakan tidak berpengaruh pada perekonomian daerah. Hal lain yang mendukung terjaminnya keamanan wilayah Kabupaten Bengkayang adalah dengan terlibat aktif dan dukungan dari banyak institusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban termasuk keamanan berinvestasi, di antaranya keterlibatan dan dukungan dari TNI AD, TNI AU, dan Kepolisian.

Sampai tahun 2013 investasi di Kabupaten Bengkayang masih didominasi oleh sektor primer, yaitu perkebunan skala besar dan pertambangan. Kedua jenis investasi tersebut terus berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas, hal ini wajar mengingat potensi Kabupaten Bengkayang sangat besar untuk jenis investasi tersebut. Namun demikian perlu adanya kajian dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan jenis investasi yang masuk ke Kabupaten Bengkayang mengingat kedua investasi tersebut sangat rawan dengan permasalahan lingkungan hidup dan memiliki nilai tambah yang kecil jika dibandingkan investasi pada sektor sekunder atau tersier. Untuk itu fasilitasi dari pemerintah daerah dalam bentuk penelitian, pengolahan data dan informasi, dan publikasi yang berkualitas sangat diperlukan agar mampu mengundang investor dengan memberikan peluang dan potensi investasi pada sektor sekunder dan tersier. Pada akhirnya pembangunan infrastruktur dan peluang lapangan kerja serta peluang peningkatan taraf hidup masyarakat Bengkayang akan terbuka lebar.

Investasi erat kaitannya dengan pemasaran produk hasil produksi, baik skala regional, nasional, maupun internasional. Sebagai salah satu kabupaten yang memiliki wilayah perbatasan darat dengan negara lain (Malaysia), Kabupaten Bengkayang tentunya memiliki peluang investasi bagi banyak investor jika dan hanya jika ada kebijakan yang tepat dalam pengelolaan perdagangan di wilayah perbatasan. Namun perlu menjadi

bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan yaitu sebesar 69,30% dan 30,70% bekerja di sektor industri, perdagangan, rumah makan, jasa akomodasi, jasa kemasyarakatan, sosial, perorangan dan sektor lainnya. Hal ini wajar mengingat sektor yang dominan berkembang di Kabupaten Bengkayang adalah sektor primer yang bergerak pada bidang agrikultur dan pertambangan, sedangkan sektor sekunder dan tersier masih sangat kecil. Selanjutnya dilihat dari status pekerjaan, sebagian besar penduduk Kabupaten Bengkayang yang berusia 15 Tahun ke atas yang bekerja adalah berstatus bekerja tidak dibayar, berusaha sendiri, buruh/karyawan, pegawai, dan berusaha dibantu buruh tidak tetap.

Jumlah pencari kerja yang tercatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang pada tahun 2013 adalah sebanyak 2.053 orang, yang terdiri dari 796 laki-laki dan 1.257 perempuan. Hal ini meningkat dari tahun 2012 adalah sebanyak 434 orang, yang terdiri dari 226 laki-laki dan 208 perempuan. Jumlah pencari kerja terbanyak dari jumlah tersebut adalah berasal dari Kecamatan Bengkayang. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, pencari kerja tersebut didominasi oleh lulusan SLTA.

## **7. Pertanian**

Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Bengkayang sangat besar baik dikembangkan secara intensifikasi, ekstensifikasi, maupun diversifikasi. Potensi tersebut tersebar pada hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang. Lahan yang masih sangat luas dan belum dikelola secara optimal dan iklim yang mendukung untuk berbagai jenis tanaman yang produktif merupakan sumberdaya yang cukup sebagai modal dasar dalam mendukung perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkayang yang sebagian besar mengandalkan pertanian sebagai sumber penghasilan utama dalam keluarga.

Komoditas unggulan sektor pertanian Kabupaten Bengkayang cukup bervariasi yang meliputi tanaman pangan (padi, jagung, hortikultura, ubi kayu, dan kacang tanah); perkebunan (karet, sawit, lada, dan kakao); kehutanan (hasil hutan non kayu: rotan dan kayu gaharu buaya); dan perikanan (laut dan darat). Komoditas tersebut telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat Bengkayang. Dengan pengembangan yang intensif disertai dengan dukungan inovasi secara

teknologi maka diharapkan terjadi peningkatan produktivitas tidak hanya pada sektor primer tetapi menciptakan produksi pada sektor sekunder berupa industri pangan yang tentunya akan meningkatkan nilai tambah yang diperoleh masyarakat (petani/nelayan).

Pada tahun 2013 produksi tanaman pangan Kabupaten Bengkayang beberapa komoditas mengalami penurunan dan peningkatan yang meliputi produksi padi sebesar 98.461 Ton menurun dari tahun 2012 dengan jumlah produksi padi sebesar 104.366 Ton, produksi jagung sebesar 123.613 Ton mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan jumlah produksi sebesar 124.621 Ton, ubi kayu sebesar 34.427 Ton mengalami peningkatan yang produksi sebelumnya 28.984 Ton, dan kacang tanah 346,87 Ton naik dari tahun 2012 dengan produksi 341,92 Ton. Sedangkan untuk tanaman hortikultura (tanaman sayuran) didominasi oleh tanaman ketimun yang mencapai 14.094 Ton dan tanaman terong dengan angka produksi 11.733 Ton.

Produksi tanaman perkebunan terbesar Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2013 adalah tanaman sawit yaitu sebesar 38.539 Ton, yang diikuti oleh tanaman karet yang mencapai 23.748 Ton. Sedangkan tanaman kelapa dalam/coconut dan lada masing-masing mencapai angka produksi sebesar 2.715 Ton dan 1.409 Ton. Tanaman sawit sebagian besar merupakan hasil dari perusahaan swasta sedangkan tanaman karet, kelapa dalam dan lada hampir semuanya berasal dari usaha tani masyarakat.

Untuk hasil dari kehutanan di Kabupaten Bengkayang didominasi oleh dua komoditas yaitu kayu rakyat dan gaharu buaya. Pada tahun 2013 produksi kayu rakyat mencapai 10 m<sup>3</sup> dan kayu gaharu yang diproduksi adalah sebesar 4 Ton.

Sektor perikanan Kabupaten Bengkayang pada tahun 2013 menghasilkan 3 jenis komoditas baik dari perikanan laut maupun darat, yaitu hasil tangkapan laut, tangkapan perairan umum dan budidaya kolam. Adapun produksi untuk masing-masing komoditas meliputi tangkapan laut sebesar 1.297,1 Ton, tangkapan perairan umum sebesar 548,6 Ton dan hasil budidaya kolam sebesar 1.061,72 Ton.

Potensi pertanian secara umum yang tersebut di atas menjelaskan bahwa sumberdaya alam Kabupaten Bengkayang sangat besar. Pengelolaan yang tepat dan berorientasi pada peningkatan sektor primer menjadi produksi sektor sekunder tentunya akan memberikan nilai tambah yang besar bagi masyarakat di Kabupaten Bengkayang. Untuk itu iklim investasi dan diversifikasi produk pertanian yang disertai dengan kajian dan ilmu teknologi merupakan hal yang esensi dalam membangun sektor pertanian di Kabupaten Bengkayang.

## **8. Industri**

Industri merupakan sektor yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Bengkayang, karena disamping memiliki multiple effect pada perekonomian sektor industri juga memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar daripada nilai tambah dari pembangunan sektor primer. Sektor industri di Kabupaten Bengkayang sebagian besar adalah industri rumah tangga, kecil, dan menengah. Untuk itu sektor ini perlu dipacu mengingat kemampuannya dalam mempertahankan perekonomian masyarakat sekaligus mampu bertahan pada krisis moneter sekalipun.

Pada tahun 2012 jumlah perusahaan industri dengan badan hukum jenis perseroan terbatas (PT) sebanyak 11 perusahaan, koperasi sebanyak 1 usaha, persekutuan komanditer (CV) sebanyak 64 perusahaan dan 245 badan usaha lainnya/perusahaan perseorangan. Sebagian besar penggerak industri di Kabupaten Bengkayang masih berupa industri kecil.

### **2.1.4 Aspek Daya Saing daerah**

Daya saing daerah adalah kemampuan dalam memadukan faktor kondisi lingkungan ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik, sumberdaya aparatur, serta masyarakat yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah dalam memperkokoh posisi daerah. Aspek penting dalam membangun daya saing daerah adalah memperhatikan sumberdaya yang ada baik yang berasal dari potensi daerah maupun yang berasal dari ketersediaan yang merupakan produk pembangunan yang sebelumnya.

Aspek daya saing Kabupaten Bengkayang yang menjadi modal dasar untuk pembangunan pada tahun 2016 meliputi beberapa hal, yaitu:

## **1. Ketersediaan Infrastruktur Jalan**

Infrastruktur jalan merupakan sarana yang sangat esensi dalam mendukung pembangunan suatu daerah, bahkan dalam beberapa kondisi infrastruktur justru sebagai penentu dari keberhasilan suatu program pembangunan. Kabupaten Bengkayang secara konsisten dan kontinyu meningkatkan infrastruktur jalan ke seluruh kecamatan dengan tujuan memperlancar akses bagi semua wilayah meski dengan keterbatasan sumberdaya (anggaran). Beberapa daerah atau kecamatan yang selama ini terisolasi sudah mulai terbuka dan memiliki akses jalan meskipun secara bertahap.

Fungsi pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat berupa pendidikan, kesehatan, dan perekonomian secara perlahan mulai menggeliat dengan terbukanya akses dari beberapa kecamatan yang dulunya masih sulit ditempuh melalui jalan darat. Beberapa program pemerintah dapat memberikan output dan outcome yang optimal karena dukungan dari infrastruktur jalan. Kegiatan perekonomian masyarakat yang berkaitan dengan perolehan input produksi dan proses pemasaran hasil produksi sudah mulai berjalan lancar dan lebih efisien karena ada penghematan waktu dan biaya yang berpengaruh sangat signifikan.

## **2. PDRB dan LPE sebagai indikasi potensi daerah**

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Bengkayang selama tahun 2009-2013 mengalami peningkatan meskipun tidak begitu besar. Hal ini mengindikasikan bahwa secara simultan semua variabel pembangunan yang mengarah pada peningkatan perekonomian daerah menghasilkan fungsi yang bersifat positif. Dapat dikatakan bahwa program pembangunan yang diimplementasikan telah tepat sasaran meskipun belum memberikan efek yang optimal bagi perekonomian masyarakat dan daerah. Dengan trend LPE yang positif tersebut menjelaskan bahwa peluang kondisi ekonomi daerah Kabupaten Bengkayang untuk berkembang di masa depan sangat besar.

Laju pertumbuhan ekonomi tentunya tidak lepas dari potensi sumberdaya alam Kabupaten Bengkayang yang cukup besar pada semua sektor pembangunan. Meskipun sektor yang berkembang dan mendominasi



PDRB Kabupaten Bengkayang adalah berasal dari sektor primer yang memiliki nilai tambah relatif rendah daripada sektor sekunder dan tersier, namun informasi tersebut sekaligus menjelaskan bahwa potensi alam Kabupaten Bengkayang sangat besar dan merupakan modal dasar bagi pembangunan di masa datang dan sebagai aspek daya saing yang besar untuk memperkokoh perekonomian daerah.

Pemanfaatan dan pengelolaan hasil alam dan potensi daerah Kabupaten Bengkayang masih sangat terbatas. Jika investasi dan pengelolaan dilakukan dengan efisien dan optimal dengan mengedepankan sektor industri sekunder yang memanfaatkan bahan baku dari sektor primer maka kekuatan ekonomi Kabupaten Bengkayang akan meningkat mengingat perekonomian masyarakatnya meningkat karena ada peningkatan nilai tambah ekonomi yang cukup signifikan.

### **3. Ketersediaan sarana komunikasi dan informasi**

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam penyampaian dan perolehan informasi yang diperlukan. Aktivitas masyarakat, pemerintah, swasta, dan kelembagaan lainnya sangat erat kaitannya dengan kebutuhan akses informasi yang cepat dan akurat, karena dalam banyak hal sarana informasi sangat berpengaruh pada fungsi efisiensi pada suatu organisasi.

Kondisi wilayah yang sangat luas dan tersebar tentunya berimplikasi pada potensi kinerja yang kurang efisien, dengan sarana komunikasi dan informasi yang baik hal tersebut tidak lagi menjadi permasalahan. Hampir semua kecamatan di Kabupaten Bengkayang dapat dilakukan komunikasi melalui jaringan seluler bahkan jaringan internet. Perkembangan warnet yang terus bertambah di pusat kota (Kecamatan Bengkayang) dan beberapa kecamatan lainnya serta jaringan 3G yang dapat mengakses internet terus mengalami perluasan di Kabupaten Bengkayang sangat mempermudah hubungan komunikasi dan proses pertukaran informasi baik secara personal maupun kelembagaan. Kondisi ini tentunya sangat mendukung kegiatan perekonomian dan pelaku bisnis di Kabupaten Bengkayang, yang selanjutnya perekonomian regional akan berjalan dengan lancar.

Sebagian besar Satuan Kerja yang terdapat di pemerintah Kabupaten Bengkayang telah memanfaatkan sarana telekomunikasi dan teknologi informasi tersebut. Selain berimplikasi pada peningkatan sumberdaya aparatur daerah, kondisi ini juga bermanfaat dalam kinerja pelayanan dan publikasi serta perencanaan di Kabupaten Bengkayang karena mudah dalam mengakses data dan informasi yang diperlukan. Peluang dan iklim investasi akan sangat didukung dengan pemanfaatan sarana komunikasi yang baik dan lancar karena akan memudahkan dalam pengambilan keputusan dan fungsi manajemen baik bagi pihak investor maupun kelembagaan pemerintahan.

#### **4. Ketersediaan Lembaga Keuangan**

Ketersediaan bank dan lembaga keuangan lainnya sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah di segala bidang, khususnya dalam penyediaan modal dan lalu lintas uang antar daerah. Untuk kepentingan tersebut, Kabupaten Bengkayang sangat mudah karena telah tersedia bank-bank pemerintah dan swasta (Bank Danamon, BRI, BNI' 46, Bank KALBAR, dan Bank Mandiri) meskipun belum tersedia di semua kecamatan. Pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang memiliki hubungan kerjasama dengan Bank Kalbar yang berfungsi dalam memperlancar lalu lintas keuangan daerah.

Kelembagaan keuangan selain bank yang berpotensi dalam membantu perekonomian masyarakat dalam hal perkreditan adalah terdapatnya beberapa Credit Union (CU) yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkayang. Keberadaan kelembagaan CU sangat penting dan terbukti telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan pada sektor primer di Kabupaten Bengkayang, mengingat nasabah kelembagaan tersebut didominasi oleh masyarakat pelaku sektor agrikultural. Hal ini terlihat dari kelancaran proses simpan pinjam dan tingginya lalu lintas keuangan kelembagaan tersebut serta perkembangan jumlah nasabah yang terdaftar.

#### **5. Ketersediaan Sumber Air**

Sumber air bersih yang melimpah di Kabupaten Bengkayang tersebar merata di seluruh Kecamatan merupakan salah satu modal dasar dalam memperkokoh perekonomian Kabupaten Bengkayang. Kondisi geomorfologi

dan kawasan hutan yang sangat luas telah menyediakan sumber air yang cukup besar bagi Kabupaten Bengkayang. Ketersediaan sumber air ini sangat penting baik kebutuhan rumah tangga, kegiatan perekonomian sektor primer, maupun pada sektor industri. Pemanfaatan sumber air yang tepat tidak hanya memberi peluang dalam mendukung efisiensi kegiatan perekonomian tetapi juga dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang cukup signifikan.

Ketersediaan sumber air yang melimpah dan sepanjang tahun sangat membantu dalam proses produksi pertanian masyarakat, sehingga peluang untuk terjadinya gagal panen sangat kecil. Kabupaten Bengkayang yang dulunya menggunakan layanan air bersih dari Kabupaten Lain (Kabupaten Sambas), sekarang telah memiliki PDAM sendiri dalam bentuk BUMD. Beberapa usaha kecil juga telah memanfaatkan potensi sumber air tersebut sebagai usaha penyediaan air minum. Pada tahun 2012 pemanfaatan sumber air sudah mengarah pada sumber tenaga listrik portable yaitu PLMH (Pembangkit Listrik Mikro Hidro) yang merupakan solusi keterbatasan jaringan listrik pada beberapa daerah terpencil di Kabupaten Bengkayang.

Potensi ketersediaan air di Kabupaten Bengkayang sangat besar dan memiliki peranan yang besar dalam kegiatan perekonomian, dan hal ini merupakan salah satu faktor pendukung dalam memperkuat pembangunan perekonomian Kabupaten di masa yang akan datang. Hal yang perlu diingat bahwa ketersediaan air tersebut perlu dijaga kelestariannya, mengingat modal dasar tersebut bisa saja menjadi langka apabila pengelolaan sumberdaya alam yang tidak memperhatikan alam sebagai penyedia sumberdaya tersebut. Jika terjadi pemanfaatan hutan yang tidak terkontrol untuk pertambangan dan perkebunan skala besar, maka kawasan hutan yang menjadi penyangga sumber air akan rusak, akibatnya sumber air akan hilang bahkan dapat berakibat yang lebih buruk yaitu terjadinya bencana alam.

## **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 dan Realisasinya**

### **1. Pendidikan**

Urusan bidang pendidikan Kabupaten Bengkayang pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 59.697.951.300,00 dan terealisasi sebesar

Rp. 56.057.235.811,00 atau sekitar 93,90%. Adapun Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pendidikan dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Program pendidikan anak usia dini**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
334.635.000,00	334.623.000,00	100,00
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya daya serap bagi peserta didik usia dini di Kabupaten Bengkayang melalui pembangunan gedung sekolah PAUD	
2.	Terselenggaranya pendidikan anak usia dini melalui kegiatan pendidikan PAUD disertai pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD	
3.	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya PAUD melalui kegiatan publikasi dan sosialisasi PAUD	

**b. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
32.929.034.250,00	30.900.640.764,00	93,84
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya serapan peserta didik pada pendidikan tingkat dasar melalui program pembangunan gedung sekolah, penambahan ruang kelas, dan meubeler pada sekolah tingkat dasar di Kabupaten Bengkayang.	
2.	Terwujudnya kelancaran dan kenyamanan pada proses belajar mengajar pada pendidikan tingkat dasar di Kabupaten Bengkayang melalui kegiatan rehabilitasi gedung dan infrastruktur sekolah, pengadaan buku, alat tulis, dan alat peraga sekolah, serta pembangunan gedung perpustakaan.	
3.	Meningkatnya kompetensi dan daya kreativitas siswa melalui kegiatan olimpiade sains dan festival seni dan budaya pada pendidikan tingkat dasar	

**c. Program pendidikan menengah**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
14.041.398.250,00	13.104.090.750,00	93,32
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya serapan peserta didik pendidikan tingkat menengah sebanyak 350 siswa melalui program pembangunan gedung sekolah di Kabupaten Bengkayang	
2.	Terwujudnya proses belajar mengajar yang nyaman dan lancar pada siswa pendidikan tingkat menengah di Kabupaten Bengkayang melalui kegiatan pembangunan perpustakaan, laboratorium dan ruang praktek sekolah, pengadaan alat tulis, buku, alat peraga, dan alat praktek sekolah, dan perbaikan ruangan kelas baik berat maupun ringan.	
3.	Meningkatnya kompetensi, daya saing, dan kreativitas siswa tingkat menengah melalui beberapa kegiatan lomba, antara lain: lomba debat bahasa inggris, olympiade sains, cerdas cermat, penelitian ilmiah remaja, kerampilan siswa, dan festival seni budaya.	
4.	Meningkatnya tingkat kompetensi tenaga pendidikan tingkat menengah melalui kegiatan workshop pendidikan karakter bangsa dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP)	
5.	Meningkatnya peran aktif kelembagaan pendidikan non negeri pada penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah di Kabupaten Bengkayang melalui penyediaan dana untuk pengembangan sekolah (BOSDA).	
6.	Meningkatnya kesadaran dan animo masyarakat akan pentingnya pendidikan tingkat menengah melalui penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah.	

**d. Program pendidikan non formal**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
329.946.000,00	325.664.000,00	98,70
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya apresiasi masyarakat pada program pendidikan non formal dengan terlaksananya pengembangan pendidikan keaksaraan dan kecakapan hidup	

2.	Meningkatnya layanan pendidikan di luar sekolah melalui pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan untuk Paket A, Paket B, dan Paket C.
----	---

**e. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
2.414.965.500,00	1.813.556.500,00	75,10
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya kompetensi, kualitas, dan daya saing tenaga pendidik melalui pelaksanaan sertifikasi guru, uji kompetensi kepala sekolah, pelatihan dan pendidikan tenaga pendidik, dan olympiade sains nasional..	
2.	Meningkatnya perencanaan pendidikan melalui Furum Ilmiah Guru (FIG) dan Rakor pertimbangan mutasi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan penilik	
3.	Meningkatnya mutu pendidikan melalui pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP)	
4.	Meningkatnya motivasi dan apresiasi tenaga pendidik pada Program peningkatan mutu pendidikan melalui kegiatan bantuan guru daerah khusus dan biaya operasional NUPTK	

**f. Program manajemen pelayanan pendidikan**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
403.515.000,00	380.911.000,00	94,40
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1	Meningkatnya perencanaan pendidikan melalui kegiatan penyusunan rencana umum pendidikan, validasi data tenaga pendidik, dan dokumen perencanaan pengembangan Dikdasmen Kabupaten	
2.	Meningkatnya apresiasi tenaga pendidik terhadap manajemen pelayanan pendidikan melalui sosialisasi subsidi guru	

**g. Program peningkatan dan pengembangan sumberdaya masyarakat**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
6.338.306.500,00	6.326.041.580,00	99,81
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkayang melalui kegiatan pemberian beasiswa kepada mahasiswa utusan daerah bidang pendidikan.	

**2. Kesehatan**

Urusan bidang kesehatan Kabupaten Bengkayang pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 27.382.047.648,00 untuk Dinas Kesehatan dan anggaran terealisasi sebesar Rp. 23.637.520.942,00 atau sekitar 86,32% dan untuk Rumah Sakit dengan alokasi anggaran sebesar 17.382.508.702,00 dan realisasi anggarannya sebesar 16.269.041.756,00 atau sekitar 93,59%. Adapun Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan kesehatan dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
2.776.122.934,00	2.652.376.634,00	95,54
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya standar pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkayang melalui pengadaan obat dan pembekalan kesehatan, pengawasan keamanan pahan dan bahan berbahaya, dan pemeriksaan obat rusak dan kadarluarsa.	
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan melalui kegiatan penyulihan P3 NAPZA di Institusi dan pengujian jajanan anak sekolah.	

**b. Program upaya kesehatan masyarakat**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
754.946.417,00	557.929.417,00	73,90
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan lomba kinerja dan sosialisasi Puskesmas, pemberdayaan kesehatan keluarga, monitoring pelayanan kesehatan puskesmas, dan pembentukan TPKJM Kabupaten Bengkayang.	
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pelayanan kesehatan melalui kegiatan sosialisasi tentang retribusi jasa pelayanan kesehatan	

**c. Program perbaikan gizi masyarakat**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
96.982.185,00	93.782.185,00	96,70
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Menurunnya angka balita kurang gizi dan gizi buruk di Kabupaten Bengkayang melalui kegiatan konseling menyusui	

**d. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
230.970.998,00	180.867.487,00	78,31
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya apresiasi masyarakat Kabupaten Bengkayang pada pelayanan kesehatan berkaitan dengan penyakit menular melalui kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.	
2.	Menurunnya angka penderita penyakit menular di Kabupaten Bengkayang melalui kegiatan fogging sarang nyamuk, distribusi obat cacung pada anak sekolah, dan kegiatan pertemuan untuk penanganan penyakit HIV, malaria, dan diare.	



**e. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
4.262.000.000,00 *)	2.989.741.810,00 *)	70,15 *)
574.800.000,00 **)	331.600.228,00 **)	57,69 **)
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya jaminan kesehatan masyarakat miskin dan daerah Kabupaten Bengkayang melalui JAMKESDA dan JAMKESMAS	

Keterangan: \*) Dinas Kesehatan; \*\*) Rumah Sakit

**f. Program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
3.170.005.724,00	3.160.278.000,00	99,69
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya pelayanan kesehatan melalui puskesmas dengan adanya kegiatan pengadaan dan rehabilitasi puskesmas di beberapa kecamatan.	
2.	Tersedianya peralatan dan sarana kesehatan di puskesmas melalui kegiatan pengadaan alkes medis dan non medis, serta pengadaan Sanitarian Kit.	

**g. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
6.846.446.710,00	6.667.104.686,00	97,38
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan rumah sakit Kabupaten Bengkayang melalui kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit.	
2.	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang lancar dan bermutu pada rumah sakit Kabupaten Bengkayang melalui pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan rumah sakit, perbekalan rumah sakit, dan pengadaan perlengkapan rumah tangga untuk rumah sakit.	

#### h. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
5.662.265.810,00 *)	4.335.910.977,00 *)	76,58 *)
4.020.000.000,00 **)	3.782.336.848,00 **)	94,09 **)
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Tersedianya pelayanan kesehatan bagi PNS melalui jasa kapitasi ASKES PNS.	

Keterangan: \*) Dinas Kesehatan; \*\*) Rumah Sakit

#### i. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
283.061.048,00	276.011.660,00	97,51
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya kompetensi tenaga bidan melalui kegiatan pelatihan manajemen BBLR	
2.	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak melalui kegiatan monev program KIA	
3.	Menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan di Kabupaten Bengkayang melalui kegiatan kemitraan antara bidan dan dukun bayi.	

### 3. Pekerjaan Umum

Urusan bidang pekerjaan umum Kabupaten Bengkayang pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 175.917.975.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 159.746.377.617,00 atau sekitar 90,81%. Adapun Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pekerjaan Umum dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Program pembangunan Jalan dan Jembatan

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
28.253.026.948,00	24.510.244.585,00	86,75

Hasil dan manfaat yang diperoleh:	
1.	Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan Kabupaten dari yang kurang baik menjadi lebih baik sehingga mempermudah masyarakat dalam transportasi.
2.	Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Bengkayang melalui kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan di wilayah I dan II.

**b. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
10.179.134.875,00	9.416.084.033,00	92,50
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya kondisi baik jalan dan jembatan di Kabupaten Bengkayang melalui kegiatan rehabilitasi jalan dan jembatan, dan pembangunan jalan lingkungan.	

**c. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan pengairan lainnya**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
13.499.879.274,05	13.004.148.204,00	96,33
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya kapasitas fungsi jaringan irigasi dan bangunan pengairan melalui kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi	

**d. Program pembangunan infrastruktur pedesaan**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
119.673.700,00	88.188.121,00	73,69
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya perencanaan infrastruktur pedesaan di Kabupaten Bengkayang melalui penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan.	

**e. Program pembangunan jaringan air bersih**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
8.586.810.528,00	8.383.113.238,00	97,63
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Tersedianya pelayanan air bersih bagi masyarakat yang terdapat di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bengkayang.	

**f. Program pengembangan kinerja pengelolaan kebersihan dan pertamanan**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
2.845.946.131,5	2.350.454.814,00	82,59
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan di Kota Kecamatan Bengkayang melalui peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan dan pertamanan.	

**g. Program pemadam kebakaran**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
582.662.750,00	570.078.970,00	97,84
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya rasa aman dan apresiasi masyarakat terhadap kinerja pemadam kebakaran melalui kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.	
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat Kabupaten Bengkayang akan bahaya dan pencegahan kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan pencegahan kebakaran	

**h. Program peningkatan jalan dan jembatan**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
92.567.149.040,00	83728201969,00	90,45
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		

1.	Meningkatnya status dan kondisi beberapa ruas jalan di Kabupaten Bengkayang melalui kegiatan peningkatan jalan dan jembatan
----	---

**i. Program pengembangan perumahan**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
493.359.300,00	486.559.169,00	98,62
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya pemenuhan hak dasar dan kelayakan hidup masyarakat melalui kegiatan bantuan perumahan swadaya di Kabupaten Bengkayang	
2.	Meningkatnya apresiasi masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan tingkat kesehatan lingkungan masyarakat melalui	

**4. Perencanaan**

Urusan bidang Perencanaan Kabupaten Bengkayang pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.220.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.765.915.902,00 atau sekitar 94,48%. Adapun Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perencanaan dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Program pengembangan data/informasi**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
1.495.685.120,00	1.458.459.923,00	97,51
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Tersedianya data dan informasi padi jenis varietas unggulan (padi beliah) di kawasan perbatasan Kabupaten Bengkayang melalui penelitian penerapan bidang ilmu dan teknologi kerja sama antara Bappeda Kabupaten Bengkayang dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Region Kalimantan Barat.	
2.	Tersedianya data dan informasi mengenai pembangunan Kabupaten Bengkayang secara umum melalui penyusunan Data Pokok Kabupaten Bengkayang tahun 2014 kerjasama antara Bappeda Kabupaten Bengkayang dengan Badan Pusat Statistik	

	(BPS) Kabupaten Bengkayang
3.	Tersedianya website SIPPD Kabupaten Bengkayang yang bersifat online sebagai bentuk publikasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Bengkayang melalui kegiatan Pembangunan/pengembangan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4.	Tersedianya data dan informasi berkaitan dengan rencana induk informasi teknologi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
5.	Tersedianya dokumen dan terfasilitasinya pengajuan pendirian perguruan tinggi politeknik di Kabupaten Bengkayang.

**b. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
100.000.000,00	99.948.677,00	99,95
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya fungsi dan perencanaan bidang Kelitbangan Kabupaten Bengkayang melalui terlaksananya Rapat Koordinasi Daerah Kelitbangan se-Kalimantan Barat.	

**c. Program perencanaan pengembangan kota menengah dan besar**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
950.000.000,00	927.812.142,00	97,66
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah perkotaan melalui kegiatan koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi perkotaan.	
2.	Tersedianya perencanaan pembangunan pemukiman perkotaan melalui kegiatan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman (RP3KP).	
3.	Meningkatnya perencanaan dan penataan perdagangan kawasan perkotaan melalui penyusunan RTBL pusat perdagangan dan jasa di kelurahan Bumi Sebalu.	

**d. Program perencanaan pembangunan daerah**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
881.360.250,00	703.063.073,00	79,77
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Tersedianya dokumen perencanaan Kabupaten Bengkayang melalui kegiatan penyusunan Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025, Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang tahun 2015, Penyusunan KUA dan PPAS APBD murni dan perubahan Kabupaten Bengkayang.	
2.	Meningkatnya perencanaan pembangunan di Kabupaten Bengkayang melalui kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang bersumber dari dana DAK, DAU, dan TP.	
3.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terkoordinir dengan baik melalui kegiatan penyusunan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.	

**e. Program perencanaan pembangunan ekonomi**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
640.000.000,00	632.262.779,00	98,79
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Tersedianya perencanaan perekonomian daerah dan investasi melalui fasilitasi dan koordinasi perencanaan bidang pembangunan.	
2.	Tersedianya dokumen rencana Kawasan Industri di Kabupaten Bengkayang.	

**f. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
100.000.000,00	99.458.347,00	99,46
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Tersedianya data dan informasi pengembangan investasi bidang perkebunan dan sumberdaya alam melalui kegiatan penyusunan perencanaan spasial pengembangan investasi di Kabupaten Bengkayang	

**g. Program perencanaan sosial dan budaya**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
598.726.750,00	597.999.117,00	99,88
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Kabupaten Bengkayang melalui kegiatan koordinasi, fasilitasi, seminar dan monitoring yang terkonsentrasi pada kelembagaan, kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan sektor pendidikan.	
2.	Tersedianya data dan informasi bagi pembangunan bidang sosial budaya melalui kegiatan penelitian bidang sosial budaya, pemutahiran data desa tertinggal, dan penyusunan masterplan pendidikan.	
3.	Meningkatkan kerjasama perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan arah pembangunan melalui fasilitasi kinerja USAID dan evaluasi MGDs.	
4.	Tersedianya sumber air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dengan kegiatan PAMSIMAS di Kabupaten Bengkayang.	

**h. Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
615.000.000,00	589.849.854,00	95,91
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Tersedianya dokumen perencanaan pertanian di Kabupaten Bengkayang dan terukurnya perencanaan dan pembangunan bidang pertanian yang sesuai dengan jenis tanaman/tumbuhan kerjasama Bappeda Kabupaten Bengkayang dengan Institut Pertanian Bogor.	

**i. Program perencanaan tata ruang**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
254.039.668,00	130.971.546,00	51,56
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		



1.	Meningkatnya perencanaan fisik dan tata ruang Kabupaten Bengkayang melalui kegiatan fasilitasi penyusunan RPKPP dan koordinasi penyusunan tata ruang.
2.	Tersedianya data dan informasi mengenai kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bengkayang.

## 5. Perhubungan

Urusan bidang Perhubungan Kabupaten Bengkayang pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.323.071.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.199.960.599,00 atau sekitar 98,32%. Adapun Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perhubungan dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
39.999.852,00	39.932.550,00	99,83
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan bagi masyarakat Bengkayang melalui penyusunan kebijakan, norma, standar, dan prosedur bidang perhubungan	
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan tata tertib dan kebijakan perhubungan melalui sosialisasi kebijakan perhubungan	

### b. Program peningkatan pelayanan angkutan

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
196.509.011,00	171.947.000,00	87,50
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya kesadaran kedisiplinan pengusaha angkutan umum Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan kebijakan bidang perhubungan melalui kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	
2.	Meningkatnya pelayanan transportasi pendukung kegiatan pendidikan melalui operasional bis sekolah Kabupaten Bengkayang.	

**c. Program pembangunan prasarana perhubungan**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
4.365.511.560,00	4.348.433.521,00	99,61
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya pelayanan transportasi sungai dan laut melalui pembangunan pelabuhan sungai dan laut di Kabupaten Bengkayang.	
2.	Terwujudnya ketertiban dan penataan parkir di Kecamatan Bengkayang melalui pembuatan lahan parkir.	

**d. Program pengendalian dan pengamatan lalu lintas**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
467.289.067,00	465.169.100,00	99,55
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Terwujudnya kelancaran dan tertib lalu lintas di Kabupaten Bengkayang dengan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas	

**6. Lingkungan Hidup**

Urusan bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.145.949.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.070.211.619,00 atau sekitar 96,47%. Adapun Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Lingkungan Hidup dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
130.780.000,00	124.349.150,00	95,08
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh masyarakat baik secara individual maupun organisasi melalui pemantauan kualitas lingkungan dan	

	pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH
2.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berpedoman pada AMDAL melalui koordinasi penyusunan AMDAL Kabupaten Bengkayang.

**b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
1.143.161.180,00	1.096.685.000,00	95,93
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Tersedianya kawasan terbuka hijau di dalam kota Kabupaten Bengkayang	

**c. Program penilaian lingkungan hidup**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
107.155.000,00	106.253.447,00	99,16
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya motivasi dan kesadaran masyarakat serta aparatur pemerintah terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup melalui ikut serta dalam kegiatan Adiwiyata (Green School).	

**7. Pengelola Perbatasan**

Urusan bidang Pengelola Perbatasan Kabupaten Bengkayang pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 14.611.736.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.021.507.821,00 atau sekitar 95,96%. Adapun Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pengelola Perbatasan dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
165.911.649,00	165.791.264,00	99,93

Hasil dan manfaat yang diperoleh:	
1.	Terwujudnya hubungan diplomatik yang baik dengan negara tetangga Malaysia melalui kegiatan fasilitasi kerjasama sosek Malindo dan fasilitas kerjasama wilayah perbatasan.

**b. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
393.301.393,00	382.732.803,00	97,31
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya perencanaan pembangunan wilayah perbatasan melalui musyawarah pembangunan wilayah perbatasan, monev kegiatan pembangunan perbatasan, dan fasilitasi dana dari pemerintah pusat	
2.	Meningkatnya peluang pengembangan potensi perbatasan melalui kegiatan pengelolaan potensi perbatasan dan fasilitasi pengembangan potensi perbatasan	

**c. Program Peningkatan Aksesibilitas Daerah Perbatasan**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
11.760.251.914,00	11.213.949.790,00	95,25
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya aksesibilitas daerah perbatasan melalui kegiatan pembangunan jalan dan jembatan daerah terisolir/perbatasan	
2.	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah perbatasan melalui penyusunan database infrastruktur kawasan perbatasan	

**8. Kependudukan dan Catatan Sipil**

Urusan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.472.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.459.394.022,00 atau sekitar 99,49%. Adapun Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan

urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Program Penataan Administrasi Kependudukan**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
64.618.694,00	63.541.422,00	98,33
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Tersedianya data kependudukan yang informatif melalui kegiatan pendataan penduduk pelintas batas dan pelaksanaan pembuatan kartu keluarga (KK).	
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat berkaitan dengan data kependudukan melalui kegiatan sosialisasi penduduk rentan Adminduk	

**b. Program penerapan KTP Elektronik (e-KTP)**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
285.008.758,00	284.652.161,00	99,87
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Tersedianya informasi kependudukan pada masyarakat melalui pengadaan informasi berkaitan dengan e-KTP	
2.	Meningkatnya penduduk Kabupaten Bengkayang yang memiliki e-KTP melalui penerapan KTP Elektronik	

**c. Program pendataan dan pelaporan kependudukan**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
414.562.602,00	413.356.215,00	99,71
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Tersedianya data kependudukan Kabupaten Bengkayang yang aktual melalui penyusunan data agregat kependudukan per kecamatan, input data kependudukan ke kecamatan, dan kegiatan monev kependudukan dan catatan sipil	
2.	Tersedianya media publikasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bengkayang melalui sistem update informasi data dan pelayanan publik dalam bentuk website (memanfaatkan	

	terknologi informatika)
--	-------------------------

**d. Program penataan pencatatan sipil**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
238.139.857,00	237.645.260,00	99,79
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat melalui penyediaan pelayanan administrasi pencatatan sipil	
2.	Tersedianya data kependudukan dan catatan sipil yang efektif dan tertata melalui kegiatan entri data register akta pencatatan sipil pada database kependudukan dan pencatatan sipil.	

**9. Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana**

Urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.695.392.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.445.852.752,00 atau sekitar 95,62%. Adapun Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
92.251.000,00	85.440.987,00	92,62
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat desa melalui Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat pedesaan	
2.	Meningkatnya semangat kekeluargaan dan kebersamaan dalam membangun desa melalui Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	

**b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
568.762.000,00	506.067.730,00	88,98
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya peran kelembagaan ekonomi masyarakat desa melalui fasilitasi program raskin	
2.	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa melalui fasilitasi dan pendampingan PNPM Mandiri	

**c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
345.984.000,00	339.318.379,00	98,07
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun perekonomian desa melalui pemberian stimulan pembangunan desa dan pelaksanaan lomba desa	
2.	Meningkatnya peranan wanita dalam membangun desa melalui peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera	
3.	Meningkatnya peranan masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa melalui pembinaan teknologi tepat guna	

**d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
1.180.861.000,00	1.049.319.820,00	88,86
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya kinerja pemerintah desa melalui rapat kerja pembinaan pemerintah desa dan pembinaan tugas dan fungsi BPD	
2.	Meningkatnya kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan peningkatan tugas dan fungsi kepala desa	
3.	Meningkatnya proses kelembagaan dan organisasi tingkat desa	

1.	Meningkatnya program KB di Kabupaten Bengkayang melalui kegiatan Tim manunggal KB kesehatan, Bulan Bakti KB Kesehatan Bhayangkara, Kesatuan Gerak PKK-KB, dan ketersediaan alat kontrasepsi.
2.	Meningkatnya perencanaan program KB melalui Rakor dan evaluasi KB dan pelaksanaan Hari Keluarga Nasional.

**h. Program peningkatan sarana dan prasarana fisik pelayanan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) program KB**

	<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
	789.840.000,00	786.975.000,00	99,64
Hasil dan manfaat yang diperoleh:			
1.	Tersedianya media informasi pada program KB melalui pengadaan KIE Kit		
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB melalui pembangunan balai penyuluhan KB.		

**10. Ketahanan Pangan**

Urusan bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkayang pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.933.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.901.951.740,00 atau sekitar 98,94%. Adapun Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Ketahanan Pangan dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Program peningkatan kesejahteraan petani**

	<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
	239.930.000,00	238.588.834,00	99,44
Hasil dan manfaat yang diperoleh:			
1.	Meningkatnya kompetensi pelaku usahatani melalui pelatihan petani dan pelaku agribisnis		
2.	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan petani yang bergerak di sektor ketahanan pangan melalui peningkatan kemampuan lembaga petani		



**b. Program peningkatan ketahanan pangan**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
591.540.600,00	585.175.972,00	98,92
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya ketahanan pangan Kabupaten Bengkayang melalui pemanfaatan lahan pekarangan, bantuan desa mandiri pangan, penyediaan stock pangan desa, dan diversifikasi pangan pokok.	
2.	Meningkatnya kompetensi dan kesadaran masyarakat akan ketahanan pangan melalui pertemuan DKP dan lomba memasak bahan pangan lokal, bergizi, dan berimbang	
3.	Meningkatnya perencanaan bidang ketahanan pangan melalui pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat.	

**c. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
82.730.600,00	82.641.256,00	99,89
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya peluang pasar Kabupaten Bengkayang melalui promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	

**d. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
226.671.000,00	226.418.413,00	99,89
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya perencanaan penerapan teknologi pertanian/perkebunan melalui kegiatan litbang teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	
2.	Tersediannya teknologi tepat guna melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna.	

e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
833.270.500,00	818.206.597,00	98,19
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya kompetensi tenaga fungsional penyuluh ketahanan pangan melalui peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	
2.	Meningkatnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat akan ketahanan pangan melalui penilaian penyuluh, BPP, dan Kelompok Tani	

**11. Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga**

Urusan bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bengkayang pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.050.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.029.701.454,00 atau sekitar 99,66%. Adapun Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Program pengembangan pemasaran pariwisata

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
210.300.000,00	210.299.597,00	100,00
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Tersedianya informasi tempat wisata di kabupaten bengkayang, baik di dalam maupun luar negeri dengan melibatkan pihak ketiga dalam promosi wisata tersebut.	
2.	Meningkatnya wisatawan yang berkunjung di Kabupaten bengkayang.	

b. Program pengelolaan kekayaan budaya

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
150.000.000,00	150.000.000,00	100,00

Hasil dan manfaat yang diperoleh:	
1.	Meningkatnya identifikasi dan pengelolaan kelestarian budaya melalui pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan peninggalan bawah air.
2.	Terjaganya kelestarian budaya melalui ketersediaan dokumentasi hasil karya cetak dan karya rekam

**c. Program pengelolaan keragaman budaya**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
2.798.386.000,00	2.794.959.800,00	99,88
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Terjaganya keragaman budaya melalui pengembangan seni dan budaya daerah, fasilitasi keragaman budaya daerah, dan penyelenggaraan festival budaya daerah.	
2.	Meningkatnya partisipasi Kabupaten Bengkayang dalam mengelola keragaman budaya lintas regional melalui pagelaran gawai Dayak se-Kalimantan di Jakarta, festival khatulistiwa, parade lagu nusantara, dan festival pagelaran tari dan musik dalam rangka MTQ XXV tingkat provinsi dan KPDT EXPO tingkat Nasional yang di selenggarakan di Kabupaten Bengkayang.	

**d. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
432.136.160,00	431.831.160,00	99,93
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya perencanaan bidang olah raga melalui identifikasi dan pengembangan olah raga unggulan daerah.	
2.	Meningkatnya kompetensi dan prestasi olah raga melalui pembinaan cabang olah raga prestasi tingkat daerah, kompetisi olah raga, penghargaan bidang olah raga, dan pengembangan olah raga rekreasi.	
3.	Meningkatnya kesadaran berolah raga di masyarakat melalui peningkatan kesehatan jasmani dan rekreasi, serta pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat.	

**e. Program pengembangan destinasi pariwisata**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
548.160.900,00	548.110.900,00	99,99
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Berkembangnya destinasi obyek pariwisata unggulan Kabupaten Bengkayang melalui pengembangan daerah tujuan wisata	

**12.Sosial**

Urusan bidang Sosial Kabupaten Bengkayang pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.745.783.541,00 atau sekitar 98,06%. Adapun Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Sosial dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
198.587.028,00	197.283.503,00	99,34
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Tersedianya data mengenai orang cacat melalui kegiatan pendataan penyandang cacat di Kabupaten Bengkayang	
2.	Meningkatkan kompetensi dan ketrampilan penyandang cacat melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan	

**b. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
48.542.000,00	48.542.000,00	100,00
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya peranan kelembagaan sosial di Kabupaten Bengkayang melalui monev KUBE dan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera	

**c. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
158.957.000,00	158.677.000,00	99,82
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Menurunnya permasalahan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan	
2.	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial melalui penanganan masalah bstrategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.	

**d. Program peningkatan kesempatan kerja**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
59.481.600,00	58.253.785,00	97,94
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Tersedia informasi mengenai kesempatan kerja melalui kegiatan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	

**e. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
125.630.000,00	125.630.000,00	100,00
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya kompetensi angkatan pencari kerja di Kabupaten Bengkayang melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	

**f. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
149.665.455,00	127.533.964,00	85,21
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		

1.	Tersedianya standar upah minimum regional Kabupaten Bengkayang dan prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
2.	Meningkatnya pemahaman mengenai regulasi ketenagakerjaan para angkatan pencari kerja melalui kegiatan sosialisasi peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan dan LKS BIPARTID

**g. Program pengembangan wilayah transmigrasi**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
365.239.733,00	364.150.662,00	99,70
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Tersedianya data mengenai pemukiman transmigrasi melalui kegiatan identifikasi unit pemukiman transmigrasi	
2.	Meningkatnya kompetensi dan perkembangan masyarakat transmigrasi melalui penguatan SDM transmigrasi dan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku, dan antar sektor.	

**13. Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu**

Urusan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.199.289.344,00 atau sekitar 93,59%. Adapun Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Program peningkatan pengendalian pengembangan penanaman modal**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
247.091.200,00	244.772.060,00	99,06
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Terwujudnya penanaman modal yang efektif melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	

2.	Meningkatnya pemahaman proses penanaman modal melalui bimbingan dan sosialisasi ketentuan penanaman modal
----	---

**b. Program peningkatan dan pengembangan pelayanan kerjasama dan informasi penanaman modal**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
225.415.700,00	222.081.868,00	98,52
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Terlaksananya pelayanan perizinan bidang penanaman modal	
2.	Meningkatnya jumlah investasi melalui kegiatan peningkatan iklim investasi dengan program SPIPISE	
3.	Meningkatnya iklim investasi melalui kegiatan promosi dan kerjasama investasi, serta koordinasi dan kebijakan dalam investasi	

**c. Program peningkatan kualitas pelayanan publik**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
294.505.900,00	263.143.903,00	89,35
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Terlaksananya pelayanan perizinan melalui pemrosesan penyelesaian perizinan dan non perizinan	
2.	Meningkatnya mutu pelayanan perizinan dan penanaman modal melalui koordinasi dan sinkronisasi pelayanan perizinan	

**14. Pertanian**

Urusan bidang pertanian Kabupaten Bengkayang pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18.376.659.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.161.360.778,00 atau sekitar 98,83%. Adapun Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan pertanian dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
905.407.900,00	903.118.498,00	99,75
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Tersedianya data untuk perencanaan ketahanan pangan pertanian melalui kegiatan penyusunan data base potensi pertanian, monev dan pelaporan, dan penyusunan laporan statistik pertanian.	
2.	Meningkatnya produksi pangan melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan, pengembangan pertanian lahan kering, dan pengembangan pembibitan	
3.	Meningkatnya usahatani masyarakat melalui kegiatan temu lapangan dan pengembangan usaha agribisnis pedesaan.	

**b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
44.196.400,00	43.654.759,00	98,77
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya peluang pasar hasil pertanian melalui kegiatan promosi hasil produksi pertanian (agribisnis)	

**c. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
8.995.316.800,00	8.839.474.471,00	98,27
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya kualitas dan produktivitas hasil pertanian melalui pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna	

**d. Program peningkatan produksi pertanian**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
272.715.900,00	272.458.919,00	99,91



Hasil dan manfaat yang diperoleh:	
1.	Meningkatnya produksi pertanian melalui kegiatan penyediaan saprodi pertanian dan pengawasan pada peredaran pupuk dan pestisida

**e. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
64.582.300,00	64.513.508,00	99,89
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Menurunnya kasus ternak mati dan penyakit menular ternak melalui kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	

**f. Program peningkatan hasil produksi peternakan**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
3.916.098.400,00	3.915.446.675,00	99,98
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya usahatani ternak masyarakat melalui kegiatan pengadaan dan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat, serta penyuluhan pengelolaan bibit ternak	
2.	Meningkatnya produktivitas usahatani ternak melalui kegiatan penyuluhan gizi dan pakan ternak	

**15. Kehutanan dan Perkebunan**

Urusan bidang Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.613.207.998,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.569.256.272,00 atau sekitar 99,62%. Adapun Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kehutanan dan Perkebunan dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
----------------------	-----------------------	-----------------------

	1.834.373.790,00	1.812.106.877,00	98,79
Hasil dan manfaat yang diperoleh:			
1.	Bertambahnya luasan tutupan lahan dan menurunnya lahan kritis melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan		

**b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan**

	<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
	247.861.900,00	247.774.776,00	99,96
Hasil dan manfaat yang diperoleh:			
1.	Menurunnya ancaman kebakaran hutan melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan		
2.	Terwujudnya kelestarian hutan melalui kegiatan penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan		

**c. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan**

	<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
	117.500.000,00	117.308.826,00	99,84
Hasil dan manfaat yang diperoleh:			
1.	Meningkatnya perencanaan pembangunan kehutanan melalui fasilitasi perubahan pola ruang kawasan hutan, tata batas hutan adat, dan inventarisasi potensi kawasan hutan adat		

**d. Program Peningkatan Produksi Perkebunan**

	<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
	6.550.766.500,00	6.538.709.717,00	99,82
Hasil dan manfaat yang diperoleh:			
1.	Meningkatnya luasan perkebunan melalui pembangunan perkebunan rakyat		
2.	Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan melalui kegiatan bantuan intensifikasi tanaman perkebunan		

**e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
465.230.000,00	465.103.400,00	99,97
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya standar usaha perkebunan melalui penilaian usaha perkebunan	
2.	Terwujudnya investasi perkebunan yang efektif dan efisien melalui pembinaan dan pengendalian investasi perkebunan kabupaten (TKP2I)	

**f. Program peningkatan kesejahteraan petani**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
973.141.500,00	970.398.500,00	99,72
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya luasan kepemilikan perkebunan rakyat melalui kegiatan peremajaan karet dan pengembangan kelapa dalam	
2.	Meningkatnya angka produktivitas tanaman lada rakyat melalui kegiatan intensifikasi tanaman lada	

**16. Energi dan Sumberdaya Mineral**

Urusan bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Bengkayang pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.642.149.257,00 atau sekitar 93,94%. Adapun Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
904.863.265,00	867.068.916,00	95,82
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		

1.	Meningkatnya pengendalian dan perencanaan pembangunan sektor pertambangan melalui pengawasan pelaksanaan kegiatan pertambangan, pembinaan dan penyuluhan pertambangan, dan kegiatan koordinasi dan konsultasi perizinan pertambangan
2.	Tersediannya data dan informasi untuk perencanaan pembangunan yang efektif melalui pendataan potensi pertambangan, pemetaan wilayah pertambangan, dan kegiatan inventarisasi dan eksplorasi daerah perbatasan Kabupaten Bengkayang

**b. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
6.549.320.000,00	6.266.208.382,00	95,68
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya jumlah KK yang dapat menikmati listrik melalui kegiatan pengembangan dan penambahan jaringan listrik di Kabupaten Bengkayang, dan kegiatan pengadaan jaringan listrik tenaga microhydro (PLTMH)	

**c. Program Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM)**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
64.359.392,00	22.290.600,00	34,63
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Tertatanya distribusi BBM di Kabupaten Bengkayang melalui pengawasan dan pengendalian distribusi BBM	
2.	Terwujudnya perencanaan pendistribusian yang efektif melalui kegiatan sosialisasi, penyusunan dan koordinasi regulasi HET, BBM, dan LPG bersubsidi di Kabupaten Bengkayang.	

**17. Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan**

Urusan bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp.

6.812.683.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.638.263.878,00 atau sekitar 97,44 %. Adapun Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
468.164.500,00	468.109.500,00	99,99
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Terwujudnya perlindungan konsumen di Kabupaten Bengkayang melalui pengawasan peredaran barang dan jasa, dan monitoring harga sembako dan barang strategis lainnya	
2.	Terwujudnya perdagangan yang tertata melalui kegiatan fasilitasi pasar murah, fasilitasi pembentukan BPSK, dan sosialisasi kemetrolgian	

**b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
2.752.439.550,00	2.613.414.685,00	94,95
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya jaringan pasar perdagangan dalam negeri melalui pengembangan pasar dan distribusi produk, penataan halaman pasar tradisional Jagoi Babang, dan pembuatan akses jalan menuju ruko pasar	
2.	Meningkatnya fasilitas pemasaran melalui kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan pasar dan pengadaan tenda	

**c. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
1.033.430.260,00	1.029.310.850,00	99,60
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		

1.	Berkembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Bengkayang melalui kegiatan pengembangan industri kreatif, fasilitasi kerjasama regional, dan monitoring industri kecil dan menengah (IKM) dan pembinaan industri pengolahan
2.	Meningkatnya fasilitas pendukung IKM Kabupaten Bengkayang melalui gelar potensi kerajinan IKM, pembangunan gedung kantor dekranasda Kabupaten Bengkayang, peningkatan gedung galeri dekranasda, fasilitasi penerapan dan partisipasi mengikuti konvensi GKM, dan kegiatan fasilitasi dan pengembangan produk kerajinan daerah.

**d. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Pontensial**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
42.230.000,00	42.230.000,00	100,00
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya beberapa industri potensial Kabupaten Bengkayang melalui optimalisasi pemanfaatan mesin dan peralatan produksi	

**e. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
488.050.872,00	479.459.020,00	98,24
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya publikasi usaha UMKM Kabupaten Bengkayang melalui promosi produk UMKM, sosialisasi temu UKM dan BUMN, dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program UMKM.	
2.	Terwujudnya iklim yang mendukung bagi pengembangan koperasi di Kabupaten Bengkayang melalui kegiatan sosialisasi UU tentang perkoperasian, koordinasi peningkatan koperasi, dan penyelenggaraan promosi produk koperasi dan usaha kecil	

**f. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
193.956.803,00	192.804.458,00	99,41

Hasil dan manfaat yang diperoleh:	
1.	Meningkatnya peran koperasi pada pembangunan ekonomi daerah melalui kegiatan pelaksanaan kebijakan dan program koperasi, sosialisasi pembentukan koperasi perkebunan, dan pendataan koperasi se Kabupaten Bengkayang.

**g. Program Peningkatan Mutu dan Kualitas Kelompok**

<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
90.133.136,00	85.415.737,00	94,77
Hasil dan manfaat yang diperoleh:		
1.	Meningkatnya pemberdayaan kelompok melalui pelatihan aneka produk, dan pameran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.	
2.	Meningkatnya motivasi kelompok melalui kegiatan lomba administrasi UP2K dan pelatihan UP2K pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.	

**2.3 Capaian Indikator Utama Pembangunan**

Indikator kinerja utama daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan daerah dalam melaksanakan pembangunan pada setiap tahunnya yang meliputi beberapa aspek utama yang dapat dijadikan indikator. Gambaran kondisi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang secara singkat adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
	2011	2012	2013
PDRB ADHB (Rp Juta)	2.642.559,66	2.958.540,74	3.343.768,92
PDRB ADHK (Rp Juta)	1.232.061,70	1.302.743,89	1.381.375,85
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,65	5,74	6,04
Pengeluaran Per Kapita (Rp Ribu)	606,88	609,85	612,23
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,98	68,50	69,38

- 1) mendorong peningkatan dan perluasan sektor andalan pertanian dalam arti luas yaitu: pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata;
- 2) peningkatan infrastruktur terutama jalan, jembatan, irigasi, gedung-gedung dan sarana prasarana perdagangan dan pariwisata;
- 3) memberdayakan UMKM dan koperasi sebagai pilar perekonomian daerah;
- 4) meningkatkan upaya promosi investasi; dan
- 5) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis di daerah perbatasan.

### **3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015**

Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kondisi perekonomian di Kabupaten Bengkayang secara umum menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu Tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 nilai nominal PDRB Kabupaten Bengkayang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2012 nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bengkayang mencapai Rp. 1.302.743,89 juta dan meningkat menjadi Rp. 1.381.375,85 juta pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bengkayang pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 6,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2014 dan 2015 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang kembali akan meningkat namun tidak begitu berbeda nyata. Hipotesis ini berdasarkan pada kondisi perekonomian dunia yang masih belum stabil, namun hal yang menjadikan peluang ada peningkatan dikaji dari sudah mulai terbukanya aksesibilitas beberapa wilayah di Kabupaten Bengkayang yang sebelumnya masih terisolasi. Kondisi tersebut tentunya akan berpengaruh pada meningkatnya arus perekonomian dan kegiatan masyarakat secara umum di Kabupaten Bengkayang terutama pada daerah yang sebelumnya masih terisolasi.



### 3.1.2 Isu Strategis 2016

Di tahun 2015 dan 2016 perekonomian global diperkirakan meningkat namun masih pada taraf relatif melemah. Beberapa isu strategis utama tahun 2016 yang sudah mengemuka baik yang berskala global, nasional, maupun regional Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang antara lain:

1. Kondisi perekonomian global 2016 diperkirakan sedikit meningkat, terutama didorong oleh perekonomian negara maju. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain : resiko dampak kenaikan suku bunga The Fed masih menjadi resiko pemulihan ekonomi berbagai negara, kenaikan FFR dapat mengurangi impor AS dan menghambat pertumbuhan perdagangan dunia, gejolak likuiditas global akibat kenaikan FFR dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi di negara lain, ekonomi Tiongkok diperkirakan kembali melambat dan menjadi *downside risk* pertumbuhan ekonomi EM disekitarnya (ASIA). Hal ini menyebabkan harga komoditas global menunjukkan tren pelemahan seiring dengan menurunnya permintaan global/internasional yang berpengaruh pada harga pasar dunia beberapa komoditas unggulan daerah Kabupaten Bengkayang yang fluktuatif dan ikut menurun, seperti komoditas produk karet dan CPO.
2. Kebijakan Nasional yang mengarah pada percepatan pemenuhan ketersediaan Infrastruktur termasuk pasokan listrik. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas. Dimana Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan.
3. Isu berskala regional Kalimantan Barat antara lain:
  - a) peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian secara umum;
  - b) perlunya peningkatan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan;
  - c) industrialisasi dan pengembangan lapangan kerja;

- d) percepatan peningkatan kualitas infrastruktur jalan serta jaringan listrik;
  - e) peningkatan investasi daerah; dan
  - f) peningkatan kualitas SDM.
4. Isu yang berskala lokal Kabupaten Bengkayang antara lain:
- a) percepatan pembangunan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, peningkatan kualitas SDM melalui sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan;
  - b) peningkatan infrastruktur jalan, jaringan listrik dan sarana air bersih yang masih rendah aksesibilitasnya terutama di beberapa daerah seperti Kecamatan Siding, Suti Semarang, dan Kecamatan Lembah Bawang;
  - c) perlunya pengurangan pada angka kemiskinan dan pengangguran;
  - d) pembangunan daerah perbatasan; dan
  - e) perlunya peningkatan IPM melalui elemen pendidikan dan perekonomian masyarakat.

### **3.1.3 Analisis Lingkungan (SWOT)**

Untuk mempertajam arah kebijakan perekonomian dan ketepatan dalam menentukan suatu prioritas pembangunan, maka diperlukan strategi pembangunan yang selalu mempertimbangkan kondisi lingkungan Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan pendekatan Kekuatan, Kelamahan, Peluang, dan Ancaman (SWOT) yang secara detailnya dideskripsikan sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strenght*)
  - a. Letak geografis yang strategis
  - b. Memiliki geomorfologi yang cukup lengkap dari pegunungan, bukit, dataran, dan pesisir
  - c. Memiliki daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain (Malaysia), sekaligus daerah perbatasan darat yang paling dekat jaraknya dengan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat jika dibandingkan daerah perbatasan Kabupaten Lainnya.

- d. Terdapat beberapa perusahaan perkebunan skala besar yang cukup banyak (perkebunan kelapa sawit)
  - e. Memiliki potensi yang besar untuk pengembangan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
  - f. Memiliki potensi ekowisata yang sangat besar dan masih alami
  - g. Memiliki kawasan taman nasional dan hutan lindung yang relatif luas.
  - h. Memiliki sumber energi alam yang berpotensi untuk dimanfaatkan untuk tenaga listrik dan sumber kebutuhan dasar akan sumber air.
2. Kelemahan (*Weakness*)
- a. Produktivitas hasil sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang belum optimal
  - b. Potensi ekowisata yang masih belum dimanfaatkan secara optimal
  - c. Kondisi infrastruktur jalan/jembatan masih masih terbatas pada sebagian besar wilayah di Kabupaten Bengkayang berimplikasi kurang optimalnya kegiatan perekonomian daerah dan kurang berakibat juga pada terhambatnya pelayanan kesehatan dan pendidikan.
  - d. Kualitas sumberdaya manusia yang masih terbatas secara pendidikan formal dan masih banyak angkatan kerja yang belum memiliki ketrampilan dan keahlian untuk profesionalisme kerja
  - e. Sebagian besar usaha perekonomian rakyat masih pada eksploitasi alam dan penyediaan bahan baku (on farm), dan yang bergerak pada bidang industri hilir masih sangat minim. Pada akhirnya perekonomian masyarakat masih memiliki nilai tambah yang kecil.
  - f. Tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan masih relatif rendah.
  - g. Pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat sebagian besar masih belum mengarah pada pemanfaatan yang berkelanjutan (*sustainability*).

- h. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pembenahan pada sanitasi lingkungan masih kurang.
  - i. Terdapat beberapa kawasan rawan bencana banjir dan tanah longsor.
  - j. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung peluang masuknya investasi.
3. Peluang (*Opportunity*)
- a. Adanya political will secara nasional untuk memajukan kualitas sumberdaya manusia Indonesia melalui prioritas pembangunan pendidikan dan kesehatan
  - b. Adanya program nasional percepatan pembangunan infrastruktur wilayah di bidang kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan/perumahan rakyat dan energi
  - c. Adanya program nasional pengentasan kemiskinan dan percepatan pembangunan daerah tertinggal/desa tertinggal
  - d. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberikan peluang untuk mengapresiasi kebutuhan masyarakat dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah
  - e. Kapasitas APBD yang rendah masih berpeluang menggali PAD dan mendapatkan bantuan program, dana dekonsentrasi/tugas perbantuan dan bantuan dari lembaga lain.
  - f. Adanya kebijakan nasional yang memprioritaskan pembangunan daerah yang memiliki kawasan perbatasan dengan negara lain dengan mengarahkan perbatasan sebagai beranda depan negara
  - g. Adanya kegiatan perdagangan tradisional antara dua negara yang berbatasan di daerah perbatasan, dengan pengelolaan yang efektif hal ini tentu menjadi peluang besar bagi perekonomian daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkayang terutama masyarakat yang tinggal di perbatasan.
4. Ancaman (*Threats*)

- a. Globalisasi dan perdagangan bebas merupakan ancaman sekaligus tantang untuk terus kreatif dan inovatif dalam memproduksi barang dan jasa yang memiliki daya saing
- b. Fluktuasi harga minyak dan perekonomian dunia yang masih terasa dampaknya sampai saat ini berdampak pada perekonomian secara nasional dan daerah. Hal ini perlu disikapi dengan penguatan struktur perekonomian domestik dan penguatan ketahanan pangan masyarakat
- c. Aktivitas perekonomian masyarakat dan kelembagaan ekonomi lainnya yang terus menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup perlu ditangani dengan tegas agar tidak menjadi penyebab kerugian di masa depan dan menjadi halangan dalam menciptakan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan
- d. Masih terdapat beberapa daerah yang tertinggal dan terisolasi karena terbatasnya sarana infrastruktur merupakan kondisi yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Untuk itu peningkatan aksesibilitas beberapa daerah merupakan program yang memiliki prioritas tinggi di Kabupaten Bengkayang.
- e. Daerah perbatasan merupakan kekuatan sekaligus ancaman bagi Kabupaten Bengkayang, mengingat aktivitas perekonomian masyarakat yang terjadi di kawasan perbatasan sangat memungkinkan terjadinya beberapa aktivitas yang bersifat ilegal yang secara regional akan sangat merugikan Kabupaten Bengkayang. Memperhatikan hal tersebut tata kelola yang efektif diperlukan bagi pengelolaan dan pembangunan di kawasan perbatasan.

#### **3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2015-2016**

Tantangan dalam pembangunan perekonomian Tahun 2015-2016 diperkirakan sebagai berikut:

1. Tahun 2015 merupakan tahun politik dimana akan diselenggarakan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bengkayang yang tentunya akan terdapat kebijakan-kebijakan pembangunan baru yang dapat

berpengaruh pada sektor perekonomian daerah Kabupaten Bengkayang.

2. Semakin ketatnya persaingan global dan membanjirnya produk impor sebagai pesaing produk lokal akan berpotensi menjadi penghambat pertumbuhan produksi dan melemahkan pasar lokal dan daya saing produk daerah.
3. Keterbatasan infrastruktur terutama jalan dan jembatan tentunya berdampak pada kurang optimalnya pengembangan investasi baik pada industri maupun pariwisata.
4. Minimnya kelembagaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan ketrampilan dan keahlian angkatan kerja merupakan salah satu variabel penghambat dalam meningkatkan percepatan perekonomian melalui sektor sekunder dan tersier.
5. Masih diperlukannya upaya yang komprehensif dan terpadu lintas sektoral dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin dan pengurangan pengangguran.
6. Diperlukannya suatu kegiatan yang terpadu dalam mengoptimalkan sektor unggulan dan komoditas unggulan daerah agar menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi.
7. Sarana dan prasarana perekonomian dan pariwisata yang masih perlu ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya agar dapat memperoleh hasil yang optimal.
8. Pelayanan publik dirasakan belum memuaskan dan sumber pembiayaan masih sangat terbatas serta tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Bengkayang tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014, maka prospek perekonomian tahun 2015-2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PDRB ADHB pada tahun 2015 diprediksi akan menjadi Rp. 4.216.481,37 Juta dan pada tahun 2016 akan meningkat menjadi Rp. 4.736.774,81 Juta.

2. PDRB ADHK pada tahun 2015 diprediksi akan menjadi Rp. 1.535.985,97 Juta dan pada tahun 2016 akan meningkat menjadi Rp. 1.620.148,64 Juta.
3. Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 dan 2016 diperkirakan akan tetap mengalami perbaikan yaitu diperkirakan tumbuh hingga 6,59%-5,95% dan tahun 2016 tumbuh hingga 5,95%-6,05%.
4. Pengeluaran perkapita pada tahun 2015 diprediksi sebesar Rp. 617,05 Ribu dan tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 618,97 Ribu.
5. Indeks Pembangunan Manusia tahun 2015 diprediksi sebesar 70,15 dan pada tahun 2016 menjadi 70,37.

Dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 diperlukan kontribusi sektor-sektor andalan untuk menjadi penggerak perekonomian Kabupaten Bengkayang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**

Realisasi dan Prediksi Kontribusi Sektoral Perekonomian Kabupaten Bengkayang Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2012-2016

SEKTOR	Realisasi		Prediksi		
	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
Primer					
1. Pertanian	47,02	46,85	46,68	46,34	
2. Pertambangan dan Penggalan	1,67	1,66	1,67	1,67	
Sekunder					
3. Industri Pengolahan	3,78	3,84	3,90	3,96	
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,12	0,13	0,13	0,13	
5. Bangunan	8,17	8,19	8,22	8,25	
Tersier					
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	24,55	24,60	24,75	24,80	
7. Pengangkutan & Komunikasi	2,80	2,80	2,80	2,80	
8. Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	4,16	4,16	4,18	4,20	
9. Jasa-jasa	7,74	7,77	7,80	7,85	

Catatan:

\*) merupakan hasil analisis dari beberapa sumber data dan informasi

## **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

### **3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Bengkayang secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalian Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber PAD merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAK, DAU, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 kelompok yaitu PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada:

1. mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;



2. mengoptimalkan kinerja BUMD dalam memberikan pelayanan publik sehingga berpengaruh positif pada pendapatan daerah secara langsung maupun tidak langsung;
3. Pembaruan data base dan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah;
4. Mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah;
5. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap menjaga agar tidak terjadi ekonomi biaya tinggi yang memberatkan masyarakat.

Berikut adalah hasil analisis realisasi, target dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bengkayang:

**Tabel 3.2**

**Realisasi, Target, dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2013 s/d Tahun 2016**

No.	Uraian Pendanaan	Realisasi		Target 2015	Proyeksi 2016
		2013	2014		
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>668.751.827.151,24</b>	<b>752.421.088.862,26</b>	<b>827.461.560.040,00</b>	<b>841.357.395.444,00</b>
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>15.218.389.586,24</b>	<b>36.807.115.137,35</b>	<b>34.800.000.000,00</b>	<b>39.856.553.178,00</b>
1.1.1	<i>Pendapatan Pajak Daerah</i>	<i>6.150.675.417,38</i>	<i>8.900.909.054,04</i>	<i>9.805.000.000,00</i>	<i>11.116.553.178,00</i>
1.1.2	<i>Pendapatan Retribusi Daerah</i>	<i>7.442.363.470,63</i>	<i>13.076.441.317,71</i>	<i>7.255.000.000,00</i>	<i>10.000.000.000,00</i>
1.1.3	<i>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</i>	<i>1.625.350.690,23</i>	<i>1.746.813.511,13</i>	<i>2.500.000.000,00</i>	<i>3.500.000.000,00</i>
1.1.4	<i>Lain-lain PAD yang sah</i>	<i>7.460.422.387,46</i>	<i>13.082.951.254,47</i>	<i>15.240.000.000,00</i>	<i>15.240.000.000,00</i>
1.2	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>573.787.506.295,00</b>	<b>617.478.031.084,00</b>	<b>643.919.894.000,00</b>	<b>693.325.652.930,00</b>
1.2.1	<i>Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak</i>	<i>31.713.340.295,00</i>	<i>33.831.000.084,00</i>	<i>30.236.873.000,00</i>	<i>31.748.716.650,00</i>
1.2.2	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>457.245.355.000,00</i>	<i>494.245.071.000,00</i>	<i>529.863.441.000,00</i>	<i>572.252.516.280,00</i>
1.2.3	<i>Dana Alokasi Khusus</i>	<i>84.828.811.000,00</i>	<i>89.401.960.000,00</i>	<i>83.819.580.000,00</i>	<i>89.324.420.000,00</i>
1.3	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>79.745.931.270,00</b>	<b>98.135.942.640,91</b>	<b>148.741.666.040,00</b>	<b>108.175.189.336,00</b>

1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	18.756.047.270,00	17.753.239.640,91	20.727.413.621,00	20.447.137.336,00
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	38.133.684.000,00	40.096.503.000,00	87.728.052.000,00	87.728.052.000,00
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	22.856.200.000,00	40.286.200.000,00	40.286.200.419,00	

Catatan:

\*) merupakan hasil analisis dari beberapa sumber data dan informasi

\*\*) dalam perkembangannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam penyusunan KUA dan PPAS

Berdasarkan trend yang terjadi pada pendapatan daerah 3 tahun sebelumnya, maka dapat dianalisis menggunakan beberapa pendekatan yang sederhana dalam memproyeksi beberapa sumber pendapatan yang akan diperoleh Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2016. Sumber pendapatan daerah yang mengalami peningkatan pada proyeksi tahun 2016 terjadi pada pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Untuk proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari PAD Kabupaten Bengkayang diasumsikan mengalami peningkatan, mengingat target pada tahun 2015 mengalami penurunan, yaitu sekitar 5,45% dari realisasi PAD tahun 2014. Sedangkan untuk dana perimbangan, target pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 4,28% dari realisasi dana perimbangan tahun 2014. Peningkatan dana perimbangan Kabupaten Bengkayang pada 2 tahun terakhir (2014 dan 2015) mengalami penurunan dari 7,61% peningkatan tahun 2014 menjadi 4,28% tahun 2015. Dengan informasi tersebut diasumsikan peningkatan dana perimbangan pada tahun 2016 juga mengalami penurunan sekitar 79,11 % dari trend pertumbuhan dana perimbangan tahun 2014 dan 2015, sehingga peningkatan dana perimbangan tahun 2016 diproyeksi sebesar 7,67% dari tahun 2015. Berdasarkan kajian tersebut maka total perolehan dana perimbangan Kabupaten Bengkayang pada tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp. 693.325.652.930,00.

Sumber pendapatan daerah yang mengalami penurunan pada proyeksi tahun 2016 terjadi pada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Walaupun target pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 51,57% terhadap realisasi anggaran yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2014. Dimana target pada tahun 2015 pada sektor

dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya mengalami peningkatan sebesar 16,75% dari realisasi tahun 2014. Selain itu target tahun 2015 pada sektor dana penyesuaian dan otonomi khusus juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 118,79% dari realisasi tahun 2014.

Sumber dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya tidak di proyeksikan/dianggarkan pada tahun 2016 dengan tujuan untuk mengantisipasi inkonsistensi pada sektor pendapatan yang sangat tinggi dengan asumsi bahwa nilai bantuan provinsi tidak memiliki trend tertentu disetiap tahunnya, karena tergantung dengan kondisi keuangan dari APBD Provinsi Kalimantan Barat, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana bantuan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya ini memiliki nilai yang tidak pasti. Apabila terjadi peningkatan/pengurangan dana bantuan pada sektor ini maka akan mengakibatkan perubahan anggaran bagi setiap SKPD yang mendapat dana bantuan tersebut yang sangat jelas akan mempengaruhi proyeksi anggaran pada tahun tersebut. Selain itu, program/kegiatan yang didanai bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya ini tidak dapat direncanakan dalam Renja SKPD, karena kegiatannya telah ditentukan oleh Provinsi. Hal inilah yang menjadi faktor menurunnya proyeksi dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2016.

Dengan demikian pada tahun 2016 pendapatan daerah Kabupaten diperkirakan meningkat sebesar 1,68 % dari tahun 2015, atau dengan kata lain proyeksi pendapatan total daerah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 841.357.395.444,00.

### **3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan umum anggaran belanja pembangunan daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Kemampuan anggaran belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun 2016 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Membiayai urusan yang bersifat *mandatory* dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membiayai urusan wajib dan pilihan dengan mengutamakan bidang pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perekonomian, pariwisata dan lingkungan hidup dengan mengutamakan jalan dan jembatan serta sarana perhubungan lainnya;
4. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor andalan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata;
5. Memenuhi komitmen kerjasama/kemitraan pembangunan dan pembiayaan;
6. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Bengkayang. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan palayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah. Berikut adalah hasil analisis realisasi, plafon, dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Bengkayang:

**Tabel 3.3**

Realisasi, Plafon dan Proyeksi Belanja daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 s/d 2016

No.	Uraian Pendanaan	Realisasi		Plafon 2015	Proyeksi 2016
		2013	2014		
1	2	3	4	5	7
2	<b>BELANJA</b>	<b>620.299.718.904,21</b>	<b>806.042.638.062,75</b>	<b>843.693.463.725,00</b>	<b>858.567.795.150,00</b>
2.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>299.192.095.888,71</b>	<b>343.286.124.770,75</b>	<b>436.032.939.825,00</b>	<b>492.653.839.250,00</b>
2.1.1	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>263.625.785.913,71</i>	<i>288.233.789.498,75</i>	<i>359.235.843.825,00</i>	<i>380.334.358.063,00</i>
2.1.5	<i>Belanja Hibah</i>	<i>11.880.413.500,00</i>	<i>26.911.796.450,00</i>	<i>25.600.000.000,00</i>	<i>8.500.000.000,00</i>
2.1.6	<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	<i>5.704.000.000,00</i>	<i>4.953.000.000,00</i>	<i>5.000.000.000,00</i>	<i>4.000.000.000,00</i>
2.1.7	<i>Belanja Bantuan Keuangan</i>	<i>17.712.457.239,00</i>	<i>23.027.538.822,00</i>	<i>44.197.096.000,00</i>	<i>97.819.481.187,00</i>
2.1.8	<i>Belanja Tak Terduga</i>	<i>269.439.236,00</i>	<i>160.000.000,00</i>	<i>2.000.000.000,00</i>	<i>2.000.000.000,00</i>
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>321.107.623.015,50</b>	<b>462.756.513.292,00</b>	<b>407.660.523.900,00</b>	<b>365.913.955.900,00</b>
2.2.1	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>27.789.686.490,00</i>	<i>36.577.985.355,00</i>	<i>41.727.959.365,00</i>	<i>32.001.250.000,00</i>
2.2.2	<i>Belanja Barang</i>	<i>146.710.765.332,50</i>	<i>150.941.192.792,00</i>	<i>186.131.151.001,66</i>	<i>136.131.151.000,00</i>
2.2.3	<i>Belanja Modal</i>	<i>146.607.171.193,00</i>	<i>275.237.335.145,00</i>	<i>179.801.413.533,34</i>	<i>197.781.554.900,00</i>

Catatan:

\*) merupakan hasil analisis dari beberapa sumber data dan informasi

\*\*) dalam perkembangannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam penyusunan KUA dan PPAS

Berdasarkan trend belanja daerah beberapa tahun sebelumnya dan memperhatikan beberapa realisasi belanja setiap SKPD serta pergerakan SILPA pada tahun sebelumnya, maka proyeksi belanja daerah tahun 2016 dapat dilakukan beberapa kajian. Untuk belanja modal, proyeksi pada tahun 2016 menggunakan data trend 2 tahun sebelumnya dengan asumsi peningkatan belanja sebesar 10,00% dari besaran belanja modal pada tahun 2015. Kondisi belanja tahun 2015 terjadi penurunan pada belanja modal yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Dimana peningkatan belanja modal Kabupaten Bengkayang pada 2 tahun terakhir (2014 dan 2015) mengalami penurunan, dari 100,24% peningkatan tahun 2014 menjadi turun sebesar 34,67% di target tahun 2015. Untuk itu kajian untuk proyeksi pembelanjaan daerah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2016 harus

mempertimbangkan hal tersebut agar hasil proyeksi yang diperoleh tidak memiliki deviasi yang terlalu tinggi, dimana berdasarkan hasil proyeksi belanja tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 1,78% atau Rp. 858.567.795.150,00 dari rencana belanja tahun 2015.

Pergerakan yang fluktuatif dan relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan mengarahkan pada beberapa sumber belanja diproyeksikan tidak berubah pada tahun 2016, yaitu pada belanja tak terduga.

Pada belanja tidak langsung, beberapa item belanja yang diproyeksikan meningkat di tahun 2016 adalah belanja pegawai dan belanja bantuan keuangan. Berdasarkan trend belanja pegawai tahun 2014 dan 2015, terjadi peningkatan dari trend 9,33% (belanja pegawai sebesar Rp. 288.233.789.498,75) di tahun 2014 menjadi 24,63% (belanja pegawai sebesar Rp. 359.235.843.825,-) di tahun 2015. Namun pada proyeksi tahun 2016, trend belanja pegawai menurun menjadi 5,87% (sebesar Rp.380.334.358.063,00) dari rencana tahun 2015. Pertimbangan kenaikan belanja pegawai khususnya belanja gaji pada proyeksi tahun 2016, didasarkan pada penerimaan SK CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang di tahun 2015 yang otomatis akan mengakibatkan penambahan belanja gaji pegawai ditahun 2016. Sedangkan untuk belanja bantuan keuangan, rencana belanja tahun 2015 sebesar Rp. 44.197.096.000,00 dan diproyeksikan pada tahun 2016 meningkat sangat signifikan sebesar 121,33% atau sebesar Rp. 97.819.481.187,00, dimana peningkatan belanja bantuan keuangan ini berasal dari sektor bantuan Alokasi Dana Desa (ADD).

Adapun alokasi belanja tidak langsung yang mengalami penurunan yaitu terdapat pada sektor belanja hibah dan bantuan sosial, dimana pada proyeksi belanja hibah tahun 2016 yang diproyeksikan Rp. 8.500.000.000,00 menurun sebesar 66,80% dari plafon belanja hibah tahun 2015 sebesar Rp. 25.600.000.000,00. Untuk belanja bantuan sosial, alokasi belanja di tahun 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar 20%, sehingga proyeksi belanja bantuan sosial pada tahun 2016 sebesar Rp. 4.000.000.000,00

Pada sektor belanja langsung, item belanja yang mengalami penurunan pada proyeksi tahun 2016 adalah belanja pegawai dan belanja barang dari tahun 2015. Untuk belanja pegawai, dari trend belanja pegawai

di tahun 2015 meningkat sebesar 14,08% namun pada proyeksi di tahun 2016 menurun sebesar 23,31%. Sedangkan pada belanja barang, angka trend di tahun 2015 meningkat sebesar 23,31% dan di tahun 2016 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 26,86%.

Berdasarkan hasil proyeksi secara keseluruhan maka belanja daerah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2016 diperkirakan secara keseluruhan sebesar Rp. 858.567.795.150,00. Sedangkan total dari belanja langsung Kabupaten Bengkayang pada tahun 2016 diproyeksikan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
Proyeksi Belanja Langsung Kabupaten Bengkayang Tahun 2016

No.	Uraian Belanja Langsung	Angka Proyeksi Tahun 2016 (Rp)
1	Belanja Pegawai	32.001.250.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa	136.131.151.000,00
3	Belanja Modal	197.781.554.900,00
Total		365.913.955.900,00

*Sumber: Analisis Bappeda 2015*

### 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan terkait dengan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan kondisi keuangan daerah. Adapun arah kebijakan penerimaan pembiayaan sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan anggaran SILPA agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil berdasarkan ketentuan yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan;

2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah sebagai upaya peningkatan sumber pembiayaan dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas. Untuk itu strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan Kas dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau SILPA tahun berjalan;
2. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari SILPA tahun lalu dan melakukan efisiensi dan penghematan belanja;
3. Apabila SILPA tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Berikut adalah hasil analisis realisasi, rencana, dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Bengkayang:

**Tabel 3.5**

Realisasi, Rencana, dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 s/d 2016

No.	Uraian Pendanaan	Realisasi		Rencana 2015	Proyeksi 2016
		2013	2014		
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	63.682.124.890,03	114.650.669.563,52	25.000.000.000,00	24.615.957.856
3.1.1	Penggunaan SILPA	63.263.389.432,31	114.650.669.563,52	25.000.000.000,00	24.615.957.856
3.1.7	Penerimaan Kembali	418.735.457,72	0	0	0



<i>Investasi Dana Bergulir</i>					
3.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5.074.187.722,00</b>	<b>4.628.801.900,00</b>	<b>8.768.096.315,00</b>	<b>7.405.558.150</b>
3.2.2	<i>Penyertaan Modal</i>	<i>3.500.000.000,00</i>	<i>4.000.000.000,00</i>	<i>4.875.000.000,00</i>	<i>1.750.000.000</i>
3.2.3	<i>Pembayaran Pokok Utang</i>	<i>1.574.187.722,00</i>	<i>628.801.900,00</i>	<i>3.893.096.315,00</i>	<i>5.655.558.150</i>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>58.607.937.168,03</b>	<b>110.021.867.663,52</b>	<b>16.231.903.685,00</b>	<b>17.210.399.706,00</b>
	<b>Pendapatan-Belanja</b>	<b>56.054.067.795,49</b>	<b>-53.621.549.200,49</b>	<b>-16.231.903.685,00</b>	<b>-17.210.399.706,00</b>
	<b>SILPA Tahun Berkenaan</b>	<b>114.662.004.963,52</b>	<b>56.400.318.463,03</b>		

Catatan:

\*) merupakan hasil analisis dari beberapa sumber data dan informasi

\*\*) dalam perkembangannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam penyusunan KUA dan PPAS

Pembiayaan Kabupaten Bengkayang tahun 2016 diproyeksikan mengalami perubahan dari tahun sebelumnya pada fungsi atau variabel pengeluaran pembiayaan, dimana pada sektor penyertaan modal mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 65,10% terhadap target penyertaan modal di tahun 2015, selain itu pada sektor pembayaran pokok hutang mengalami peningkatan sebesar 45,27% terhadap target pembayaran pokok hutang di tahun 2015.

Pada penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan adalah pada pergerakan besaran SILPA pada tahun sebelumnya dan tergantung pada pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkayang pada tahun berjalan. Setelah melalui kajian dan perhitungan, maka pembiayaan Netto Kabupaten Bengkayang pada tahun 2016 diproyeksikan defisit sebesar (Rp.17.210.399.706,00). Kondisi defisit tersebut dapat diimbangi oleh selisih antara proyeksi pendapatan dan proyeksi belanja daerah pada tahun 2016. Apabila realisasi pendapatan dan belanja Kabupaten Bengkayang pada tahun 2016 adalah sebesar 100% sesuai dengan hasil proyeksi pada RKPD 2016 maka pendapatan dan belanja daerah akan mengalami keseimbangan atau dengan kata lain SILPA pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp 0,00.

## **BAB IV**

### **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 bahwa dalam hal penyusunan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah perlu adanya keselarasan baik antara dokumen perencanaan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini mulai dari dokumen Jangka Panjang (RPJPD), Jangka Menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD). Oleh karenanya dalam penyusunan RKPD selalu mengacu dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah daerah.

Ditahun 2016 Kabupaten Bengkayang akan memasuki periode RPJMD ke-3 dari masa RPJPD 2005-2025 dimana didalam Perencanaan Jangka Panjang Daerah telah menetapkan tahapan dan Prioritas Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Bengkayang periode 2005-2025. Pentahapan ini disusun dalam periode 5 tahunan untuk menyesuaikan dengan masa jabatan kepala Daerah terpilih. Didalam setiap tahapan telah memuat arah dan Prioritas Pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Dalam hal penyusunan dokumen perencanaan ditahun 2016, pentahapan ini juga yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkayang periode 2016-2020 serta turunannya RKPD Kabupaten Bengkayang tahun 2016.

Didalam Periode Ke-3 RPJPD Kabupaten Bengkayang 2005-2025 rencana pembangunan diarahkan pada pemantapan landasan pembangunan dengan menekankan kepada penciptaan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif dan professional, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi dalam pembangunan.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka prioritas pembangunan RPJPD pada periode ini ditekankan pada 6 (enam) aspek, yaitu :

1. Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan
2. Peningkatan daya saing produk-produk unggulan kabupaten Bengkayang
3. Penerapan teknologi tepat guna diberbagai sector-sektor produksi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup

4. Pembangunan prasarana dan sarana yang berdampak langsung pada pengembangan ekonomi daerah khususnya dikawasan perbatasan
5. Pembangunan prilaku hidup sehat yang dewasa dan mandiri
6. Penataan dan pembenahan manajemen pengelolaan potensi objek-objek wisata.

Melihat arah kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan didalam RPJPD Periode ke-3 tersebut, maka sebagai tahap awal Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa prioritas pembangunan didalam RKPD yang akan menjadi arah penyusunan Program dan Kegiatan pada tahun 2016.

#### **4.1 Arah Kebijakan Pembangunan**

Tema pembangunan yang diangkat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 adalah ***“Pembangunan Berorientasi pada Pembentukan Masyarakat yang Berdaya Saing”***. Tema ini mengarahkan pembangunan berorientasi kepada masyarakat dengan penekanan pada hasil atau dampak pembangunan itu sendiri yaitu membentuk masyarakat yang memiliki daya saing.

Tema yang telah ditetapkan merupakan sebuah gambaran umum arah pembangunan yang harus dilaksanakan dan secara teknis akan berimplikasi pada kebijakan, prioritas, dan fokus pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Bengkayang pada tahun 2016.

Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan Arah Pembangunan Pusat dan Daerah dengan mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Pusat di tahun 2016.
2. Menyelenggarakan urusan-urusan wajib dan pilihan yang merupakan amanat nasional dan otonomi daerah
3. Mengedepankan pembangunan Infrastruktur Dasar yang belum terselesaikan sehingga berdampak dalam mendorong IPM Kabupaten Bengkayang.

4. Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat dengan Pengembangan Potensi dimasing-masing daerah Kecamatan.
5. Optimalisasi sector pendapatan daerah dengan membenahan data potensi pendapatan daerah
6. Pengembangan Teknologi Informasi dalam seluruh tatanan Birokrasi sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi Manajemen Kerja (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan).

#### 4.2 Prioritas Pembangunan

Berdasarkan kondisi pembangunan beberapa tahun sebelumnya dan mempertimbangkan informasi terkait kondisi Kabupaten Bengkayang saat ini dengan perangkat pendekatan analisis (faktor eksternal dan internal) serta memperhatikan kebijakan umum pembangunan Tahun 2016, maka telah ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Bengkayang untuk tahun 2016:

**Tabel 4.2.1**  
**SKPD PENANGGUNG JAWAB BERDASARKAN PRIORITAS DAN SUBPRIORITAS PEMBANGUNAN**

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SUB PRIORITAS	SKPD TERKAIT
1	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur pendukung perekonomian Daerah dan pelayanan pendidikan dan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dengan aktifitas ekonomi masyarakat</li> <li>2. Pembangunan infrastruktur Sumber daya air dan Pengairan</li> <li>3. Pembangunan Kelistrikan dan Sumber energy terbarukan</li> <li>4. Pembangunan perumahan, pemukiman dan infrastruktur Sanitasi</li> <li>5. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DINAS PU</li> <li>2. DINAS ESDM</li> <li>3. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</li> </ol>
2	Memacu pertumbuhan ekonomi melalui sector sekunder dan tersier serta optimalisasi Pemanfaatan Potensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan pertumbuhan sector pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan</li> <li>2. Percepatan pertumbuhan sector perdagangan, industry dan investasi</li> <li>3. Optimalisasi sector pariwisata terutama ekowisata</li> <li>4. Percepatan pertumbuhan koperasi dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DINAS PERTANIAN</li> <li>2. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN</li> <li>3. DINAS PARIWISATA</li> </ol>

	Dan Komoditas Unggulan Daerah	UMKM	DAN EKONOMI KREATIF 4. DINAS KOPERASI DAN UMKM 5. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 6. BADAN PENANAMAN MODAL. PELAYANAN DAN PERIJINAN TERPADU 7. BAPPEDA
3	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan	1. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan 2. Peningkatan kualitas aparatur bidang pendidikan 3. Peningkatan peranan pemuda dan prestasi olahraga 4. Pembentukan fasilitas pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah	1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2. KANTOR PERPUSTAKAAN , ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH 3. KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA 4. DINAS PEKERJAAAN UMUM
4	Peningkatan dan pemerataan Pelayanan Kesehatan	1. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan 2. Peningkatan kualitas aparatur bidang kesehatan 3. Pemerataan aparat pelaksana layanan kesehatan	1. DINAS KESEHATAN 2. RSUD KAB. BENGKAYANG
5	Dukungan terhadap ketahanan pangan dengan Penerapan teknologi tepat guna diberbagai sector produksi	1. Penguatan Fasilitas Pendukung Pertanian 2. Penguatan kelembagaan pendukung pertanian dan perikanan 3. Peningkatan Kualitas Petani dan Nelayan 4. peningkatan koordinasi lintas sektoral	1. DINAS PERTANIAN 2. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6	Peningkatan dan penataan fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian dan	1. Penguatan Regulasi penataan lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam 2. Perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup 3. Terwujudnya penataan lingkungan hidup sesuai dengan Rencana tata	1. BADAN LINGKUNGAN HIDUP 2. BAPPEDA

	keberlanjutan	ruang wilayah	
7	Reformasi mental birokrasi melalui peningkatan kualitas SDM dan penguatan aturan-aturan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas Aparat Birokrasi</li> <li>2. Penguatan regulasi daerah yang menjadi acuan aparatur birokrasi</li> <li>3. Peningkatan Kualitas dan standar pelayanan public</li> <li>4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</li> <li>5. Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi Bagi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SEKRETARIAT DAERAH</li> <li>2. SEKRETARIAT DPRD</li> <li>3. SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI</li> <li>4. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT</li> <li>5. DINAS KESEHATAN</li> <li>6. DINAS PERTANIAN</li> <li>7. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN</li> <li>8. DINAS PEKERJAAN UMUM</li> <li>9. RSUD BENGKAYANG</li> <li>10. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</li> <li>11. BAPPEDA</li> <li>12. BPKAD</li> <li>13. INSPEKTORAT</li> <li>14. DINAS DUKCAPIL</li> <li>15. BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU</li> <li>16. DINAS PENDAPATAN DAERAH</li> <li>17. DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</li> <li>18. DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERINDAG</li> </ol>

			19. DINAS ENERGI DAN SDM 20. DINAS PERHUBUNGAN , KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 21. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 22. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 23. BPBD 24. BADAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN PEMERINTAHA N DESA 25. BADAN PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 26. BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN WILAYAH TERTINGGAL 27. BADAN LINGKUNGAN HIDUP 28. KANTOR PERPUSTAKAA N, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH 29. KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA 30. KANTOR KESBANGPOLIN MAS 31. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 32. 17
--	--	--	---

			KECAMATAN 33. 2 KELURAHAN
8	Penegakan peraturan-peraturan daerah melalui penguatan unsur Penegakan Peraturan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakan Implementasi aturan-aturan daerah</li> <li>2. Peningkatan kualitas Aparatur daerah</li> <li>3. Peningkatan keamanan dan ketertiban serta pengurangan tindak criminal daerah</li> <li>4. Peningkatan koordinasi lintas sektoral</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SATPOL-PP</li> <li>2. KANTOR KESBANGPOLIN MAS</li> </ol>
9	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengentasan Kemiskinan dan Angka Pengangguran</li> <li>2. Perbaiki iklim ketenagakerjaan melalui pengarahan dan pembinaan kegiatan interpreneurship</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SEKRETARIAT DAERAH</li> <li>2. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</li> <li>3. BADAN PEMBERDAYAAN MASY DAN PEMDES</li> <li>4. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB</li> <li>5. DINAS PEKERJAAN UMUM</li> <li>6. 17 KECAMATAN</li> <li>7. 2 KELURAHAN</li> </ol>

Berdasarkan table diatas telah ditetapkan SKPD penanggung jawab dari setiap Prioritas pembangunan yang harus didukung pada tahun 2016. Selanjutnya setiap SKPD menjawab prioritas tersebut dengan menurunkannya didalam program-program pendukung pembangunan, sehingga dengan ditetapkan Program-program yang ada diharapkan sasaran Pemerintah daerah untuk tahun 2016 nantinya bisa tercapai.

Adapun Program-program pembangunan setiap SKPD dapat dilihat pada table berikut :



TABEL 4.2.2

PROGRAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SUB PRIORITAS	URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
KE-1	1. Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dengan aktifitas ekonomi masyarakat 2. Pembangunan infrastruktur Sumber daya air dan Pengairan	PEKERJAAN UMUM	1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 2. Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan 3. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 4. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 5. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Jembatan 6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan pengairan Lainnya 7. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 9. Program Pengendalian Banjir 10. Program Pembangunan Jalan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM
	3. Pembangunan perumahan, pemukiman dan infrastruktur Sanitasi	PERUMAHAN	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan 3. Program Pemadam Kebakaran 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	DINAS PU
	4. Pembangunan Kelistrikan dan Sumber energy terbarukan	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1. Program Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Ketenagalistrikan 2. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	DINAS ENERGI DAN ESDM

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Program Pembinaan dan Pengembangan di Bidang Geologi</li> <li>4. Program Pencadangan dan Pemetaan Wilayah Pertambangan</li> <li>5. Program Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Bahan Bakar Minyak</li> </ol>	
	5. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi	PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</li> <li>2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</li> <li>3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan</li> <li>4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas</li> </ol>	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KE-2	1. Percepatan pertumbuhan sector pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan	PERTANIAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</li> <li>2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</li> <li>3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</li> <li>4. Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak</li> <li>5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</li> <li>6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</li> </ol>	DINAS PERTANIAN
		KELAUTAN DAN PERIKANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Perikanan Budidaya</li> <li>2. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</li> <li>3. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap</li> </ol>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		KEHUTANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya</li> </ol>	DINAS KEHUTANAN

			<p>Hutan</p> <p>2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p> <p>3. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan</p> <p>4. Program Pembinaan dan Penerbitan Industri hasil Hutan</p> <p>5. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan</p>	DAN PERKEBUNAN
2. Percepatan pertumbuhan sector perdagangan, industry dan investasi	PERDAGANGAN	<p>1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</p> <p>2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</p>	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	PERINDUSTRIAN	<p>1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</p> <p>2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</p>	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	PENANAMAN MODAL	3.		
		<p>1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</p> <p>2. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi</p> <p>3. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi</p>	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU BAPPEDA	
3. Optimalisasi sector pariwisata terutama ekowisata	PARIWISATA	<p>1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</p> <p>2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</p> <p>3. Program Pengembangan Kemitraan</p> <p>4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif</p>	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
4. Percepatan pertumbuhan koperasi dan UMKM	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	<p>1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</p> <p>2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan</p>	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

			Koperasi	AN
KE-3	1. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan 2. Pembentukan fasilitas pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah 3. Peningkatan kualitas aparatur bidang pendidikan	PENDIDIKAN	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Nonformal 5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N
		KEARSIPAN	1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip/Dokumen Daerah 2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	KANTOR PERPUSTAK AAN DAN ARSIP DAERAH
		KEBUDAYAA N	1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2. Program Pengembangan Nilai Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N
	4. Peningkatan peranan pemuda dan prestasi olahraga	PEMUDA DAN OLAHRAGA	1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 4. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA
			1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Pelajar	DINAS PENDIDIKAN
			3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	DINAS PEKERJAAN UMUM

KE-4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan</li> <li>2. Peningkatan kualitas aparatur bidang kesehatan</li> <li>3. Pemerataan aparat pelaksana layanan kesehatan</li> </ol>	KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</li> <li>2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat</li> <li>5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat</li> <li>6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</li> <li>7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</li> <li>8. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</li> <li>9. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</li> <li>10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia</li> <li>11. Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak</li> <li>12. Program Imunisasi</li> <li>13. Program Informasi Kesehatan</li> <li>14. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat</li> <li>15. Program Pengadaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</li> </ol>	DINAS KESEHATAN
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>2. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</li> <li>3. Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata</li> </ol>	RSUD KAB. BENGKAYANG

			<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Program Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata</li> <li>5. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat</li> </ul>	
KE-5	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Fasilitas Pendukung Pertanian</li> <li>2. Penguatan kelembagaan pendukung pertanian dan perikanan</li> </ul>	PERTANIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</li> <li>2. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan</li> </ul>	DINAS PERTANIAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Peningkatan Kualitas Petani dan Nelayan</li> <li>4. peningkatan koordinasi lintas sektoral</li> </ul>	KELAUTAN DAN PERIKANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</li> <li>4. Program Peningkatan Kinerja UPTD dan Balai Benih (BBI)</li> </ul>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KE-6	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Regulasi penataan lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam</li> <li>2. Perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup</li> </ul>	LINGKUNGAN HIDUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</li> <li>2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</li> <li>3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</li> <li>4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi</li> <li>5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</li> <li>6. Penilaian Lingkungan Hidup</li> </ul>	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Terwujudnya penataan lingkungan sesuai dengan Rencana tata ruang wilayah</li> </ul>	PENATAAN RUANG	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Perencanaan tata ruang</li> </ul>	BAPPEDA

KE-7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas Aparat Birokrasi</li> <li>2. Penguatan regulasi daerah yang menjadi acuan aparatur birokrasi</li> <li>3. Peningkatan Kualitas dan standar pelayanan public</li> <li>4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</li> </ol>	<p>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Optimalisasi Penatausahaan dan Pengelolaan BMD</li> <li>2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</li> <li>3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</li> <li>4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</li> <li>5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>6. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemda</li> <li>7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> <li>10. Program Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Daerah</li> </ol>	SEKRETARIAT DAERAH
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</li> <li>2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>5. Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPeraturan Perundang-undangan</li> </ol>	SEKRETARIAT DPRD
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penelitian dan Pengembangan</li> <li>2. Peningkatan</li> </ol>	BAPPEDA

			Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
			1. Program Optimalisasi Penatausahaan dan Pengelolaan BMD 2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah 4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPD 8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan BMD	BPKAD
			5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 8. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	INSPEKTORAT



			<p>9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>10. Optimalisasi Penatausahaan dan Pengelolaan Barang milik Daerah</p>	
			<p>1. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS</p> <p>2. Program Optimalisasi Penatausahaan dan Pengelolaan BMD</p> <p>3. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemda</p> <p>4. Program Pendidikan Kedinasan</p> <p>5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemda</p> <p>6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</p> <p>11. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>12. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>13. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p>	BKDD
			<p>1. Program Optimalisasi Penatausahaan dan Pengelolaan BMD</p> <p>2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah</p> <p>3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p>	DINAS PENDAPATAN DAERAH
			<p>1. Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Kapasitas Kelembagaan</p> <p>2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>3. Peningkatan Kapasitas</p>	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

			Sumber Daya Aparatur	
			4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
			1. Program Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal 2. Program Peningkatan Kerjasama Antar Negara 3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BADAN PENGELOLA PERBATASANN
			1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
			1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
			1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINAS ENERGI DAN SDM
			1. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	17 KECAMATAN
			1. Peningkatan Pengembangan Sistem	2 KELURAHAN

			<p>Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p>	
			<p>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p>	<p>DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</p>
			<p>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p>	<p>BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN &amp; KB</p>
			<p>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>4. Optimalisasi Penatausahaan dan Pengelolaan Barang milik Daerah</p>	<p>BADAN PEMB. MASYARAKAT &amp; PEMERINTAHAN DESA</p>
			<p>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p>	<p>BADAN PENANAMAN MODAL, PELAYANAN DAN PERIJINAN TERPADU</p>
			<p>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p>	<p>BADAN LINGKUNGAN HIDUP</p>
			<p>1. Peningkatan Pengembangan Sistem</p>	<p>DINAS PERTANIAN</p>

			<p>Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p>	
			<p>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p>	DINAS KEHUTAN DAN PERKEBUNAN
			<p>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p>	DINAS PEKERJAAN UMUM
			<p>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p>	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			<p>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p>	DINAS KESEHATAN
			<p>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p>	RSUD
			<p>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p>	KANTOR KESBANGPOL

			3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
			1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KANTOR POLPP
			1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA
			1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERINDAG
			1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI
			1. Peningkatan Pengembangan Sistem	DINAS KELAUTAN

			<p>Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p>	DAN PERIKANAN
		KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	<p>1. Program Penataan Administrasi Kependudukan</p> <p>2. Program Penerapan KTP Elektronik (E-KTP)</p> <p>3. Program Penataan Pencatatan Sipil</p> <p>4. Program Penataan Data dan Pelaporan Kependudukan</p>	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			5. Program Penerapan KTP Elektronik (E-KTP)	17 KECAMATAN
	5. Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi Bagi Daerah	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<p>1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</p> <p>2. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media</p>	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			1. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	SEKRETARIAT DAERAH
			2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	INSPEKTORAT
		STATISTIK	1. Program Pengembangan Data dan Informasi	BAPPEDA
			2. Program Pengembangan Data dan Informasi	KELURAHAN BUMI EMAS
			3. Program Pengembangan Data dan Informasi	KELURAHAN SEBALO
			4. Program Pengembangan Data dan Informasi	17 KECAMATAN
KE-8	<p>1. Penegakan Implementasi aturan-aturan daerah</p> <p>2. Peningkatan kualitas Aparatur daerah</p> <p>3. Peningkatan keamanan</p>	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	<p>1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</p> <p>2. Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</p> <p>3. Program Pendidikan Politik Masyarakat</p>	KANTOR KESBANGPOL
			1. Program Peningkatan Keamanan dan	KANTOR SATUAN

	dan ketertiban serta pengurangan tindak kriminal daerah 4. Peningkatan koordinasi lintas sektoral		2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 3. Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	POLISI PAMONG PRAJA
KE-9	1. Pengentasan Kemiskinan dan Angka Pengangguran	SOSIAL	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 5. Pembinaan Panti asuhan/Panti Jompo	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	SEKRETARIAT DAERAH
			1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	17 KECAMATAN
			1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	2 KELURAHAN
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	BADAN PEKERJAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	1. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2. Penguatan Kelembagaan	BADAN PEKERJAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

		PERLINDUNGAN ANAK	Pengurusutamaan Gender dan Anak 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	DAN KB
		KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	1. Program Keluarga Berencana 2. Program Pelayanan Kontrasepsi 3. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Bina Keluarga 4. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB
		PEKERJAAN UMUM	1. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM
	2. Perbaiki iklim ketenagakerjaan melalui pengarahannya dan pembinaan kegiatan entrepreneurship	TENAGA KERJA	1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

**TABEL 4.2.3**  
**PROGRAM PEMBANGUNAN PER URUSAN DAN SKPD**  
**PENANGGUNGJAWAB**

URUSAN	SKPD	PROGRAM
<b>URUSAN WAJIB</b>		
<b>PENDIDIKAN</b>	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Nonformal 5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
<b>KESEHATAN</b>	DINAS KESEHATAN	1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan



			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat</li> <li>5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat</li> <li>6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</li> <li>7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</li> <li>8. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</li> <li>9. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</li> <li>10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia</li> <li>11. Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak</li> <li>12. Program Imunisasi</li> <li>13. Program Informasi Kesehatan</li> <li>14. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat</li> <li>15. Program Pengadaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</li> </ol>
		RSUD KAB. BENGKAYANG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>2. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</li> <li>3. Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata</li> <li>4. Program Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata</li> <li>5. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
	<b>PEKERJAAN UMUM</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</li> <li>2. Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan</li> <li>3. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan</li> <li>4. Program Pembangunan Saluran</li> </ol>

			Drainase/Gorong-gorong 5. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Jembatan 6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan pengairan Lainnya 7. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 9. Program Pengendalian Banjir 10. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 11. Program Pembangunan Jalan Lingkungan
	<b>PERUMAHAN</b>	DINAS PEKERJAAN UMUM	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan 3. Program Pemadam Kebakaran 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	<b>PENATAAN RUANG</b>	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Program Perencanaan Tata ruang
	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Program Kerjasama Pembangunan 2. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota menengah dan Besar 3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
		17 KECAMATAN	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	<b>PERHUBUNGAN</b>	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan 4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas

<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</li> <li>2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</li> <li>3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</li> <li>4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi</li> <li>5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</li> <li>6. Penilaian Lingkungan Hidup</li> </ol>
<b>PERTANAHAN</b>	SEKRETARIAT DAERAH		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah</li> </ol>
<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penataan Administrasi Kependudukan</li> <li>2. Program Penerapan KTP Elektronik (E-KTP)</li> <li>3. Program Penataan Pencatatan Sipil</li> <li>4. Program Penataan Data dan Pelaporan Kependudukan</li> </ol>
	17 KECAMATAN		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Program Penerapan KTP Elektronik (E-KTP)</li> </ol>
<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</li> <li>2. Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak</li> <li>3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</li> </ol>
<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Keluarga Berencana</li> <li>2. Program Pelayanan Kontrasepsi</li> <li>3. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Bina Keluarga</li> <li>4. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana</li> </ol>
<b>SOSIAL</b>	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</li> </ol>

			<p>Lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</li> <li>3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</li> <li>4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</li> <li>5. Pembinaan Panti asuhan/Panti Jompo</li> </ol>
		SEKRETARIAT DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</li> </ol>
		17 ECAMATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</li> </ol>
		2 KELURAHAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</li> </ol>
	<b>TENAGA KERJA</b>	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> <li>2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja</li> <li>3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</li> </ol>
	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</li> <li>2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</li> </ol>
	<b>PENANAMAN MODAL</b>	BMPPT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</li> <li>2. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi</li> </ol>
		BAPPEDA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi</li> </ol>
	<b>KEBUDAYAAN</b>	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya</li> <li>2. Program Pengembangan Nilai Budaya</li> </ol>
	<b>PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</li> <li>2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</li> <li>3. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda</li> </ol>

			4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
		DINAS PENDIDIKAN	1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Pelajar
		DINAS PU	1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>	KANTOR KESBANGPOL	1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2. Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3. Program Pendidikan Politik Masyarakat
		KANTOR SATPOL-PP	4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 6. Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 2. Program Perencanaan Daerah Rawan Bencana 3. Program Penanganan Pasca Bencana 4. Program Kesiapsiagaan 5. Program Tanggap darurat
	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN</b>	SEKRETARIAT DAERAH	1. Program Optimalisasi Penatausahaan dan Pengelolaan BMD 2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 6. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemda

			<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> <li>10. Program Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Daerah</li> </ul>
		SEKRETARIAT DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</li> <li>2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> </ul>
		BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penelitian dan Pengembangan</li> <li>2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> </ul>
		BPKAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Optimalisasi Penatausahaan dan Pengelolaan BMD</li> <li>2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah</li> <li>4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</li> <li>5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> <li>7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPD</li> <li>8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan BMD</li> </ul>

	INSPEKTORAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</li> <li>10. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</li> <li>11. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</li> <li>12. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>13. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>14. Optimalisasi Penatausahaan dan Pengelolaan Barang milik Daerah</li> </ul>
	BKDD	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS</li> <li>2. Program Optimalisasi Penatausahaan dan Pengelolaan BMD</li> <li>3. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemda</li> <li>4. Program Pendidikan Kedinasan</li> <li>5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemda</li> <li>6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</li> <li>7. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>8. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> </ul>
	DISPENDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Optimalisasi Penatausahaan dan Pengelolaan BMD</li> <li>2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah</li> <li>3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> </ul>
	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Kapasitas Kelembagaan</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> </ul>
		BADAN PENGELOLA PERBATASAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal</li> <li>2. Program Peningkatan Kerjasama Antar Negara</li> <li>3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> </ul>
		SEKRETARIAT PENGURUS KORPRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> </ul>
		KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> </ul>
		17 KECAMATAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penataan Daerah Otonomi Baru</li> <li>2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> </ul>
		2 KELURAHAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> </ul>
		DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana</li> </ul>



			<b>Aparatur</b>
		DINAS ENERGI DAN SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> </ol>
		BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> </ol>
		BADAN PEMB. MASYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> <li>4. Optimalisasi Penatausahaan dan Pengelolaan Barang milik Daerah</li> </ol>
		BADAN PENANAMAN MODAL, PELAYANAN DAN PERIJINAN TERPADU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> <li>4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</li> </ol>
		BADAN LINGKUNGAN HIDUP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> </ol>
		DINAS PERTANIAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> </ol>
		DINAS KEHUTANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> </ol>

			3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		DINAS PEKERJAAN UMUM	1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		DINAS KESEHATAN	1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		KANTOR KESBANGPOL	1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		KANTOR POLPP	1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> </ol>
		KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> </ol>
		DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERINDAG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> </ol>
		DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> </ol>
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> </ol>
	<b>KETAHANAN PANGAN</b>	DINAS PERTANIAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan</li> </ol>
	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</li> <li>2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</li> <li>3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</li> <li>4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</li> </ol>

	<b>STATISTIK</b>	BAPPEDA	1. Program Pengembangan Data dan Informasi
		KELURAHAN SEBALO	1. Program Pengembangan Data dan Informasi
		KELURAHAN BUMI EMAS	1. Program Pengembangan Data dan Informasi
		17 ECAMATAN	1. Program Pengembangan Data dan Informasi
	<b>KEARSIPAN</b>	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH	1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip/Dokumen Daerah 2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
		SEKRETARIAT DAERAH	1. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
		INSPEKTORAT	1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
	<b>PERPUSTAKAAN</b>	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH	1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
<b>URUSAN PILIHAN</b>			
	<b>PERTANIAN</b>	DINAS PERTANIAN	1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 5. Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak 6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan 7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

			8. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
		DINAS KEHUTANAN	9. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 10. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 11. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	<b>KEHUTANAN</b>	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 4. Program Pembinaan dan Penerbitan Industri hasil Hutan 5. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>	DINAS ENERGI DAN SDM	1. Program Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Ketenagalistrikan 2. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 3. Program Pembinaan dan Pengembangan di Bidang Geologi 4. Program Pencadangan dan Pemetaan Wilayah Pertambangan 5. Program Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Bahan Bakar Minyak
	<b>PARIWISATA</b>	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Program Pengembangan Kemitraan 4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Perikanan Budidaya</li> <li>2. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</li> <li>3. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap</li> <li>4. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</li> <li>5. Program Peningkatan Kinerja UPTD dan Balai Benih (BBI)</li> </ol>
<b>PERDAGANGAN</b>	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDAG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</li> <li>2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</li> </ol>
<b>PERINDUSTRIAN</b>	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDAG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</li> <li>2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</li> </ol>
<b>TRANSMIGRASI</b>	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</li> </ol>

### 4.3 SASARAN PEMBANGUNAN

Melihat Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan, secara umum sasaran pembangunan untuk tahun 2016 adalah melanjutkan pembangunan yang belum mencapai target pada periode tahun 2011-2015 dan mengembangkan berbagai sector pendukung peningkatan ekonomi masyarakat, baik infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, pemanfaatan dan optimalisasi Sumber daya yang tersedia serta membenahan system pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas aparatur serta penguatan regulasi daerah.

Dalam sebuah perencanaan, Penetapan target capaian pembangunan sangat penting, karena hal tersebut merupakan salah satu indicator dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Target yang ditetapkan

juga didukung oleh penetapan sasaran-sasaran pembangunan yang dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan terutama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai focus pembangunan yang harus dilaksanakan kedepannya. Oleh karena itu, pentingnya konsistensi dari seluruh pelaku pembangunan untuk merencanakan dan menetapkan Program Kegiatan yang memiliki dampak nyata dalam mendukung dari pencapaian target yang telah ditetapkan.

Sasaran pembangunan Kabupaten Bengkayang ditahun 2016 sebagai berikut :

**Tabel 4.3.1**

Sasaran Pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2016

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET
<b>A.</b>	<b>Umum</b>	
1	Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Terwujudnya perencanaan yang tepat sasaran, efektif, efisien, dan konsisten baik dari rancangan awal sampai tahap implementasi
2	Sumberdaya manusia	Meningkatnya kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia dan tenaga aparatur yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif
3	Standar pelayanan	Tercapainya standar pelayanan minimal pada masyarakat
4	Kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pendapatan per-Kapita masyarakat dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat yang meliputi pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatnya angka

		IPM Kabupaten
5	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya angka pengangguran dan angka kemiskinan

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET
<b>B.</b>	<b>Khusus</b>	
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>	
	a. Meningkatkan serapan peserta didik untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah	Jumlah peserta didik pendidikan tingkat dini, dasar, dan menengah meningkat dari tahun 2015.
	b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah guru pendidikan usia dini, meningkat dari tahun 2015.</li> <li>- Pemerataan Tenaga Pendidik tingkat dasar dan menengah sesuai kebutuhan dan jumlah peserta didik</li> <li>- Meningkatnya jumlah dan persentase peserta didik yang lulus (dasar dan menengah) ujian nasional sebagai indikasi meningkatnya kompetensi tenaga pengajar.</li> </ul>
	c. Meningkatkan angka melek huruf dan lama sekolah	Rata-rata lama sekolah masyarakat Bengkulu dari angka 6,55 tahun pada tahun 2013 diproyeksikan meningkat



		menjadi 6,6 tahun pada tahun 2016 dan menurunnya jumlah masyarakat usia sekolah yang buta huruf (angka melek huruf 91,42 % ditahun 2013 diproyeksikan menjadi 92,12 %
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>	
	a. Meningkatnya angka harapan hidup	Meningkatnya angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Bengkayang dari 69,61 tahun pada tahun 2013 diproyeksikan mencapai 69,83 Tahun pada tahun 2016
	b. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi	Angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi ditargetkan menurun pada tahun 2016
	c. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	Angka kurang gizi dan gizi buruk balita diperkirakan menurun masing-masing pada angka 10,11% dan 1,86%
	d. Meningkatnya pelayanan kesehatan melalui ketersediaan fasilitas kesehatan dan optimalisasi SDM tenaga kesehatan	Meningkatnya infrastruktur pendukung aksesibilitas pelayanan kesehatan dan meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan

<b>3</b>	<b>Pangan dan Agribisnis</b>	
	a. Meningkatnya produksi <i>on farm</i> tanaman pangan dan hortikultura	Produksi tanaman pangan pada tahun 2016 mencapai angka: 1) Padi : 145.564 ton 2) Jagung : 132.342 ton 3) Ubi Kyu : 38.763 ton
	b. Meningkatnya produksi komoditas unggulan daerah	Produksi karet ditargetkan mencapai 23.892 ton, sedangkan sawit ditargetkan mencapai 55.565 ton
	c. Meningkatnya profitabilitas usaha tani masyarakat melalui efisiensi faktor produksi yang bersifat positif	Kemudahan memperoleh input produksi pertanian masyarakat meningkat. Teknik budidaya pertanian masyarakat secara umum semakin meningkat dengan adanya bantuan input produksi dan kegiatan penyuluhan yang intensif
<b>4</b>	<b>Infrastruktur</b>	
	a. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang mendukung pelayanan hak dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat)	meningkatnya pelayanan kesehatan, pendidikan, dan arus lalu lintas perekonomian masyarakat
	b. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi bagi daerah yang terisolasi dan	Meningkatnya infrastruktur jalan baik kualitas maupun kuantitas pada 3 kecamatan di Kabupaten Bengkayang yang aksesibilitasnya masih rendah, yaitu Kecamatan

	aksesibilitas rendah	Siding, Sutisemarang, dan Lembah Bawang.
	c. Pembangunan dan peningkatan jaringan infrastruktur untuk pemenuhan dan pemerataan kebutuhan dasar masyarakat akan kelistrikan dan sumber air	Meningkatnya jumlah dan pelayanan infrastruktur air dan listrik di beberapa daerah terpencil di Kabupaten Bengkayang
<b>5</b>	<b>Ekonomi</b>	
	a. Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka	Angka kemiskinan dan pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkayang ditargetkan menurun
	b. Meningkatnya kontribusi sektor sekunder dan tersier pada perekonomian daerah	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi masyarakat yang memiliki nilai tambah tinggi (Sekunder dan Tersier) yaitu mencapai nilai masing-masing Rp 430.281,58 (juta) dan Rp 1.325.772.807 (juta) atau dengan persentase masing-masing mencapai 12,87% dan 39,65%.
	c. Meningkatnya pengeluaran perkapita masyarakat Kabupaten Bengkayang	Angka pengeluaran perKapita Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2016 ditargetkan mencapai angka Rp. 619.421,-
	d. Meningkatnya angka PDRB Kabupaten Bengkayang	Angka PDRB ADHB Kabupaten Bengkayang ditargetkan mencapai Rp. 4.736.775 (juta)

## BAB V

### RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

Rencana program prioritas merupakan uraian yang menjelaskan program dan capaian kinerja dan kebutuhan/pagu indikatif. Secara umum rencana program prioritas pembangunan Kabupaten Bengkayang masih berkaitan dengan permasalahan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian masyarakat, kemiskinan, ketenagakerjaan dan beberapa sektor unggulan daerah. Hal-hal tersebut mempunyai hubungan implikasi dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bengkayang. Sektor perekonomian daerah dan masyarakat masih difokuskan pada pembangunan bidang pertanian secara umum (pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan dan kelautan).

Prioritas pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 yang dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.1**

Urusan dan Program Tahun 2016

No.	Urusan	Program
A.	Wajib	
	1. Pendidikan	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Nonformal 5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6. Program Manajemen Pelayanan

		<b>Pendidikan</b>
	2. Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</li> <li>2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat</li> <li>5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat</li> <li>6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</li> <li>7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</li> <li>8. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</li> <li>9. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</li> <li>10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia</li> <li>11. Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak</li> <li>12. Program Imunisasi</li> <li>13. Program Informasi Kesehatan</li> <li>14. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat</li> <li>15. Program Pengadaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</li> <li>16. Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata</li> <li>17. Program Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata</li> </ol>
<b>No.</b>	<b>Urusan</b>	<b>Program</b>
A.	Wajib	
	3. Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</li> <li>2. Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan</li> <li>3. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan</li> <li>4. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong</li> <li>5. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Jembatan</li> </ol>

		6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan pengairan Lainnya 7. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 9. Program Pengendalian Banjir 10. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 11. Program Pembangunan Jalan Lingkungan
	4. Perumahan	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan 3. Program Pemadam Kebakaran 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	5. Penataan Ruang	1. Program Perencanaan Tata ruang
	6. Perencanaan Pembangunan	1. Program Kerjasama Pembangunan 2. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota menengah dan Besar 3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	7. Perhubungan	1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan 4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas

No.	Urusan	Program
A.	Wajib	
	8. Lingkungan Hidup	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

		5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 6. Penilaian Lingkungan Hidup
	9. Pertanahan	1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
	10. Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Program Penataan Administrasi Kependudukan 2. Program Penerapan KTP Elektronik (E-KTP) 3. Program Penataan Pencatatan Sipil 4. Program Penataan Data dan Pelaporan Kependudukan
	11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2. Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
	12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1. Program Keluarga Berencana 2. Program Pelayanan Kontrasepsi 3. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Bina Keluarga 4. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
	13. Sosial	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 5. Pembinaan Panti asuhan/Panti Jompo
	14. Ketenagakerjaan	1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
<b>No.</b>	<b>Urusan</b>	<b>Program</b>
A.	Wajib	
	15. Koperasi dan UMKM	1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

	16. Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</li> <li>2. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi</li> </ol>
	17. Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya</li> <li>2. Program Pengembangan Nilai Budaya</li> </ol>
	18. Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</li> <li>2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</li> <li>3. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda</li> <li>4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</li> <li>5. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Pelajar</li> </ol>
	19. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</li> <li>2. Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</li> <li>3. Program Pendidikan Politik Masyarakat</li> <li>4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</li> <li>5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</li> <li>6. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</li> <li>7. Program Perencanaan Daerah Rawan Bencana</li> <li>8. Program Penanganan Pasca Bencana</li> <li>9. Program Kesiapsiagaan</li> <li>10. Program Tanggap darurat</li> </ol>
	20. Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan</li> </ol>
	21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</li> <li>2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</li> <li>3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</li> <li>4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</li> </ol>
<b>No.</b>	<b>Urusan</b>	<b>Program</b>
A.	Wajib	.
	22. Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip/Dokumen Daerah</li> <li>2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan</li> </ol>



		Informasi
	23. Statistik	1. Program Pengembangan Data dan Informasi
	24. Komunikasi dan Informatika	1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 3. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
	25. Perpustakaan	1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	26. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keunagan Daerah, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian.	1. Program Optimalisasi Penatausahaan dan Pengelolaan BMD 2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 6. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemda 7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10. Program Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Daerah 11. Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 12. Program Penelitian dan Pengembangan 13. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah 14. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 15. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPD 16. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan BMD 17. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

		Pengawasan 18. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 19. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 20. Program Pendidikan Kedinasan 21. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemda 22. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 23. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah 24. Program Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal 25. Program Peningkatan Kerjasama Antar Negara 26. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 27. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
<b>No.</b>	<b>Urusan</b>	<b>Program</b>
B.	Pilihan	Program
	1. Pertanian	1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 5. Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak 6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan 7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 8. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	2. Kehutanan	1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 4. Program Pembinaan dan Penerbitan Industri hasil Hutan 5. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

No.	Urusan	Program
B.	Pilihan	Program
	3. Energi dan Sumberdaya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Ketenagalistrikan</li> <li>2. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan</li> <li>3. Program Pembinaan dan Pengembangan di Bidang Geologi</li> <li>4. Program Pencadangan dan Pemetaan Wilayah Pertambangan</li> <li>5. Program Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Bahan Bakar Minyak</li> </ol>
	4. Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</li> <li>2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</li> <li>3. Program Pengembangan Kemitraan</li> <li>4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif</li> </ol>
	5. Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Perikanan Budidaya</li> <li>2. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</li> <li>3. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap</li> <li>4. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</li> <li>5. Program Peningkatan Kinerja UPTD dan Balai Benih (BBI)</li> </ol>
	6. Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</li> <li>2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</li> </ol>
	7. Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</li> <li>2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</li> </ol>
	8. Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</li> </ol>

Pada tahun anggaran 2016 diproyeksikan total anggaran sebesar Rp.858.567.795.150,00 yang terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 492.653.839.250, dan belanja langsung sebesar Rp.365.913.955.900,00 Sedangkan belanja langsung meliputi program yang ada pada setiap SKPD untuk dialokasikan pada belanja urusan wajib dan

urusan pilihan. Berikut merupakan rencana pagu belanja langsung per SKPD di Kabupaten Bengkayang Tahun 2016

**Tabel 5.2**

**Rencana Pagu Indikatif Belanja Langsung Per SKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016**

NO.	SKPD	BELANJA LANGSUNG		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SKPD TAHUN 2016	% TERHADAP TOTAL PAGU ANGGARAN
		PROGRAM RUTIN	PROGRAM PEMBANGUNAN		
1	Dinas Pendidikan	2,190,000,000.00	32,810,000,000.00	35.000.000.000,00	9.57
2	Dinas Kesehatan	3,600,000,000.00	22,740,000,000.00	26.340.000.000,00	7.20
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2,807,000,000.00	15,193,000,000.00	18.000.000.000,00	4.92
4	Dinas Pekerjaan Umum	3,060,000,000.00	83,613,200,000.00	86,673,200,000.00	23.69
5	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	1,781,900,000.00	7,718,100,000.00	9,500,000,000.00	2.60
6	Dinas Perhubungan, Telekomunikasi &	1,260,000,000.00	6,040,000,000.00	7,300,000,000.00	2.00
7	Badan Lingkungan Hidup	653,000,000.00	2,647,000,000.00	3,300,000,000.00	0.90
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	990,000,000.00	1,510,000,000.00	2,500,000,000.00	0.68
9	Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana	860,000,000.00	2,290,000,000.00	3,150,000,000.00	0.86
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	920,000,000.00	2,080,000,000.00	3,000,000,000.00	0.82
11	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	1,080,000,000.00	5,670,000,000.00	6,750,000,000.00	1.84
12	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	890,000,000.00	2,110,000,000.00	3,000,000,000.00	0.82
13	Kantor Pemuda dan Olahraga	880,000,000.00	720,000,000.00	1,600,000,000.00	0.44
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	670,000,000.00	1,030,000,000.00	1,700,000,000.00	0.46
15	Kantor Satuan POL-PP	1,032,000,000.00	4,668,000,000.00	5,700,000,000.00	1.56
16	Sekretariat Daerah		24,031,000,000.00	38,500,000,000.00	10.52
17	Sekretariat DPRD	1,950,000,000.00	12,100,000,000.00	14,050,000,000.00	3.84
18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2,195,000,000.00	6,700,000,000.00	8,895,000,000.00	2.43

19	Inspektorat Kabupaten	900,000,000.00	2,900,000,000.00	3,800,000,000.00	1.04
20	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	1,060,000,000.00	7,940,000,000.00	9,000,000,000.00	2.46
21	Kecamatan Samalantan	415,500,000.00	209,500,000.00	625,000,000.00	0.17
22	Kecamatan Bengkayang	455,500,000.00	209,500,000.00	665,000,000.00	0.18
23	Kecamatan Ledo	405,500,000.00	219,500,000.00	625,000,000.00	0.17
24	Kecamatan Sanggau Ledo	415,000,000.00	225,000,000.00	640,000,000.00	0.17
25	Kecamatan Seluas	418,000,000.00	227,000,000.00	645,000,000.00	0.18
26	Kecamatan Sui. Raya	405,500,000.00	219,500,000.00	625,000,000.00	0.17
27	Kecamatan Jagoi Babang	425,500,000.00	239,500,000.00	665,000,000.00	0.18
28	Kecamatan Teriak	425,500,000.00	239,500,000.00	665,000,000.00	0.18
29	Kecamatan Monterado	410,500,000.00	234,500,000.00	645,000,000.00	0.18
30	Kecamatan Suti Semarang	430,500,000.00	234,500,000.00	665,000,000.00	0.18
31	Kecamatan Capkala	410,500,000.00	224,500,000.00	635,000,000.00	0.17
32	Kecamatan Siding	425,500,000.00	239,500,000.00	665,000,000.00	0.18
33	Kecamatan Sui. Betung	410,500,000.00	224,500,000.00	635,000,000.00	0.17
34	Kecamatan Lumar	405,500,000.00	219,500,000.00	625,000,000.00	0.17
35	Kecamatan Sui. Raya Kep	405,500,000.00	219,500,000.00	625,000,000.00	0.17
36	Kecamatan Tujuh Belas	415,500,000.00	229,500,000.00	645,000,000.00	0.18
37	Kecamatan Lembah Bawang	435,500,000.00	229,500,000.00	665,000,000.00	0.18
38	Kecamatan Sebalu	215,000,000.00	160,000,000.00	375,000,000.00	0.10
39	Kecamatan Bumi Emas	215,000,000.00	160,000,000.00	375,000,000.00	0.10
40	Sekretariat Korpri	420,055,000.00	125,000,000.00	545,055,000.00	0.15
41	Badan Pengelola Perbatasan dan daerah Tertinggal	1,150,000,000.00	3,050,000,000.00	4,200,000,000.00	1.15
42	BPBD	666,700,000.00	5,333,300,000.00	6,000,000,000.00	1.64
43	Dinas Pendapatan Daerah	950,000,000.00	3,900,000,000.00	4,850,000,000.00	1.33
44	Badan Pemberdayaan Masy & Pemerintahan Desa	905,000,000.00	3,595,000,000.00	4,500,000,000.00	1.23
45	Kantor Perpustakaan dan Arsin Daerah	410,000,000.00	990,700,900.00	1,400,700,900.00	0.38
46	Dinas Pertanian		16,230,000,000.00	18,000,000,000.00	4.92
47	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1,010,000,000.00	7,990,000,000.00	9,000,000,000.00	2.46
48	Dinas Pertambangan dan	1,170,000,000.00	5,780,000,000.00	6,950,000,000.00	1.90
49	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,162,300,000.00	2,837,700,000.00	4,000,000,000.00	1.09
50	Dinas Kelautan Perikanan	990,000,000.00	6,010,000,000.00	7,000,000,000.00	1.91
	JUMLAH	<b>61,397,455,000.</b>	<b>304,516,500,900.</b>	<b>365,913,955,900.</b>	<b>100.00</b>

Rencana alokasi anggaran pembangunan di Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2016 sebagaimana dari prioritas daerah akan dijabarkan secara rinci pada lampiran 1 pada RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas program pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat Kabupaten Bengkayang.

Dengan RKPD ini diharapkan semua pihak selaku stakeholder pembangunan dapat memperoleh gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 dan sekaligus dapat menjadikannya sebagai acuan perencanaan. Khusus kepada Kepala SKPD agar segera menindaklanjuti dengan menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2016 yang menjabarkan lebih rinci tentang program, sasaran program termasuk indikator capaian, keluaran dan hasil kegiatan serta kegiatan dan lokasinya. Selain itu Kepala SKPD segera menyusun kerangka regulasi yang diperlukan dan rencana anggaran untuk mendukung pencapaian program dimaksud. Regulasi dapat berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala SKPD yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RKPD ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016 dalam bentuk Nota Kesepakatan Bupati Bengkayang dan DPRD Kabupaten Bengkayang.

Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan RKPD ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkayang mengevaluasi program dan indikator capaian makro melalui laporan Kepala SKPD, sedangkan untuk mengetahui keberhasilan program dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap program dimaksud.

Evaluasi RKPD Tahun 2016 pada tahun 2017 merupakan hal yang sangat penting mengingat hasil evaluasi tersebut tidak saja sebagai fungsi pengendalian perencanaan namun sekaligus sebagai informasi yang esensi dalam menyusun rencana pembangunan tahap berikutnya. Evaluasi RKPD

Tahun 2016 merupakan starting point untuk penyusunan dua dokumen perencanaan penting di Kabupaten Bengkayang, yaitu sebagai bahan pertimbangan penyusunan RKPD Tahun 2017 dan juga sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2020.

Bupati menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepada DPRD, laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Gubernur Kalimantan Barat dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kepada Masyarakat.

Bengkayang, Mei 2015

BUPATI BENGKAYANG.

TTD

SURYADMAN GIDOT



**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2016**

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERKIRAAN BIAYA (Rp.)			SUMBER LAIN
		APBD	APBD	APBN	
		KABKOTA	PROPINSI		
1	2	3	4	5	6
f 01	<b>PENDIDIKAN</b>	Rp 35.000.000.000,00	Rp 2.500.000.000,00	Rp 7.105.000.000,00	Rp 6.300.000.000,00
f 01 01	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	Rp 35.000.000.000,00	Rp 2.500.000.000,00	Rp 7.105.000.000,00	Rp 6.300.000.000,00
1 01 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 01 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 2.610.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 01 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 01 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 01 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Rp 110.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 01 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 01 10 00	Program Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 01 15 00	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp 3.505.000.000,00	Rp 2.500.000.000,00	Rp -	Rp -
1 01 16 00	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp 13.495.000.000,00	Rp -	Rp 1.455.000.000,00	Rp 6.300.000.000,00
1 01 17 00	Program Pendidikan Menengah	Rp 3.000.000.000,00	Rp -	Rp 5.650.000.000,00	Rp -
1 01 18 00	Program Pendidikan Non Formal	Rp 1.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 01 20 00	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 6.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 01 22 00	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp 910.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 01 24 00	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 01 25 00	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Pelajar	Rp 780.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 01 26 00	Pengembangan Nilai Budaya	Rp 150.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 01 27 00	Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp 1.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
f 2	<b>KESEHATAN</b>	Rp 44.340.000.000,00	Rp 30.000.000.000,00	Rp 56.551.700.000,00	Rp -
f 2 01	<b>DINAS KESEHATAN</b>	Rp 26.340.000.000,00	Rp 5.000.000.000,00	Rp 18.098.700.000,00	Rp -
1 02 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.500.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.800.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Rp 150.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 09 00	Program Penyebar Luasan Informasi Pembangunan	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 10 00	Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Rp 80.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 15 00	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp 5.240.000.000,00	Rp 5.000.000.000,00	Rp 4.850.000.000,00	Rp -
1 02 16 00	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 600.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 16 00	Program Promosi Kesehatan dan JPKM	Rp 600.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 20 00	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 21 00	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 22 00	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp 500.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 23 00	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 25 00	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Rp 5.000.000.000,00	Rp -	Rp 13.249.700.000,00	Rp -
1 02 28 00	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 32 00	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rp 500.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 42 00	Program Imunisasi	Rp 500.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 43 00	Program Sistem Informasi Kesehatan	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 44 00	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Rp 150.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 45 00	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)	Rp 6.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 46 00	Program Pengadaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	Rp 800.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
f 02 02	<b>RSUD</b>	Rp 18.000.000.000,00	Rp 25.000.000.000,00	Rp 38.452.000.000,00	Rp -
1 02 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.574.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 315.700.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 03 03	Pengadaan Pakelan Kerja Lapangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 120.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Rp 70.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 33.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 23 00	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp 700.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 26 00	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RSJRS Paru/RS Mata	Rp 3.547.600.000,00	Rp 25.000.000.000,00	Rp 38.452.000.000,00	Rp -
1 02 27 00	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RSJRS Paru/RS Mata	Rp 689.700.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 28 00	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 2.750.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 29 00	Program Jaminan Pemeliharaan kesehatan Masyarakat (JPKM)	Rp 7.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
f 03	<b>PEKERJAAN UMUM</b>	Rp 86.673.200.000,00	Rp 125.380.000.000,00	Rp 340.600.000.000,00	Rp -
f 03 01	<b>Dinas Pekerjaan Umum</b>	Rp 86.673.200.000,00	Rp 125.380.000.000,00	Rp 340.600.000.000,00	Rp -
1 03 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 03 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.013.200.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 03 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 400.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 03 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 120.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 60.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 02 00 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Rp 1.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 03 15 00	Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan	Rp 22.700.000.000,00	Rp 95.380.000.000,00	Rp 100.000.000.000,00	Rp -
1 01 37 00	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Rp 15.500.000.000,00	Rp 5.000.000.000,00	Rp -	Rp -
1 01 00 00	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp 7.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PERKIRAAN BIAYA (Rp.)			SUMBER LAIN
			APBD	APBD	APBN	
			KAB/KOTA	PROPINSI		
f	2	3	4	5	6	
1 03 16 00	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Rp 3.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 03 16 00	PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN/PERDESAAN	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 03 00 00	PROGRAM PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH	Rp 6.000.000.000,00	Rp 25.000.000.000,00	Rp 220.000.000.000,00	Rp -	
1 03 00 00	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	Rp 1.500.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 03 00 00	PROGRAM PEMADAM KEBAKARAN	Rp 2.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 03 00 00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 1.520.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 03 00 00	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA	Rp 2.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 03 24 00	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawe dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rp 9.000.000.000,00	Rp -	Rp 10.600.000.000,00	Rp -	
1 03 00 00	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
1 03 00 00	Pengendalian Banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai	Rp 4.960.000.000,00	Rp -	Rp 10.000.000.000,00	Rp -	
1 03 00 00	Data Base jaringan Irigasi Kabupaten Bengkayang	Rp 300.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 03 00 00	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 03 00 00	Pengembangan Perumahan	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 05	<b>PENATAAN RUANG</b>	Rp 825.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 06 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 825.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 05 15 00	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp 825.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 06	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
1 06 01	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Rp 9.500.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 06 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.671.900.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 06 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 335.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 06 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 06 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 350.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 06 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 125.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 06 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 60.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 06 15 00	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Rp 325.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 06 16 00	Program Kerjasama Pembangunan	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 06 19 00	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Rp 800.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 06 21 00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.500.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 06 22 00	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp 900.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 06 23 00	Program Perencanaan Sosial Budaya	Rp 1.300.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 06 24 00	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Rp 150.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 06 31 00	Program Peningkatan Ilmu dan Realisasi Investasi	Rp 480.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 06 32 00	Penelitian dan Pengembangan	Rp 528.100.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 07	<b>PERHUBUNGAN</b>	Rp 7.300.000.000,00	Rp -	Rp 20.000.000.000,00	Rp -	
1 07 01	<b>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	Rp 7.300.000.000,00	Rp -	Rp 20.000.000.000,00	Rp -	
1 07 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.150.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 07 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 450.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 07 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 07 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 125.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 07 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 78.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 07 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 07 10 00	Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan	Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 07 15 00	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp 600.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 07 17 00	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp 180.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 07 18 00	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rp 4.000.000.000,00	Rp -	Rp 20.000.000.000,00	Rp -	
1 07 19 00	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp 532.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 07 21 00	Program Pembinaan Pos dan Telekomunikasi	Rp 75.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 08	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	Rp 3.300.000.000,00	Rp 1.848.000.000,00	Rp 3.245.343.000,00	Rp -	
1 08 01	<b>Badan Lingkungan Hidup</b>	Rp 3.300.000.000,00	Rp 1.848.000.000,00	Rp 3.245.343.000,00	Rp -	
1 08 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 600.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 08 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 300.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 08 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 33.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 08 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 08 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 90.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 08 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 08 16 00	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp 300.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 08 17 00	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp 1.517.000.000,00	Rp 1.848.000.000,00	Rp 845.675.500,00	Rp -	
1 08 19 00	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp 665.750.000,00	Rp -	
1 08 20 00	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Rp 70.000.000,00	Rp -	Rp 1.733.917.500,00	Rp -	
1 08 24 00	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 08 25 00	Program Penilaian Lingkungan Hidup	Rp 150.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 10	<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>	Rp 2.500.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 10 01	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	Rp 2.500.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 10 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 900.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 10 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 300.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 10 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERKIRAAN BIAYA (Rp.)			SUMBER LAIN
		APBD	APBD	APBN	
		KABKOTA	PROPINSI		
1	2	3	4	5	6
1 10 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 10 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 10 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 10 10 00	Program Peningkatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 10 15 00	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp 60.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 10 16 00	Program Penerapan KTP Elektronik	Rp 400.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 10 17 00	Program Penataan Data dan Pelaporan Kependudukan	Rp 250.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 10 20 00	Program Penataan Pencatatan Sipil	Rp 400.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 13	<b>SOSIAL</b>	Rp 3.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 13 01	<b>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	Rp 3.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 13 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 800.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 13 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 240.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 13 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 13 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 53.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 13 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 13 10 00	Program Peningkatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan	Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 13 18 00	Program Pembinaan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 13 21 00	Program Pemberdayaan kelembagaan Kesos	Rp 90.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 13 21 00	Program Pemberdayaan Fakir Miskin (KAT), dan PMKS	Rp 450.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 13 11 13	Program pelayanan dan rehabilitasi kesos	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 13 12 13	Program peningkatan kesempatan kerja	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 13 13 13	Program perlindungan dan pengembangan lembaga kelenaga kerjaan	Rp 120.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 13 14 13	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Rp 150.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 13 14 06	Program Pembinaan Panti asuhan/Panti Jompo	Rp 376.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 13 14 06	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 17	<b>Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	Rp 4.000.000.000,00	Rp 1.160.000.000,00	Rp -	Rp -
1 17 01	<b>Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	Rp 4.000.000.000,00	Rp 1.160.000.000,00	Rp -	Rp -
1 17 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.100.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 17 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 280.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 17 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 2.300.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 17 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 58.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 17 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 17 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 17 10 00	Program Peningkatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 17 21 00	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp 1.238.700.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 17 15 00	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp 60.000.000,00	Rp 1.160.000.000,00	Rp -	Rp -
1 17 17 00	Program Pengembangan Kemitraan	Rp 400.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 17 18 00	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rp 700.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 19	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>	Rp 7.400.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 19 01	<b>Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	Rp 1.700.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 19 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 650.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 19 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 19 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 19 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 30.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 19 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 19 17 00	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp 485.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 19 18 00	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 19 21 00	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp 75.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 19 02	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	Rp 5.700.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 19 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 19 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 398.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 19 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 12.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 19 04 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 230.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 19 05 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 79.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 19 06 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 19 07 00	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp 260.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 19 08 00	Program Pemeliharaan Kerantambas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp 3.641.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 19 09 00	Program Kemitraan pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp 60.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN</b>	Rp 93.700.055.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20	<b>Sekretariat Daerah</b>	Rp 38.500.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 13.019.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 10.200.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 150.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 1.700.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 175.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PERKIRAAN BIAYA (Rp.)			SUMBER LAIN
			APBD		APBN	
			KABKOTA	PROPINSI		
1	2	3	4	5	6	
1 20 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 1.300.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 16 00	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp 3.500.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 17 00	Program Optimalisasi Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 270.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 26 00	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 238.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 31 00	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Rp 2.428.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 34 00	Program Pengembangan Sistem Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp 800.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 38 00	Program Pemberdayaan Lembaga dan Kegiatan Sosial	Rp 2.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 39 00	Program Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Daerah	Rp 510.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 54 00	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp 2.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 55 00	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp 110.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
<b>f 20 04 00</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>Rp 14.050.000.000,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
1 20 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.800.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.800.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 15 00	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp 9.965.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 26 00	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 35.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
<b>f 20 05</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)</b>	<b>Rp 8.895.000.000,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
1 20 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.145.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 30.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 270.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 660.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 17 00	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 2.300.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 28 00	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Rp 1.030.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 28 08	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 2.050.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 28 09	Program Optimalisasi Penatausahaan dan Pengelolaan Barang milik Daerah	Rp 30.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 28 10	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan	Rp 160.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
<b>f 20 06</b>	<b>Inspektoral</b>	<b>Rp 3.800.000.000,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
1 20 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 850.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 380.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 30.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 120.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 20 00	Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan	Rp 1.800.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 21 00	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Rp 225.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 22 00	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawas	Rp 230.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 23 00	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp 35.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 24 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 25 00	Program Optimalisasi Penatausahaan dan Pengelolaan Barang milik Daerah	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
<b>f 20 07</b>	<b>Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat</b>	<b>Rp 9.000.000.000,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
1 20 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 02 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 150.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 52 00	Program Pendidikan Kedinasan	Rp 130.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 53 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemda	Rp 3.270.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 54 00	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp 3.800.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 55 08	Program Optimalisasi Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik daerah	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 56 08	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Rp 180.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
<b>f 20 14</b>	<b>Kecamatan Samatanan</b>	<b>Rp 625.000.000,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
1 20 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 310.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 55.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PERKIRAAN BIAYA (Rp.)			SUMBER LAIN
			APBD	APBD	APBN	
			KAB/KOTA	PROPINSI		
1	2	3	4	5	6	
1 20 10 00	Program peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan	Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 24 00	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp 23.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 27 00	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 45 00	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan	Rp 12.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 48 00	Program Pemberdayaan Lembaga dan Kegiatan Sosial	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 49 00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 49.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 50 00	Program Penerapan E-KTP	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 51 00	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 15	<b>Kecamatan Bengkayang</b>	<b>Rp 665.000.000,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
1 20 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 350.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 59.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 10 00	Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan	Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 12 00	Program Penerapan KTP Elektronik	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 24 00	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp 23.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 27 00	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 45 00	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan	Rp 12.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 56 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 57 00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 45.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 58 00	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 59 00	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kegiatan Sosial	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 16	<b>Kecamatan Ledo</b>	<b>Rp 625.000.000,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
1 20 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 300.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 66.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 10 00	Program Peringatan Hari-hari besar nasional dan keagamaan	Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 24 00	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Rp 23.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 27 00	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 45 00	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan	Rp 12.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 46 00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 48.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 47 00	Program Penerapan E-KTP	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 48 00	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 49 00	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kegiatan Sosial	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 17	<b>Kecamatan Sanggau Ledo</b>	<b>Rp 640.000.000,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
1 20 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 309.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 70.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 10 00	Program Peringatan Hari-hari besar nasional dan keagamaan	Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 12 00	Program Penerapan KTP Elektronik	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 24 00	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp 23.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 27 00	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 45 00	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan	Rp 12.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 47 00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 48 00	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 49 00	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kegiatan Sosial	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 18	<b>Kecamatan Seluas</b>	<b>Rp 645.000.000,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
1 20 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 312.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 72.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 10 00	Program Peringatan Hari-hari besar nasional dan keagamaan	Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 24 00	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Rp 23.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 27 00	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 38 00	Program Pemberdayaan Lembaga dan Program Sosial	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 45 00	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan	Rp 12.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 50 00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 51 00	Program Penerapan E-KTP	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 52 00	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	

KODE	KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERKIRAAN BIAYA (Rp.)			SUMBER LAIN					
				APBD	APBD	APBN						
				KABIKOTA	PROPINSI							
1	2	3	4	5	6							
f	20	19	<b>Kecamatan Sungai Raya</b>	Rp	625.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
1	20	01	00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	300.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	02	00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	65.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	06	00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	10.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	09	00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp	20.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	10	00	Program peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Rp	40.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	24	00	Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp	23.500.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	27	00	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp	50.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	45	00	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan	Rp	12.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	47	00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	10.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	48	00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	10.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	49	00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	49.500.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	50	00	Program Penerapan E-KTP	Rp	5.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	51	00	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp	10.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	52	00	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kegiatan Sosial	Rp	20.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
f	20	20	<b>Kecamatan Jagoi Babang</b>	Rp	665.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
1	20	01	00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	320.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	02	00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	74.500.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	03	00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	10.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	06	00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	10.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	09	00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp	20.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	10	00	Program peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Rp	40.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	12	00	Program Penerapan KTP Elektronik	Rp	5.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	24	00	Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp	23.500.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	27	00	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp	50.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	45	00	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan	Rp	12.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	47	00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	10.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	48	00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	60.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	49	00	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp	10.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	50	00	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kegiatan Sosial	Rp	20.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
f	20	21	<b>Kecamatan Teriak</b>	Rp	665.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
1	20	01	00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	320.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	02	00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	69.500.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	05	00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	10.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	06	00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	10.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	09	00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp	20.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	10	00	Program Peringatan Hari-hari besar nasional dan keagamaan	Rp	40.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	24	00	Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp	23.500.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	27	00	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp	50.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	45	00	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan	Rp	12.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	47	00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	10.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	48	00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	65.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	49	00	Program Penerapan E-KTP	Rp	5.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	50	00	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp	10.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	51	00	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kegiatan Sosial	Rp	20.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
f	20	22	<b>Kecamatan Monterado</b>	Rp	645.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
1	20	01	00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	305.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	02	00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	79.500.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	05	00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	10.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	06	00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	10.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	09	00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp	20.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	10	00	Program Peringatan Hari-hari besar nasional dan keagamaan	Rp	40.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	11	00	Program Pengembangan data/Informasi/Statistik daerah	Rp	10.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	24	00	Program mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat	Rp	23.500.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	27	00	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp	50.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	45	00	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan	Rp	12.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	49	00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	10.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	50	00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	50.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	51	00	Program Penerapan E-KTP	Rp	5.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	52	00	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kegiatan Sosial	Rp	20.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
f	20	23	<b>Kecamatan Suti Semarang</b>	Rp	665.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
1	20	01	00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	325.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	02	00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	70.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	05	00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	10.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	06	00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	10.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	09	00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp	20.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	10	00	Program Peringatan Hari-hari besar nasional dan keagamaan	Rp	40.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	24	00	Program Mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat	Rp	23.500.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	27	00	Program Penataan Daerah Otonomi baru	Rp	50.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
1	20	45	00	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan	Rp	12.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PERKIRAAN BIAYA (Rp.)			SUMBER LAIN
			APBD	APBD	APBN	
			KAB/KOTA	PROPINSI		
1	2	3	4	5	6	
1 20 48 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 49 00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 59.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 50 00	Program Penerapan E-KTP	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 51 00	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 52 00	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kegiatan Sosial	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
<b>1 20 24</b>	<b>Kecamatan Ciputra</b>	<b>Rp 635.000.000,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
1 20 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 305.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 69.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
	Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 10 00	Program Peringatan Hari-hari besar nasional dan keagamaan	Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 11 00	Program Pengembangan data/Informasi/Statistik daerah	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 24 00	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Rp 23.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 27 00	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 45 00	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan	Rp 12.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 49 00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 50 00	Program Penerapan E-KTP	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 51 00	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kegiatan Sosial	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
<b>1 20 25</b>	<b>Kecamatan Siding</b>	<b>Rp 663.000.000,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
1 20 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 320.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 79.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
	Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 10 00	Program Peringatan Hari-hari besar nasional dan keagamaan	Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 11 00	Program Pengembangan data/Informasi/Statistik daerah	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 24 00	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Rp 23.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 27 00	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 45 00	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan	Rp 12.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 48 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 49 00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 55.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 50 00	Program Penerapan E-KTP	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 51 00	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kegiatan Sosial	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
<b>1 20 26</b>	<b>Kecamatan Sungai Betung</b>	<b>Rp 635.000.000,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
1 20 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 305.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 70.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 10 00	Program Peringatan Hari-hari besar nasional dan keagamaan	Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 12 00	Program Penerapan KTP Elektronik	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 24 00	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Rp 23.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 27 00	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 48 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 49 00	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan	Rp 12.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 50 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 51 00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 49.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 52 00	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 53 00	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kegiatan Sosial	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
<b>1 20 27</b>	<b>Kecamatan Lumar</b>	<b>Rp 625.000.000,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
1 20 01 00	Program Pelayanan Administrasi Parkantoran	Rp 300.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 69.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 10 00	Program Peringatan Hari-hari besar nasional dan keagamaan	Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 24 00	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Rp 23.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 27 00	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 45 00	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan	Rp 12.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 48 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 50 00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 45.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 51 00	Program Penerapan E-KTP	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 52 00	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 53 00	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kegiatan Sosial	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
<b>1 20 28</b>	<b>Kecamatan Sungai Raya Kepulauan</b>	<b>Rp 625.000.000,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
1 20 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 300.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 70.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	
1 20 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERKIRAAN BIAYA (Rp.)			SUMBER LAIN
		APBD	APBD	APBN	
		KAB/KOTA	PROPINSI		
1	2	3	4	5	6
1 20 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 10 00	Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan	Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 24 00	Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp 23.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 27 00	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 45 00	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan	Rp 12.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 48 00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 44.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 49 00	Program Penerapan E-KTP	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 50 00	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 51 00	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kegiatan Sosial	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 29	<b>Kecamatan Tujuh Belas</b>	<b>Rp 645.000.000,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
1 20 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 310.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 74.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 10 00	Program Peringatan Hari-hari Besar dan Nasional	Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 24 00	Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp 23.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 27 00	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 45 00	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan	Rp 12.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 50 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 50 00	Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 50 00	Program Penerapan E-KTP	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 50 00	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 50 00	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kegiatan Sosial	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 30	<b>Kecamatan Lembah Bawang</b>	<b>Rp 665.000.000,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
1 20 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 330.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 70.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 10 00	Program Peringatan Hari-hari besar nasional dan keagamaan	Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 24 00	Program mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat	Rp 23.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 27 00	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 45 00	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan	Rp 12.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 50 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 50 00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 54.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 50 00	Program Penerapan E-KTP	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 50 00	Pengembangan Data dan Informasi	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 50 00	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kegiatan Sosial	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 35	<b>Kelurahan Sebelo</b>	<b>Rp 375.000.000,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
1 20 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 175.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 35.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 10 00	Program Peringatan hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Rp 15.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 24 00	Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp 15.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 50 00	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 50 00	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kegiatan Sosial	Rp 110.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 36	<b>Kelurahan Bumi Emas</b>	<b>Rp 375.000.000,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
1 20 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 175.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 35.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 10 00	Program Peringatan Hari-hari besar nasional dan keagamaan	Rp 15.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 24 00	Program mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat	Rp 15.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 50 00	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 50 00	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kegiatan Sosial	Rp 110.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 37	<b>Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI</b>	<b>Rp 545.055.000,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
1 20 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 255.055.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 80.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 25.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 20 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -



KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PERKIRAAN BIAYA (Rp.)			SUMBER LAIN	
			APBD		APBN		
			KAB/KOTA	PROPINSI			
1	2	3	4	5	6		
1 20 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp	15 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 20 10 00	Program Peningkatan Han-han Besar Nasional dan Keagamaan	Rp	40 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 20 68 00	Program Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial	Rp	40 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 20 69 00	Program Olah Raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani	Rp	60 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 20 38	<b>Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu</b>	Rp	<b>3.000.000.000,00</b>	Rp	-	Rp	-
1 20 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	800 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 20 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	400 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 20 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	30 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 20 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	120 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 20 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Rp	80 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 20 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp	60 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 20 19 02	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp	110 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 20 19 03	Program Peningkatan Promosi dan Kinerja Investasi	Rp	900 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 20 20 00	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp	500 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 20 39	<b>Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal</b>	Rp	<b>4.200.000.000,00</b>	Rp	-	Rp	-
1 20 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	1 040 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 20 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	900 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 20 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	50 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 20 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	150 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 20 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	100 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 20 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp	60 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 20 27 00	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Rp	450 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 20 66 00	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Rp	1 450 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 30 01	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	Rp	<b>6.000.000.000,00</b>	Rp	-	Rp	<b>1.771.000.000,00</b>
1 30 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	640 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 30 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	280 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 30 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	6 700 000,00	Rp	-	Rp	-
1 30 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	22 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 30 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	30 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 30 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp	20 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 30 63 00	Program Perencanaan Daerah Rawan Bencana	Rp	500 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 30 64 00	Program Peningkatan Keselamatan dan Pencegahan Kebakaran	Rp	100 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 30 65 00	Program Penanganan Pasca Bencana	Rp	1 150 000 000,00	Rp	-	Rp	1 771 000 000,00
1 30 71 00	Program Penguatan peraturan Perundang-undangan	Rp	250 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 30 72 00	Program Kesiapsiagaan	Rp	200 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 30 73 00	Program Tanggap Darurat	Rp	2 801 300 000,00	Rp	-	Rp	-
1 30 31	<b>Dinas Pendapatan Daerah</b>	Rp	<b>4.850.000.000,00</b>	Rp	-	Rp	-
1 30 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	900 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 30 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	524 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 30 05 00	Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	Rp	100 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 30 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	110 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 30 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp	20 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 30 25 00	Program peningkatan, pengembangan dan pengelolaan PAD	Rp	3 156 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 30 43 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	30 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 30 44 00	Program Optimalisasi Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Mmk Daerah	Rp	10 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 22	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	Rp	<b>4.500.000.000,00</b>	Rp	<b>547.820.000,00</b>	Rp	<b>4.009.100.000,00</b>
1 22 01	<b>Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</b>	Rp	<b>4.500.000.000,00</b>	Rp	<b>547.820.000,00</b>	Rp	<b>4.009.100.000,00</b>
1 22 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	850 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 22 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	400 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 22 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	15 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 22 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	70 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 22 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	60 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 22 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp	40 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 22 15 00	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp	790 000 000,00	Rp	547 820 000,00	Rp	1 009 100 000,00
1 22 16 00	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp	515 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 22 17 00	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rp	700 000 000,00	Rp	-	Rp	3 000 000 000,00
1 22 18 00	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Rp	1 040 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 22 00	Program Program Optimalisasi Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Mmk Daerah	Rp	20 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 24	<b>KEARSIPAN</b>	Rp	<b>1.400.700.900,00</b>	Rp	-	Rp	-
1 24 01	<b>Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah</b>	Rp	<b>1.400.700.900,00</b>	Rp	-	Rp	-
1 10 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	350 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 10 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	150 700 900,00	Rp	-	Rp	-
1 10 03 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	33 000 000,00	Rp	-	Rp	-
1 10 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	32 000 000,00	Rp	-	Rp	-

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PERKIRAAN BIAYA (Rp.)			SUMBER LAIN
			APBD	APBD	APBN	
			KABKOTA	PROPINSI		
1	2	3	4	5	6	
1 10 06 00	Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan		Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 10 06 00	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		Rp 590.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 10 07 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 10 08 00	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		Rp 35.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 10 09 00	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi		Rp 150.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 01	<b>PERTANIAN</b>		Rp 18.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 01 01	<b>Dinas Pertanian</b>		Rp 18.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 01 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 1.500.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 01 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp 2.500.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 01 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 01 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp 125.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 01 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp 80.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 01 10 00	Program Penyebaran informasi pembangunan		Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 01 10 00	Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan		Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 01 16 00	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian		Rp 2.500.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 01 19 00	Program Peningkatan produksi Pertanian		Rp 1.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 01 16 00	Program Peningkatan Kesejahteraan Pertanian		Rp 350.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 01 18 00	Program Peningkatan Penerapan Teknologi pertanian		Rp 4.545.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 01 17 00	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian		Rp 500.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 01 21 00	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak		Rp 80.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 01 22 00	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		Rp 3.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 01 24 00	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 01 25 00	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan lapangan		Rp 1.500.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 02	<b>KEHUTANAN</b>		Rp 9.000.000.000,00	Rp -	Rp 4.618.650.000,00	Rp -
2 02 01	<b>Dinas Kehutanan dan Perkebunan</b>		Rp 9.000.000.000,00	Rp -	Rp 4.618.650.000,00	Rp -
2 02 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 900.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 02 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp 380.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 02 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Rp 30.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 02 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 02 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp 60.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 02 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan		Rp 60.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 02 10 00	Peringatan hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan		Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 02 15 00	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan		Rp 120.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 02 16 00	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Rp 2.000.000.000,00	Rp -	Rp 2.843.650.000,00	Rp -
2 02 17 00	Perlindungan dan Konservasi SD Hutan		Rp 250.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 02 19 00	Pembinaan dan Penerapan Industri Hasil Hutan		Rp 70.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 02 20 00	Perencanaan dan Pengembangan Hutan		Rp 150.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 02 24 00	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		Rp 1.100.000.000,00	Rp -	Rp 1.775.000.000,00	Rp -
2 02 26 00	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Prod. Pertanian/ Perkebunan		Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 02 24 00	Program Peningkatan Produksi Per / Perkebunan		Rp 3.710.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 03	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>		Rp 6.950.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 03 01	<b>Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral</b>		Rp 6.950.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 03 01 00	Program Pelayanan administrasi perkantoran		Rp 1.100.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 03 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp 225.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 03 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Rp 30.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 03 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 03 09 00	Program Penyebarluasan informasi pembangunan		Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 03 06 00	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Rp 45.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 03 15 00	Program Pembinaan dan pengawasan di bidang pertambangan.		Rp 600.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 03 15 00	Program Pembinaan dan pengembangan di bidang geologi.		Rp 450.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 03 15 00	Program Pencadangan dan pemetaan wilayah pertambangan.		Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 03 17 00	Program Pembinaan dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan.		Rp 3.929.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 03 18 00	Program Pengawasan dan Pengendalian Distribusi BBM		Rp 130.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 05	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		Rp 7.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 05 01	<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>		Rp 7.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 05 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 800.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 05 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp 150.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 05 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp 65.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 05 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp 60.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 05 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan		Rp 150.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 05 10 00	Program Peringatan Hari Besar Nasional dan Agama		Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 05 15 00	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir		Rp 1.100.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 05 20 00	Program Pengembangan Budidaya Perikanan		Rp 1.909.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 05 23 00	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		Rp 1.200.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 05 26 00	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap		Rp 1.400.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 05 29 00	Program Pengembangan UPTD		Rp 125.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERKIRAAN BIAYA (Rp.)			SUMBER LAIN
		APBD	APBD	APBN	
		KAB/KOTA	PROPINSI		
1	2	3	4	5	6
2 06	<b>PERDAGANGAN</b>	Rp 6.750.000.000,00	Rp -	Rp 3.055.000.000,00	Rp -
2 06 01	<b>Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan</b>	Rp 6.750.000.000,00	Rp -	Rp 3.055.000.000,00	Rp -
2 06 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 900.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 06 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 250.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 06 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 06 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 250.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 06 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dari Keuangan	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 06 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 06 10 00	Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan	Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 06 15 00	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp 500.000.000,00	Rp -	Rp 1.350.000.000,00	Rp -
2 06 18 00	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp 3.020.000.000,00	Rp -	Rp 1.705.000.000,00	Rp -
2 06 27 00	Program Peningkatan kemampuan Teknologi Industri	Rp 300.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 06 21 00	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp 600.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 15 34 00	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp 400.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2 15 35 00	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Rp 300.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
2	<b>Kantor Pemuda dan Olah Raga</b>	Rp 1.600.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
		Rp 1.600.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 740.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 25.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keu	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
	Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Rp 150.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup	Rp 30.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Rp 65.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 22	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA</b>	Rp 3.150.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 22 01	<b>Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</b>	Rp 3.150.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 22 01 00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 22 02 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 300.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 22 03 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 22 05 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 70.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 22 06 00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 75.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 22 09 00	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 22 24 00	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp 250.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 22 26 00	Program Keluarga Berencana	Rp 825.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 22 00	Program Penetapan Tenaga Pendamping Bina Keluarga	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
1 22 00	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp 170.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
	<b>TOTAL (URUSAN WAJIB DAN PILIHAN)</b>	<b>Rp 365.913.955.900,00</b>	<b>Rp 161.435.820.000,00</b>	<b>Rp 440.955.793.000,00</b>	<b>Rp 6.300.000.000,00</b>

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT